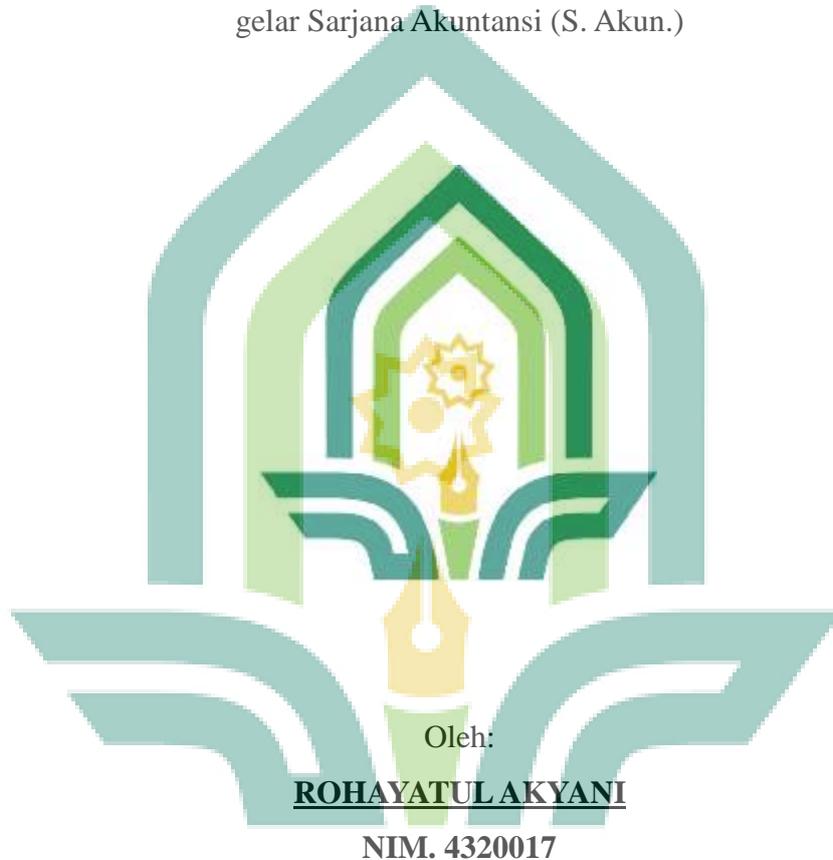


**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018- 2022
MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018- 2022
MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rohayatul Akyani**

NIM : **4320017**

Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui
Pendekatan *Value for Money***

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 juni 2024

Yang menyatakan



ATA5CALX280793829

Rohayatul Akyani

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdr. Rohayatul Akyani

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Rohayatul Akyani**
NIM : **4320017**
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan *Value for Money***

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Pembimbing



Ade Gunawan, M.M

NIP. 19810425 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudari:

Nama : **Rohayatul Akyani**
NIM : **4320017**
Judul : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan Value for Money**

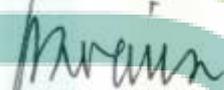
Dosen Pembimbing : **Ade Gunawan, M.M**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Karima Tamara, S.T., M.M.
NIP. 19730318 200501 2 002


Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si.
NIP. 1984061 2201903 2 011


Pekalongan, 17 Juli 2024
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Dibalik takdir yang membuat kita menangis, ada takdir yang belum kita ketahui. Mustahil Allah menyuruh kita bertahan tanpa sebuah alasan. Terkadang harus sakit dan sedih dulu, baru bahagia. Tidak akan matahari mendahului bulan dan tidak akan pula malam mendahului siang, semua sudah ada garis edarnya dan sudah ada. Selalu semangat dan ingat firman Allah bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(setitikrindu.co)

“Start now, perfect later. Intinya adalah mulai aja dulu dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Masalah sempurna itu urusan belakangan. Sama halnya seperti skripsi, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”

(jakartastudent.id)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia Pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapat berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak- pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Bapak Asari dan Ibu Wastri selaku kedua orang tua tercinta.
2. Kedua kakak saya Khunaenah dan Samsul Ma'arif beserta seluruh keluarga yang selalu menyemangati saya.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Gunawan Aji, M.Si selaku dosen penasehat akademik, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini.

6. Rokhmatus Solekha, Rohmatul Laeli, Kurmanisah dan masih banyak nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selaku sahabat seperjuangan pada masa perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi.
7. Teman- teman Program Studi Akuntansi Syariah 2020 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.



ABSTRAK

ROHAYATUL AKYANI, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan *Value for Money*

Sejak ditetapkannya anggaran berbasis kinerja setiap organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dituntut agar mampu memiliki kinerja keuangan pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pendekatan *value for money*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota pada Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan metode pengambilan sampel yaitu metode sensus atau sampel jenuh sehingga setiap populasi diambil sebagai sampel dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah tahun 2018- 2022 belum memenuhi prinsip *value for money* dari elemen ekonomis dapat diketahui periode tahun 2018- 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mampu melakukan penghematan dengan rasio ekonomis sebesar 98% pada tahun 2018 dan 2019, 88% pada tahun 2020, 95% pada tahun 2021, dan 97% pada tahun 2022. Pada rasio efektivitas masuk ke dalam kategori efektif dengan masing- masing tahun perolehan presentasinya yaitu tahun 2018 sebesar 101%, tahun 2019 presentasinya 100%, pada tahun 2020 presentasinya 90%, dan pada tahun 2021 dan 2022 presentasinya sebesar 99%. Namun dari rasio efisien masuk kedalam kategori kurang efisien dengan masing- masing perolehan presentase pada tahun 2018 sebesar 99%, pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 101%, pada tahun 2021 presentasinya sebesar 97% dan tahun 2022 sebesar 99%.

Kata Kunci: kinerja keuangan, *value for money*, ekonomis, efisiensi, efektivitas

ABSTRACT

ROHAYATULAKYANI, *Analysis of the Financial Performance of the Regional Government of Central Java Province for the 2018-2022 Fiscal Year Through the Value for Money Approach*

Since the establishment of performance-based budgeting, every public sector organization, especially local governments and central governments, is required to be able to have good government financial performance. The purpose of this study is to measure the financial performance of local governments through the value for money approach.

This research is quantitative research. In this study using documentation as a data collection technique. The population in this study were all districts / cities in Central Java Province. Based on the sampling method, namely the census method or saturated sample so that each population is taken as a sample in the study. The data used in this study are the Budget Realization and Expenditure Reports of the Regional Government of Central Java Province for the 2018-2022 fiscal year. The data analysis technique used is descriptive analysis.

The results of this study indicate that the financial performance of the Central Java Regional Government in 2018-2022 has not fulfilled the principle of value for money from the economic element, it can be seen that the period 2018-2022 the Regional Government of Central Java Province has been able to make savings with an economic ratio of 98% in 2018 and 2019, 88% in 2020, 95% in 2021, and 97% in 2022. In the effectiveness ratio, it falls into the effective category with each year of the percentage acquisition, namely in 2018 by 101%, in 2019 the percentage is 100%, in 2020 the percentage is 90%, and in 2021 and 2022 the percentage is 99%. However, from the efficient ratio, it falls into the less efficient category with each percentage acquisition in 2018 of 99%, in 2019 and 2020 of 101%, in 2021 the percentage is 97% and in 2022 it is 99%.

Keywords: *financial performance, value for money, economy, efficiency, effectiveness*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin, M.M. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Gunawan Aji, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan material dan moral

7. Rokhmatus Solekha, Rohmatul Laeli, dan Kurmanisah serta sahabat seperjuangan Akuntansi Syariah selama perkuliahan

8. Seluruh pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Yang menyatakan



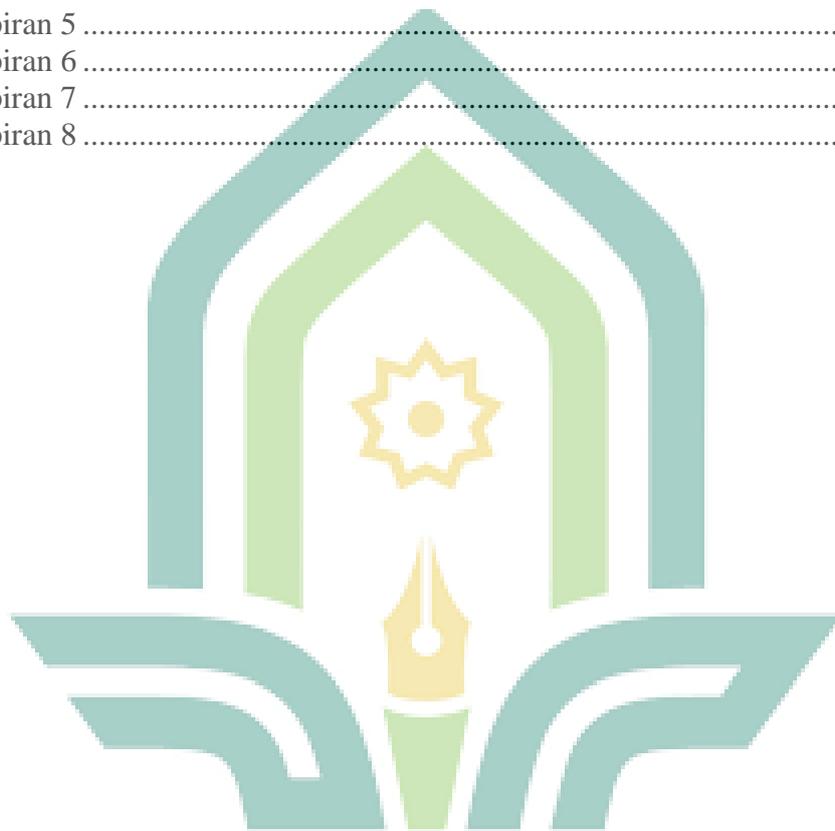
Rohayatul Akyani



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Pembahasan | 11 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| A. Landasan Teori | 13 |
| B. Telaah Pustaka | 31 |
| C. Kerangka Berpikir | 38 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Setting Penelitian | 39 |
| D. Sumber data | 40 |
| E. Populasi dan Sampel | 39 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| G. Teknik Analisis Data | 41 |
| H. Definisi Variabel | 42 |
| | |
| BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 46 |
| B. Objek Penelitian | 47 |
| C. Data Penelitian | 47 |
| D. Hasil Perhitungan Data | 62 |
| E. Pembahasan Analisis | 107 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|
| BAB V | PENUTUP | 122 |
| | A. Kesimpulan | 122 |
| | B. Saran | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 124 |
| LAMPIRAN | | I |
| Lampiran 1 | | I |
| Lampiran 2 | | V |
| Lampiran 3 | | IX |
| Lampiran 4 | | XIII |
| Lampiran 5 | | XVII |
| Lampiran 6 | | XXII |
| Lampiran 7 | | XXVII |
| Lampiran 8 | | XXXII |



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | a | | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | al | | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ad | | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ad | | de (dengan titik di bawah) |
| ط | a | | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | a | | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ' | Fathah | A | A |
| ◌◊ | Kasrah | I | I |
| ◌◊◊ | Dhammah | U | U |

2) Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------|----------------|-------------|---------|
| ◌◊◊...ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ◌◊◊...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

3. Mahdah

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ... | Fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| ... | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| ... | Hammah dan wau | U | u dan garis di atas |

4. Ta' Marbutah

- 1) Ta' marbutah hidup (ditransliterasikan dengan "t")

Contoh:

الأطفال روضة - rau ah al-a f l

- 2) Ta' marbutah mati (ditransliterasikan dengan "h")

Contoh:

- talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

-nazzala

-al- birra

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

Contoh:

-ar- rajulu

-as- syamsu

-al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-syai'un

-inna



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022 | 6 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengalami defisit anggaran | 7 |
| Tabel 2.1 | Kriteria Rasio Ekonomis | 27 |
| Tabel 2.2 | Kriteria Rasio Efisiensi | 28 |
| Tabel 2.3 | Kriteria Rasio Efektivitas | 28 |
| Tabel 4.1 | Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah..... | 47 |
| Tabel 4.2 | Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 | 48 |
| Tabel 4.3 | Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 | 51 |
| Tabel 4.4 | Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 | 54 |
| Tabel 4.5 | Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 | 57 |
| Tabel 4.6 | Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | 60 |
| Tabel 4.7 | Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018..... | 64 |
| Tabel 4.8 | Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019..... | 67 |
| Tabel 4.9 | Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... | 70 |
| Tabel 4.10 | Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021..... | 73 |
| Tabel 4.11 | Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... | 76 |
| Tabel 4.12 | Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018..... | 79 |
| Tabel 4.13 | Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019..... | 82 |

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 4.14 | Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... | 85 |
| Tabel 4.15 | Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021..... | 88 |
| Tabel 4.16 | Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... | 90 |
| Tabel 4.17 | Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018..... | 93 |
| Tabel 4.18 | Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019..... | 96 |
| Tabel 4.19 | Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... | 98 |
| Tabel 4.20 | Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021..... | 101 |
| Tabel 4.21 | Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... | 104 |
| Tabel 4.22 | Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | 117 |
| Tabel 4.23 | Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | 118 |
| Tabel 4.24 | Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | 120 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Penelitian 38



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|-------|
| Lampiran 1 | Data Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022..... | I |
| Lampiran 2 | Data Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022 | V |
| Lampiran 3 | Data Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018- 2022 | IX |
| Lampiran 4 | Data Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018- 2022 | XIII |
| Lampiran 5 | Daftar Kabupaten/ Kota dan Tingkat Ekonomisnya di Tahun 2018- 2022..... | XVII |
| Lampiran 6 | Daftar Kabupaten/ Kota dan Tingkat Efektivitas di Tahun 2018- 2022..... | XXII |
| Lampiran 7 | Daftar Kabupaten/ Kota dan Tingkat Efisiensinya di Tahun 2018- 2022..... | XXVII |
| Lampiran 7 | Daftar Riwayat Hidup..... | XXXII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan prinsip otonominya yang luas. Otonomi daerah diartikan sebagai wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan yang berkaitan dengan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari adanya pelaksanaan otonomi daerah sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah otonom. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat daerah di Indonesia yang belum optimal dalam melaksanakan serta mewujudkan tujuan tersebut (Syam and Zulfikar 2022).

Suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang jika mampu menciptakan roda pemerintahan yang bersih, transparan, penerapan *value for money* yang benar serta akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur rumah tangga pemerintah daerah, pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang luas. Pemerintah daerah memiliki tujuan yang harus dipenuhi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan benar meliputi pendidikan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur dan penyediaan barang kebutuhan masyarakat (Jacson 2023).

Hasibuan (2001) dalam (Nasir, Basalamah, and Murfat 2020) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesanggupan dan waktu. Agar dapat menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta target yang sudah direncanakan maka diperlukan adanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik memiliki tiga tujuan yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, yang kedua untuk mengalokasikan sumber daya serta tolak ukur pengambilan keputusan dan yang terakhir adalah sebagai wujud dari pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan (Sibarani 2023).

Dalam Organisasi sektor publik kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas, dikarenakan sejak ditetapkannya anggaran berbasis kinerja setiap organisasi sektor publik khususnya pemerintahan baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dituntut agar mampu memiliki kinerja keuangan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah dituntut tidak melakukan tindakan pemborosan, kebocoran dana serta dapat mendeteksi program- program yang kurang layak untuk memenuhi tuntutan atas meningkatnya akuntabilitas publik (Naibaho 2023).

Menurut (Mardiasmo 2018) pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik yang bertujuan untuk membantu manajemen publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai salah satu alat evaluasi mengenai kegiatan yang telah

dilaksanakan sehingga juga dikatakan sebagai alat pertimbangan pengambilan keputusan.

Terdapat dua alat ukur dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu *value for money* dan *balance score card*. *Balance score card* pertama kali diperkenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersil sedangkan *value for money* pada sektor publik. Pengukuran kinerja metode *balance score card* terdapat 4 indikator yaitu perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif proses bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Sholikhah dan Khoiriawati 2022). Sedangkan *Value for money* adalah sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama yaitu ekonomis, efektif dan efisien (Mardiasmo 2018).

Value for Money (VFM) menggunakan 3 rasio dalam pengukuran kinerjanya, yaitu Rasio Ekonomi, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Rasio ekonomi digunakan untuk mengukur Tingkat kehematan dari pengeluaran suatu organisasi sektor publik, pada pengukuran ini menggunakan data anggaran belanja dan realisasinya. Pada rasio ini kinerja keuangan dapat dikatakan semakin baik apabila presentase ekonomisnya semakin kecil. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam segi pendapatannya. Semakin besar rasio efektivitas yang dihasilkan maka akan semakin baik kinerja keuangan yang semakin efektif. Sedangkan rasio efisiensi adalah pengukuran kinerja dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh, semakin kecil rasio efisiensi

yang dihasilkan maka akan menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik (Lastari 2020).

Pengukuran kinerja tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjabarkan kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk representasi kepatuhan daerah terhadap APBD. Laporan Realisasi anggaran adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi aktivitas serta pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar- iktisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam atau mengambil keputusan. Jika dibandingkan dengan dengan neraca, laporan realisasi anggaran memiliki prioritas yang lebih penting dalam laporan ini menyajikan sumber, lokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan (Naffa Litauji 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perangkat kebijakan utama bagi pemerintah daerah yang mana APBD memegang peranan penting dalam usaha perluasan kemampuan dan evektivitas pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah terkait APBD perlu ditetapkan standar untuk menetapkan suatu daerah tersebut sudah mandiri, efektif, efisien serta akuntabel (Deasy Ervina 2023). Provinsi jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki luas wilayah 3,26 juta hektar luas wilayah atau kisaran 26% dari luas pulau jawa dan 1,71% dari luas Indonesia (Bilqis and Priyono 2023). Secara administratif jumlah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan data yang diperoleh

dari website <https://jateng.beta.bps.go.id/id/infographic?id=918> milik Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah per bulan Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,83 juta jiwa dengan kabupaten brebes sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni 290,66 ribu jiwa dan kabupaten kebumen merupakan kabupaten dengan presentase miskin terbesar yakni 16,41% (Badan Pusat Statistik, n.d.). Dalam peringkat nasional, Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin kedua di Jawa, dengan presentase 10,77% (Sari Hardiyanto 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat dinilai belum optimal, karena segenap potensi yang dimiliki daerah belum dikembangkan secara maksimal bagi perekonomian. Dalam era otonomi daerah tentunya sangat diperlukan tercapainya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga pemerintah daerah harus berupaya menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang intensif (Destiniasih, Achasa, and Septiani 2019).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Tahun 2018- 2022 diperoleh sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022

| Tahun | Pendapatan Daerah | |
|-------|--------------------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi |
| 2018 | 24.413.659.858.000 | 24.702.318.190.582 |
| 2019 | 25.965.581.322.000 | 25.859.780.137.936 |
| 2020 | 28.301.075.368.000 | 25.393.735.934.148 |
| 2021 | 26.840.833.343.000 | 26.633.000.085.963 |
| 2022 | 24.303.739.912.000 | 24.167.935.634.127 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota, diolah peneliti

Dari data di atas, pada tahun 2018, provinsi Jawa Tengah sudah mampu merealisasikan anggaran pendapatan melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 288. 658.332.582,00 atau sebesar 1,19%. Kemudian tahun 2019-2022 realisasi anggaran pendapatan pada Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target anggaran. Pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan Provinsi Jawa Tengah tidak ter-realisis sebesar 0,40% atau sebesar 105.801.184.064,00. Pada tahun 2020 tidak ter-realisis sebesar 10,28% atau 2.907.339.433.852, dari target realisasi. kemudian tahun 2021 kembali tidak ter- realisasi sebesar 0,78% atau Rp. 207.833.257.037,00 dari target realisasi pendapatan dan kemudian pada tahun 2022 tidak ter-realisis kembali sebesar 0,56% atau sebesar 135.804.277.873,00. Yesica Lola (2016) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang telah dianggarkan, sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka akan dinilai kurang baik. Selisih lebih dari realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favorable variance*) sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*).

Jika dilihat dari sisi penggunaan belanja dan pendapatannya kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018- 2022 yang mengalami defisit anggaran jumlahnya selalu berubah setiap tahunnya. Yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengalami defisit anggaran Tahun 2018-2022

| Tahun | Jumlah Kabupaten/ Kota |
|-------|------------------------|
| 2018 | 18 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 28 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2022, diolah peneliti

Defisit anggaran merupakan keadaan yang terjadi apabila oleh suatu pengeluaran yang berlebihan dari pada penerimaan (Ulum and Gisela Syaputri 2021). Kondisi defisit ini dianggap negatif karena bisa menunjukkan ketidakseimbangan keuangan yang berkelanjutan dan berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Defisit anggaran diartikan sebagai indikator dari beberapa masalah yang lebih dalam, termasuk pengelolaan keuangan yang kurang efektif, pendapatan yang terbatas serta prioritas pengeluaran yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu terjadinya defisit anggaran juga mencakup keterbatasan dalam pelaksanaan program- program Pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan (Kurnia Mayasari 2024).

Menurut (Suriadi 2013) defisit yang terjadi selama satu tahun dapat bersifat sementara, sedangkan defisit yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan terdapat ketidakseimbangan fiskal. Ketidakseimbangan fiskal merupakan salah satu masalah dalam kinerja keuangan karena dapat memberikan dampak negatif terhadap keuangan pemerintah daerah dan

ekonomi secara keseluruhan seperti pengeluaran yang tidak efektif. Dengan meningkatnya jumlah kabupaten/ kota yang mengalami defisit di Jawa Tengah analisis dengan menggunakan alat pengukuran value for money cocok dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui kabupaten/ kota mana yang kinerja keuangan pemerintah kurang baik sehingga dapat membantu serta mengevaluasi pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran yang lebih baik untuk masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Esislahyenti, Mursalini, dan Indrawati 2023) Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok menunjukkan bahwa kinerja pada dinas sosial kabupaten solok pada tahun 2020-2022 sudah memenuhi prinsip *value for money*, jika dilihat dari elemen ekonomi dan efisiensi dinas sosial kabupaten Solok telah mampu menyelenggarakan seluruh program secara ekonomis dan efisien, namun jika dilihat dari elemen efektivitas dapat pada tahun 2020- 2021 dinas sosial kabupaten Solok belum dapat dikategorikan efektif dikarenakan indikator kerja yang ditetapkan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, dan pada tahun 2022 dinas sosial kabupaten solok telah menyelenggarakan secara efektif.

Penelitian pengukuran kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money* pada kantor kecamatan Gedeg Periode 2017- 2021 yang dilakukan oleh (Dinanty et al. 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan *Value for Money* dengan menggunakan kriteria ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan hasil menunjukkan kriteria cukup ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif. Penelitian serupa dilakukan oleh (Sholikhah and

Khoiriawati 2022) pada APBDes desa pucangsimo tahun anggaran 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa pucangsimo termasuk kedalam kategori ekonomis, sedangkan dari segi efisiensi pada tahun 2018 – 2019 menunjukkan hasil efisien sedangkan pada tahun 2017, 2020 dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien. Dan dari segi efektivitas pada tahun 2017-2019 menunjukkan hasil efektif sedangkan pada tahun 2020- 2021 menunjukkan hasil cukup efektif.

Berdasarkan paparan teori, fenomena serta penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022 dengan menggunakan pendekatan *value for money* pada pemerintah provinsi jawa tengah. *Value for money* diperlukan agar pengeluar dapat digunakan sesuai dengan rencana kinerja yang baik, dikarenakan jika pengeluaran yang dimanfaatkan sebaik- baiknya akan memberikan output yang baik sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan *Value for Money*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Rasio ekonomi?
2. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Rasio efektivitas?

3. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Rasio efisiensi?
4. Bagaimana analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari pendekatan Value for Money?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018- 2022 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio ekonomis
2. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018- 2022 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio efisiensi
3. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018- 2022 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio efektifitas
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun anggaran 2018- 2022 ditinjau dari pendekatan Value for Money

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada cabang ilmu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang termasuk kedalam wilayah provinsi jawa Tengah dalam hal peningkatan kinerja keuangannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya supaya menjadi penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat mengenai tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang sesuai dengan tema penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan beserta alasan, jenis penelitian, setting penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran hasil penelitian serta analisa. Hasil dan pembahasan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah serta pendekatan penelitian yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran maupun rekomendasi dalam penulisan skripsi. Kesimpulan berisi ringkasan dari penelitian yang telah dilaksanakan sedangkan saran merupakan rekomendasi yang perlu diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori stewardship diartikan sebagai situasi dimana pemerintah sebagai steward tidak memiliki kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan principal. Dalam teori stewardship pemerintah sebagai steward akan berperilaku sesuai kepentingan bersama (Suryanto and Refianto 2019). Dalam teori stewardship pemerintah selaku steward menjalankan fungsi pengelola sumber daya, sementara rakyat berperan sebagai principal. Terdapat hubungan antara pemerintah selaku steward dan rakyat selaku principall. Organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa kinerja yang baik (Hakiki 2022).

Keterkaitan teori stewardship pada penelitian ini yaitu dapat menerangkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola semua kekayaan yang dimiliki oleh rakyat selaku principal, bisa menjalankan tugas serta fungsinya secara tepat serta mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diamanatkan oleh principal kepada steward ditunjukkan dengan laporan realisasi anggaran instansi yang mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan pengukuran kinerja pada instansi

pemerintahan (steward) untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target atau sasaran.

2. Kinerja

Kinerja menurut Mardiasmo adalah suatu pencapaian atas apa yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi, suatu kinerja apabila tidak mencapai apa yang telah direncanakan maka dapat dikatakan kinerja organisasi tidak baik, namun sebaiknya apabila pencapaian dari yang telah direncanakan maka kinerja dapat dikatakan baik dan apabila hasil pencapaian melebihi apa yang telah direncanakan maka dapat dikatakan sangat baik (Harahap 2020).

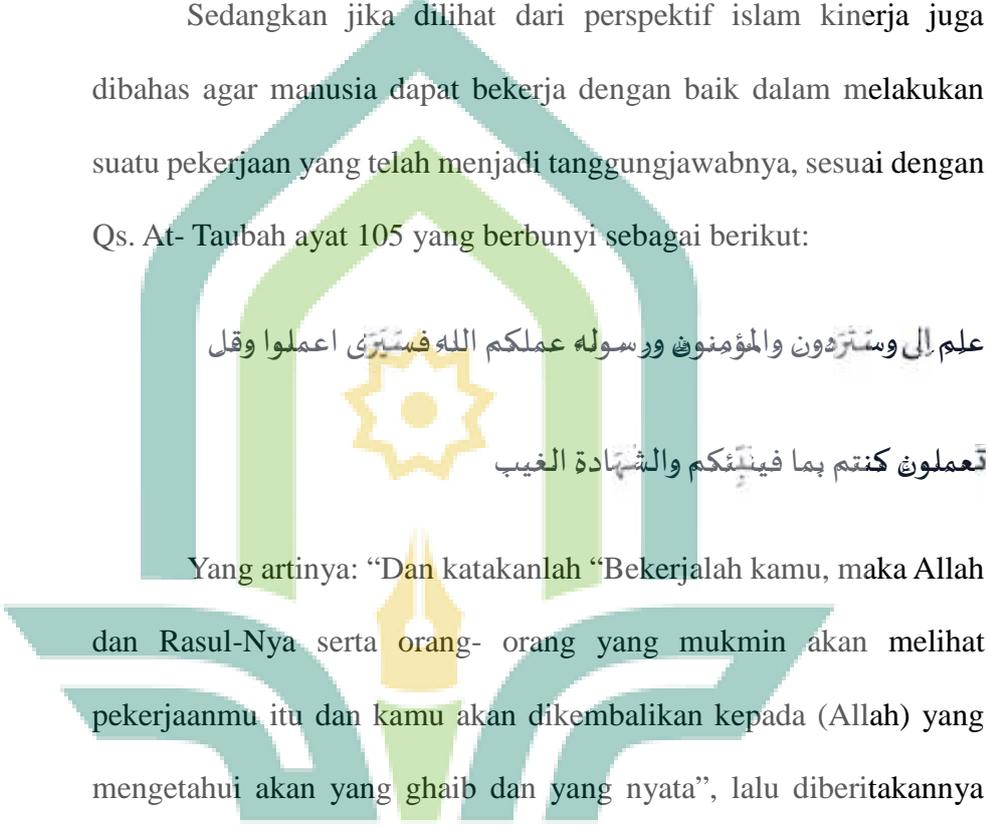
Sedangkan pendapat yang dijelaskan oleh Mokodompit (2014) dalam (N. N. Karina and Wibowo 2022) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang dituangkan dalam strategic planning, kinerja bisa diketahui ketika individu maupun kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Dalam jurnal milik B. I. Sari dan Wati (2021) pendapat yang dikemukakan oleh Mahsun (2006) mengenai kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah. Dari pengertian kinerja tersebut dapat diartikan bahwa kinerja adalah sebuah hasil pencapaian atas segala sesuatu yang telah direncanakan pada periode tertentu yang telah ditentukan.

Pendapat lain mengenai kinerja dijelaskan oleh Bastian (2006) pengukuran kinerja adalah suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil- hasil yang ditampilkan, berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan pendapat Deasy Ervina (2023) yaitu:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai tingkat keberhasilan tujuan organisasi. Penilaian kerja memiliki fungsi yang menjelaskan tingkat pencapaian tujuan serta apakah sebuah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditentukan.
- 2) Memperbaiki kinerja periode yang akan datang sehingga pengukuran kinerja dapat digunakan untuk syarat pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa depan. Dengan adanya pengukuran kinerja dalam jangka Panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi dalam sebuah organisasi.
- 3) Mendistribusikan pertimbangan yang sistematis dalam membuat keputusan pemberian reward (penghargaan) dan juga hukuman maka pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar bagi manajer untuk memberikan reward.
- 4) Meningkatkan serta meningkatkan akuntabilitas pegawai
- 5) Meningkatkan keinginan dan semangat kerja karyawan, sehingga dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai pegawai yang mempunyai pencapaian kinerja yang baik akan memperoleh kompensasi yang tinggi

- 6) Mempersiapkan sarana pembelajaran pegawai dengan menggunakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran ini bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkan terhadap tujuan organisasi.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif islam kinerja juga dibahas agar manusia dapat bekerja dengan baik dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan Qs. At- Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:



علم إلى وستردون والمؤمنون ورسوله عملكم الله فيسرى اعملوا وقل
تعملون كنتم بما فينتئكم والشهادة الغيب

Yang artinya: “Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata”, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

3. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah yang bermanfaat untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung dalam proses berjalannya suatu pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat (Anynda and Hermanto 2020). Dalam jurnal milik

Utari et al. (2023) menjelaskan bahwa pendapat menurut Fahmi (2012) tentang kinerja keuangan yaitu melakukan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai seberapa besar suatu korporasi menetapkan aturan secara efektif dan tepat. Misalnya dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan dan pedoman GAAP (General Accepted Accounting Principle) atau SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

4. Organisasi Sektor Publik

Menurut Mahsun (2006) dalam Sanjaya dan Priyadi (2019) memberikan pendapat bahwa organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menyediakan segala barang atau jasa untuk publik serta melaksanakan transaksi ekonomi dan keuangan, namun dalam organisasi sektor publik dikelola untuk tidak mencari keuntungan dengan kata lain organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara yang lain dan diatur dalam undang-undang.

5. Anggaran

Menurut (Biduri 2018) anggaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuangan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Anggaran dapat diimplementasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran dimasa lalu. Anggaran sektor publik merupakan perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu yang digunakan sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih dan sebagainya.

Jenis- Jenis Anggaran

Menurut Deddi Nordiawan (2010) dalam Andaresya (2022) anggaran diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Anggaran operasional dan anggaran modal

Anggaran operasional digunakan merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari- hari dalam kurun waktu satu tahun, anggaran ini dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset anggaran modal menunjukkan jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Anggaran modal merupakan pengeluaran dan pemanfaatanya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik yang selanjutnya akan menambah anggran operasional untuk pemeliharanya.

b. Anggaran berdasarkan pengesahan

Jika dilihat berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentative dan anggaran enacted. Anggaran tentative merupakan anggaran yang tidak memerlukan adanya pengesahan dari lembaga legislative karena kemunculannya yang disebabkan hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Berbanding terbalik dengan anggaran enacted merupakan anggaran yang sudah direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

c. Anggaran dana umum & anggaran dana khusus

Dalam suatu pemerintahan anggaran atas kekayaan negara atau dana dibagi menjadi dua yaitu dana umum dan dana khusus. Dana umum digunakan membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan dana khusus dialokasikan khusus dengan tujuan tertentu.

d. Anggaran tetap dan anggaran flexibel

Anggaran tetap merupakan anggaran yang apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran dan jumlah tersebut tidak boleh di lampau meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan, sedangkan anggaran flexibel merupakan anggaran yang secara keseluruhan akan berfluktual bergantung pada banyaknya kegiatan dilakukan walaupun harga barang/ jasa perunit telah ditetapkan.

e. Anggaran eksekutif dan anggaran legislatif

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dibagi menjadi dua yaitu anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Berdasarkan penyebutannya sudah dapat diketahui bahwa anggaran eksekutif merupakan anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif sedangkan anggaran legislatif merupakan anggaran yang disusun oleh lembaga legislative tanpa melibatkan anggota eksekutif.

Penggunaan anggaran belanja negara yang baik menurut Islam ialah anggaran yang dalam penggunaannya tidak boros juga tidak terlalu sedikit dalam penggunaannya hal tersebut harus digunakan sesuai dengan prioritas penunjang ekonomi masyarakat seperti memenuhi kebutuhan administrasi publik, pertahanan, serta kepentingan sosial lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Al Quran dalam kandungan surah Qs. Al- Furqaan ayat 67 sebagai berikut.

قواما ذلك بين وكان يفتروا ولم يسرفوا لم انفقوا اذا والذين

Yang artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah- tengah antara yang demikian”.

Penggunaan anggaran belanja negara untuk keperluan subsidi dan kepentingan publik lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan dengan baik maka dapat memberikan

kondisi ekonomi yang stabil dan mendorong adanya pembangunan ekonomi serta peningkatan kapasitas produksi suatu negara.

6. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang dapat memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan (Samukri and Gusherinsyah 2020). Tujuan utama dari pembuatan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang kinerja keuangan serta menilai adanya finansial suatu Perusahaan, baik dalam keadaan positif maupun negatif. Laporan keuangan disajikan dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (Dharma et al. 2023). Asep Risman and Mustaffa (2023) menjelaskan bahwa secara umum laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Laba Rugi (Income Statement)
- b. Laporan Neraca (balance sheet)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (laba ditahan)
- d. Laporan arus kas (statement of Cash Flow)

Sedangkan unsur laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada PSAP Nomor 1, komponen- komponen yang ada pada laporan keuangan pemerintah terdiri dari 2 hal, yaitu laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah antara lain (Muttaqin, n.d.):

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Fitra (2019) menjelaskan bahwa manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu antara lain:

- a. Memberikan informasi untuk perencanaan serta penganggaran
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi Kesehatan keuangan pemerintah terkait likuiditas dan solvabilitasnya
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
- d. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan- perubahan yang telah dan akan terjadi
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - 1) Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria

yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintah lain

- 2) Untuk mengevaluasi Tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu di pemerintahan
- 3) Untuk mengevaluasi hasil income (outcome) suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target
- 4) Untuk mengevaluasi Tingkat pemerataan dan keadilan (equity and equality).

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar- ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil Keputusan (Walandouw, Tinangon, dan Dien 2019). Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu Perusahaan atau instansi, Dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu Perusahaan atau instansi. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu

daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah (Kusumawati and Afriani 2017).

Unsur- unsur Laporan Realisasi dalam Sari Nasution (2021) terdiri dari pendapatan- LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Daerah- LRA

Secara umum, pendapatan -LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/ daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Berdasarkan PP 71/2010, menyatakan bahwa definisi dari pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Sita 2022). Pendapatan- LRA adalah keseluruhan penerimaan yang diterima negara yang dibukukan dengan basis kas yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam komponen ini terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain- lain pendapatan daerah yang sah.

b. Belanja Daerah

Belanja dalam basis kas diartikan sebagai semua pengeluaran oleh Bendara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali sedangkan belanja dalam basis akrual diartikan sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah milik Pemerintah Daerah komponen belanja daerah terbagi menjadi beberapa macam belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial (Sari Nasution 2021).

c. Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengertian lain dari transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil (Sari Nasution 2021)

d. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dari atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (Sari Nasution 2021).

8. *Value for Money*

Value for Money merupakan suatu konsep penilaian kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (M. Iqbal Ashari 2020). Menurut pengertian Deasy Ervina (2023) *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik Dimana *value for money* diartikan penghargaan terhadap nilai uang.

Sanjaya dan Priyadi (2019), menjelaskan bahwa konsep *value for money* terdiri atas tiga indikator utama yaitu:

- a. Ekonomis yaitu keterkaitannya dengan penggunaan input primer (anggaran atau kas) menjadi input regular (tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal) yang dikonsumsi oleh organisasi untuk melakukan kegiatan operasional. Dalam konsep ekonomi ini suatu sektor publik diharapkan untuk tidak melakukan pemborosan dalam melaksanakan program, kegiatan ataupun operasional organisasi.

- b. Efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan yang diterima dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan melakukan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dalam rancangan efisiensi ini dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat serta dana yang digunakan seminimal mungkin
- c. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan, suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Manfaat penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik menurut (Mardiasmo 2002) antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik
- b. Alokasi belanja lebih focus pada kepentingan publik
- c. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik tepat sasaran
- d. Meningkatkan mutu pelayanan publik
- e. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

Pengukuran *Value for Money*

- a. Rasio Ekonomis

Ekonomis atau kehematan berkaitan dengan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu.

Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi atau bahkan mengjhilangkan biaya yang tidak diperlukan. Maka apabila terjadi peningkatan biaya maka harus ada pemanfaatan yang memberikan hasil yang lebih besar pula. Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$R \quad E = \frac{R}{A} \frac{B}{B} \frac{D}{D} \frac{h}{h} \times 100\%$$

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan yaitu:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Ekonomis

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|--------------------|
| Lebih dari 100% | Tidak Ekonomis |
| 100% | Ekonomis Berimbang |
| Kurang dari 100% | Ekonomis |

Sumber: Mahbengi (2017)

b. Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya. Semakin kecil rasio efisiensi maka dapat diartikan kinerja organisasi tersebut semakin baik. tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Adapun rumus untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut.

$$R E = \frac{R B D h}{R P D h} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria penilaian dari rasio efisiensi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efisiensi

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| Lebih dari 100% | Tidak Efisien |
| 90%- 100% | Kurang Efisien |
| 80%-90% | Cukup Efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisien |

Sumber: Komada (2021)

c. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya. Rumus untuk mengetahui rasio efektivitas adalah sebagai berikut.

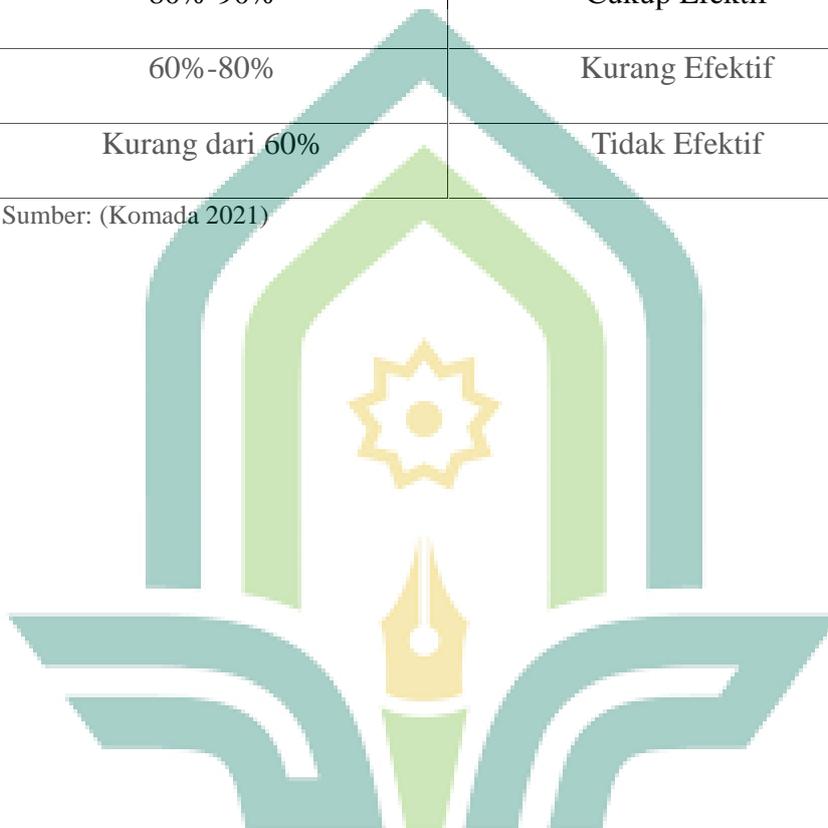
$$R E = \frac{R a P D h}{A P D h} \times 100\%$$

Organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai di atas seratus persen dan semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Sedangkan kriteria efektivitas keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Rasio Efektivitas

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| Lebih dari 100% | Sangat Efektif |
| 90%- 100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup Efektif |
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

Sumber: (Komada 2021)



B. Telaah Pustaka

Tabel 2.4
Telaah Pustaka

| No. | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Metode Analisis data | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|-----|---|--|------------------------------|--|---|---|
| 1. | Yaman (2022) | Analisis Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta: Pendekatan <i>Value for Money</i> dan Rasio Keuangan | Metode deskriptif analitis | Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan konsep <i>Value for Money</i> yang dilakukan, kinerja RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta secara keseluruhan tergolong baik. RS PKU Muhammadiyah dapat meningkatkan laba bersih dari kegiatan yang dioperasikannya | <ul style="list-style-type: none"> • Instansi penelitian yang berbeda • Tahun anggaran penelitian berbeda | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> |
| 2. | Sahrini Nasution, Arif Lubis, and Daim Harahap (2023) | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan <i>Value for Money</i> Pada Dinas Sosial Kabupaten | Metode kualitatif deskriptif | Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2019-2021 pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari tingkat ekonomi termasuk dalam kategori cukup | <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi sektor publik dalam penelitian berbeda. | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | Tapanuli Selatan | | <p>ekonomis yaitu sebesar 71,66%, termasuk dalam kategori ekonomis sebesar 89,40% dan 97,77% termasuk dalam kategori sangat ekonomis. Ditinjau dari tingkat efisiensi termasuk dalam kategori sangat efisien dimana nilai rasionya yaitu sebesar 97,68%, 91,72% dan 94,09%. Ditinjau dari tingkat efektivitas yaitu sebesar tahun 2019 termasuk dalam kategori cukup efektif tahun 2020 masuk dalam kategori efektif dan tahun 2021 masuk dalam kategori sangat efektif.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian berbeda | <p>yaitu <i>value for money</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama sama menganalisis kinerja keuangan organisasi sektor publik |
| 3. | Dinanty (2023) | Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> Dan Rasio Keuangan | Metode deskriptif kuantitatif | <p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebelum covid-19 menggunakan metode <i>value for money</i>, menunjukkan kriteria cukup ekonomis, sangat efektif dan cukup efisien. kemudian pada saat terjadinya covid-19 dengan menggunakan rasio keuangan menunjukkan posisi desentralisasi fiskalnya sangat baik, ketergantungan keuangan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tahun anggaran dalam penelitian berbeda • Objek penelitian berbeda | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> • Menganalisis kinerja keuangan |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|---|--|---|
| | | Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021 | | pemerintah daerahnya sangat rendah, dan masih kurang efektif. Sedangkan kondisi setelah pandemi menunjukan tidak ekonomis, sangat efektif dan cukup efisien. | | organisasi sektor publik |
| 4. | Esislahyenti, Mursalini, dan Indrawati (2023) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan <i>Value for Money</i> (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok) | Metode deskriptif kuantitatif | Berdasarkan olah data yang dilakukan dapat diketahui bahwa tahun 2020- 2022 masuk kedalam kategori ekonomis, dari segi efisiensi menunjukan hasil yang efisien, dan yang terakhir dari segi efektivitas pada tahun 2020-2021 Dinas Sosial Kabupaten Solok memberikan hasil yang tidak efektif karena indikator kinerja yang telah ditetapkan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya hasil presentase sebesar 50%, sedangkan periode tahun 2022 semua indikator kinerja secara efektif dengan rasio efektivitas pada setiap program mencapai 100%. | <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian terdahulu hanya membahas tiga tahun anggaran yaitu dari tahun 2020- 2022 • Objek penelitian berbeda | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> |
| 5. | Widianti, Fitriyah, dan S (2022) | Analisis Kinerja Keuangan Pendekatan | Metode deskriptif kuantitatif | hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2017- 2020 Dinas Kesehatan Kota mataram | <ul style="list-style-type: none"> • Tahun anggaran penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|--|--|---|
| | | <i>Value for Money</i> Pemerintah Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Mataram | | memiliki kinerja yang cukup berhasil. Berdasarkan hasil perhitungan yang ada memberikan hasil cukup ekonomis, tidak efisien dan sangat efektif. | terdahulu adalah 2017- 2020 sedangkan pada penelitian ini tahun anggaran yang diteliti adalah 2018- 2022 | dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> |
| 6. | Putri Nurafifah, Haliah, dan Nirwana (2022) | Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Value for Money</i> (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabiere Tahun 2019- 2021 | Metode deskriptif kuantitatif | Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 rasio ekonomis pada Kabupaten Nabiere menunjukkan hasil tidak ekonomis, rasio efisiensi Kabupaten Niebere pada tahun 2019 menunjukkan hasil kurang efektif, dan rasio efektivitasnya pada tahun 2019- 2021 kurang dari 100% artinya tidak efisien. | <ul style="list-style-type: none"> • Tahun anggaran yang diteliti berbeda • Pemerintah daerah yang diteliti juga berbeda | <ul style="list-style-type: none"> • Keduanya menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | keuangan yaitu <i>value for money</i> |
| 7. | Sholikhah dan Khoiriawati (2022) | Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dengan Menggunakan Analisis <i>Value for Money</i> | Metode deskriptif kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo tahun 2017 sampai 2021 berada pada kategori ekonomis. Dari segi efisiensi, pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil efisien sedangkan pada tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien. Dari segi efektivitas, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan hasil efektif sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil cukup efektif | <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian terdahulu meneliti terkait kinerja keuanganan pemerintah desa • Tahun anggaran penelitian berbeda | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> |
| 8. | Poli, Saerang, dan Tangkuman (2020) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep <i>Value for Money</i> | Metode deskriptif kuantitatif | rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 sudah ekonomis, karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 90% | <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian terdahulu membahas mengenai kinerja keuangan pemerintah provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> |

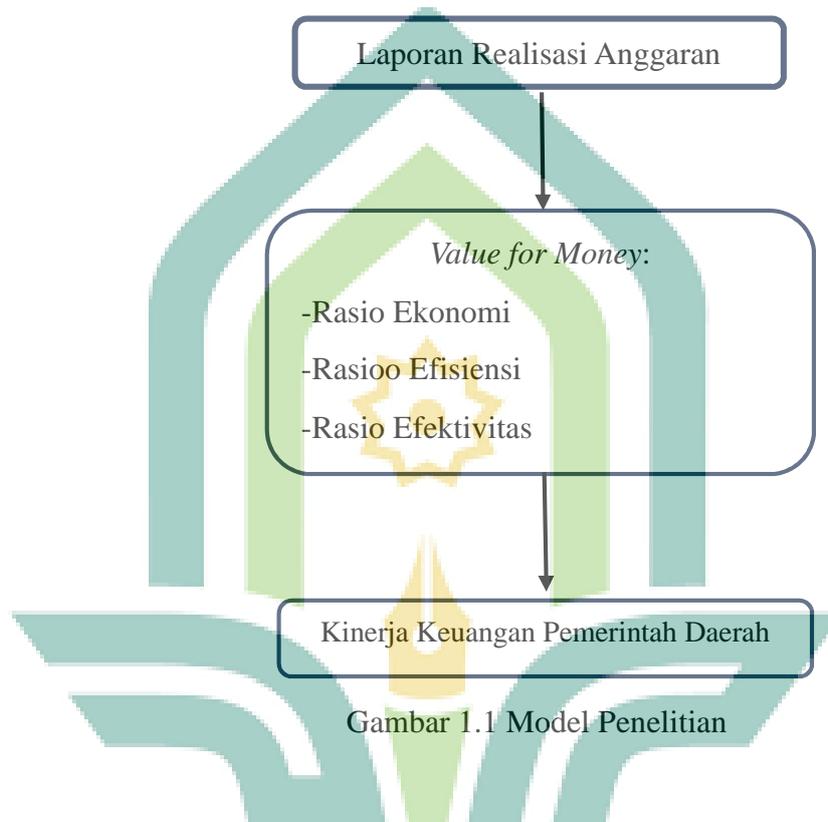
| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | sampai 99%. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan yang dikategorikan cukup efektif, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 85% sampai 99%. | <ul style="list-style-type: none"> • Tahun anggaran penelitian berbeda | |
| 9. | Fadillah, Hudzafidah, dan Haidiputri (2023) | Analisis Metode <i>Value For Money</i> dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo | Metode Deskriptif Kuantitatif | Hasil riset mamaparkan bahwa kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas belum masuk dalam kategori <i>value for money</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian terdahulu objek yang dibahas adalah kedinasan | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> • Tahun anggaran yang diteliti sama |
| 10. | Yulia Novita Sari (2022) | Analisis <i>Value for Money</i> Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Pekanbaru | Metode deskriptif kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah: 1) Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis, 2) Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu objek yang dibahas adalah kedinasan • Tahun anggaran dalam | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur kinerja keuangan yaitu <i>value for money</i> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------|--|
| | | | | <p>dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2018 dan 2019 sedangkan kinerja yang dikatakan efisien</p> <p>3) Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dikatakan efektif</p> | penelitian berbeda | |
|--|--|--|--|---|--------------------|--|



C. Kerangka Berpikir

Menurut (Ahyar, et al. 2020) kerangka berpikir merupakan suatu gambaran atau model yang berupa suatu konsep, didalamnya berisi penjelasan mengenai korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berikut ini merupakan kerangka yang menggambarkan model penelitian ini:



Gambar 1.1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang mana data dalam penelitian ini berupa angka- angka yang dapat dihitung yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2018- 2022 milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono 2016) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis suatu hasil penelitian, penggunaan metode ini diselaraskan dengan variabel penelitian yang memusatkan pada masalah yang terjadi dengan bentuk hasil penelitian berupa angka yang memiliki makna.

C. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rentan anggaran dari tahun 2018- 2022.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumentasi, yaitu jumlah hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dalam kurun waktu 5 tahun sehingga total populasi 175 populasi.

Tabel 3.1
Daftar populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

| Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah | | | |
|--|-------------------|----|------------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 19 | Kab. Pemasang |
| 2 | Kab. Banyumas | 20 | Kab. Purbalingga |
| 3 | Kab. Batang | 21 | Kab. Purworejo |
| 4 | Kab. Blora | 22 | Kab. Rembang |
| 5 | Kab. Boyolali | 23 | Kab. Semarang |
| 6 | Kab. Brebes | 24 | Kab. Sragen |
| 7 | Kab. Cilacap | 25 | Kab. Sukoharjo |
| 8 | Kab. Demak | 26 | Kab. Tegal |
| 9 | Kab. Grobogan | 27 | Kab. Temanggung |
| 10 | Kab. Jepara | 28 | Kab. Wonogiri |
| 11 | Kab. Karanganyar | 29 | Kab. Wonosobo |
| 12 | Kab. Kebumen | 30 | Kota Magelang |
| 13 | Kab. Kendal | 31 | Kota Pekalongan |
| 14 | Kab. Klaten | 32 | Kota Salatiga |
| 15 | Kab. Kudus | 33 | Kota Semarang |
| 16 | Kab. Magelang | 34 | Kota Surakarta |
| 17 | Kab. Pati | 35 | Kota Tegal |
| 18 | Kab. Pekalongan | | |

Setiap populasi diambil sebagai sampel dalam penelitian ini sehingga menggunakan metode sensus atau sampel jenuh, sehingga diperoleh total sampel sebanyak 175 sampel. Data sekunder yang digunakan dalam berupa laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 yang bersumber dari laman <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi pengambilan data diperoleh melalui dokumen- dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu dilakukan dengan mengumpulkan kemudian mengkalsifikasikan data yang ada dan kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga kemudian memberikan gambaran terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus yang ada dalam prinsip *value for money*, yaitu rasio ekonomis, rasio efektivitas serta rasio efisiensi dan selanjutnya dapat diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data ini penulis melakukan pengumpulan data yang berasal dari website resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> data yang dikumpulkan merupakan laporan realisasi anggaran dan belanja daerah pemerintah daerah provinsi jawa tengah pada tahun anggaran 2018- 2022.

2. Analisis terhadap data

Pada tahap ini penulis melakukan perhitungan data menggunakan rumus yang sesuai dengan prinsip *value for money* yaitu menggunakan rumus-rumus dari rasio ekonomis, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

3. Mendeskripsikan hasil perhitungan data

Tahap selanjutnya yaitu menjelaskan serta menjabarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap rasio dengan didasarkan pada kriteria masing- masing rasio.

4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan

Pada tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Definisi Variabel

Variabel merupakan nilai atau atribut dari objek, kegiatan atau orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016). Setiap variabel didefinisikan agar memiliki kejelasan sehingga tidak timbul adanya kesalahan dalam penafsiran.

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel disesuaikan dengan judul penelitian yaitu:

1. *Value for money*

Value for Money merupakan suatu kosep penilaian kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (M. Iqbal Ashari 2020).

2. Rasio ekonomis

Rasio ekonomis diartikan sebagai rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis suatu organisasi atau

instansi pemerintah dalam penggunaan sumber daya. Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut.

$$R \quad E = \frac{R}{A} \frac{B}{B} \frac{D}{D} \frac{h}{h} \times 100\%$$

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan yaitu:

Tabel 3.2
Kriteria rasio Ekonomis

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|--------------------|
| Lebih dari 100% | Tidak Ekonomis |
| 100% | Ekonomis Berimbang |
| Kurang dari 100% | Ekonomis |

Sumber: Mahbengi (2017)

3. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam mempergunakan sumber daya. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi:

$$R \quad E = \frac{R}{R} \frac{B}{P} \frac{D}{D} \frac{h}{h} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria penilaian dari rasio efisiensi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kriteria Rasio Efisiensi

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| Lebih dari 100% | Tidak Efisien |
| 90%- 100% | Kurang Efisien |
| 80%-90% | Cukup Efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisien |

Sumber: Komada (2021)

4. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target kebijakan. Rumus pengukuran rasio efektivitas adalah sebagai berikut.

$$R = \frac{E}{A} = \frac{R}{A} \times \frac{P}{P} = \frac{R}{A} \times \frac{D}{D} \times \frac{h}{h} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria dari rasio efektivitas yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.4
Kriteria rasio Efektivitas

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| Lebih dari 100% | Sangat Efektif |
| 90%- 100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup Efektif |

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Komada (2021)



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan ibu Kota Semarang. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ bujur timur. Sedangkan secara geografis letak provinsi Jawa Tengah di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 wilayah administratif dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.892,28 ribu jiwa yang didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 19.037,74 ribu jiwa dan jumlah penduduk Perempuan berjumlah 18.854,54 ribu jiwa sedangkan distribusi jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes yang berjumlah 2.065,50 ribu jiwa atau dengan jumlah presentase sebesar (5,39%) dan Penduduk yang paling sedikit berada di Kota Magelang yang presentasinya menunjukkan sebesar (0,34%) dengan jumlah penduduk 122,43 ribu jiwa. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah mencapai 3,25 juta hektar atau 25,04% dari luas wilayah Pulau Jawa. Luas wilayah ini terdiri dari 922 ribu hektar (30,47%) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53%) bukan

lahan sawah. Sebagai Upaya dalam menunjang berbagai kegiatan ekonomi dan juga investasi Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai fasilitas penunjang kegiatan tersebut diantaranya tersedianya berbagai jenis transportasi, akses jalan dan Kawasan industry untuk meningkatkan perekonomian

B. Objek Penelitian

Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Dimana seluruh populasi tersebut dijadikan sampel penelitian. Adapun Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

| Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah | | | |
|--|-------------------|----|------------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 19 | Kab. Pemasang |
| 2 | Kab. Banyumas | 20 | Kab. Purbalingga |
| 3 | Kab. Batang | 21 | Kab. Purworejo |
| 4 | Kab. Blora | 22 | Kab. Rembang |
| 5 | Kab. Boyolali | 23 | Kab. Semarang |
| 6 | Kab. Brebes | 24 | Kab. Sragen |
| 7 | Kab. Cilacap | 25 | Kab. Sukoharjo |
| 8 | Kab. Demak | 26 | Kab. Tegal |
| 9 | Kab. Grobogan | 27 | Kab. Temanggung |
| 10 | Kab. Jepara | 28 | Kab. Wonogiri |

| Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah | | | |
|--|------------------|----|-----------------|
| 11 | Kab. Karanganyar | 29 | Kab. Wonosobo |
| 12 | Kab. Kebumen | 30 | Kota Magelang |
| 13 | Kab. Kendal | 31 | Kota Pekalongan |
| 14 | Kab. Klaten | 32 | Kota Salatiga |
| 15 | Kab. Kudus | 33 | Kota Semarang |
| 16 | Kab. Magelang | 34 | Kota Surakarta |
| 17 | Kab. Pati | 35 | Kota Tegal |
| 18 | Kab. Pekalongan | | |

**C. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2022**

Tabel 4.2

Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.005.944. 976.500 | 2.074.653. 161.695 | 2.077.621. 418.000 | 2.119.096. 683.202 |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.257.004. 283.785 | 3.265.926. 651.861 | 3.472.253. 363.785 | 3.319.060. 759.043 |
| 3 | Kab. Batang | 1.654.999. 295.702 | 1.701.877. 299.154 | 1.705.149. 533.749 | 1.687.215. 725.890 |
| 4 | Kab. Blora | 2.122.662. 345.677 | 2.120.671. 434.967 | 2.158.819. 507.692 | 2.116.475. 561.459 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.190.553. 226.000 | 2.227.780. 710.062 | 2.242.814. 340.000 | 2.203.112. 762.252 |
| 6 | Kab. Brebes | 2.814.882. 461.000 | 2.854.043. 939.110 | 2.833.645. 748.000 | 2.825.364. 002.156 |
| 7 | Kab. Cilacap | 2.948.915. 191.000 | 3.072.112. 464.787 | 3.084.579. 637.400 | 2.985.422. 839.102 |
| 8 | Kab. Demak | 1.958.433. 585.400 | 2.143.306. 258.595 | 2.014.063. 460.400 | 2.050.065. 954.050 |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.397.669. 340.501 | 2.439.501. 262.356 | 2.383.805. 230.083 | 2.345.537. 047.244 |
| 10 | Kab. Jepara | 2.120.764. 886.000 | 2.255.843. 022.157 | 2.358.409. 053.000 | 2.300.574. 121.504 |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.053.585. 660.000 | 2.113.929. 231.663 | 2.150.630. 160.000 | 2.064.581. 557.575 |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.647.019. 919.000 | 2.639.814. 864.398 | 2.812.902. 414.000 | 2.652.047. 980.376 |
| 13 | Kab. Kendal | 2.077.470. 339.700 | 2.138.564. 387.700 | 2.184.770. 769.700 | 2.148.450. 040.419 |
| 14 | Kab. Klaten | 2.512.253. 142.500 | 2.577.961. 130.135 | 2.656.503. 142.500 | 2.611.007. 499.826 |
| 15 | Kab. Kudus | 1.740.415. 531.000 | 1.996.530. 094.357 | 1.803.484. 250.000 | 1.957.701. 652.495 |
| 16 | Kab. Magelang | 2.355.843. 093.000 | 2.302.190. 543.616 | 2.662.575. 016.000 | 2.486.540. 561.169 |
| 17 | Kab. Pati | 2.540.695. 960.000 | 2.789.055. 859.854 | 2.647.132. 050.000 | 2.781.234. 687.644 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.136.445. 642.800 | 2.101.449. 302.497 | 2.230.242. 642.800 | 2.160.744. 430.323 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.187.037. 545.000 | 2.428.263. 885.703 | 2.262.937. 665.000 | 2.324.288. 798.012 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.959.697. 520.000 | 1.948.442. 029.100 | 1.992.797. 269.000 | 1.924.908. 432.550 |
| 21 | Kab. Purworejo | 1.716.967. 116.415 | 2.049.784. 186.054 | 1.875.058. 304.015 | 2.125.880. 839.764 |
| 22 | Kab. Rembang | 1.760.297. 103.655 | 1.785.911. 075.230 | 1.861.907. 718.384 | 1.814.662. 262.214 |
| 23 | Kab. Semarang | 2.079.502. 418.000 | 2.117.416. 566.804 | 2.132.848. 624.000 | 2.171.799. 810.994 |
| 24 | Kab. Sragen | 1.958.299. 648.000 | 2.176.997. 511.640 | 2.170.257. 833.699 | 2.236.802. 757.132 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 1.887.374. 030.000 | 2.055.517. 964.074 | 2.126.525. 216.000 | 2.050.161. 904.519 |
| 26 | Kab. Tegal | 2.615.959. 568.000 | 2.524.365. 919.815 | 2.789.114. 512.000 | 2.575.620. 503.042 |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.699.841. 115.051 | 1.731.235. 867.161 | 1.723.357. 367.620 | 1.670.309. 285.608 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.192.011. 071.842 | 2.298.176. 600.990 | 2.279.376. 071.842 | 2.246.861. 248.844 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.722.563. 823.500 | 1.851.441. 024.405 | 1.891.614. 169.500 | 1.856.165. 286.054 |
| 30 | Kota Magelang | 882.759.3 01.000 | 908.089.4 85.909 | 969.216.88 1.000 | 937.345.7 46.470 |
| 31 | Kota Pekalongan | 927.157.1 25.000 | 905.231.5 72.568 | 959.757.12 5.000 | 883.184.8 94.707 |
| 32 | Kota Salatiga | 887.972.5 20.000 | 889.992.4 11.250 | 923.362.43 2.000 | 923.538.2 38.485 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 33 | Kota Semarang | 4.301.858. 632.218 | 4.234.394. 060.362 | 5.170.158. 970.218 | 4.506.407. 629.744 |
| 34 | Kota Surakarta | 1.795.725. 874.000 | 1.879.056. 016.679 | 1.905.769. 955.034 | 1.914.818. 394.396 |
| 35 | Kota Tegal | 989.073.0 97.000 | 987.244.2 36.619 | 1.089.919. 641.000 | 916.730.7 88.800 |

Berdasarkan tabel diatas, dari total anggaran dan realisasi tahun anggaran 2018 milik Provinsi Jawa Tengah presentase realisasi pendapatannya adalah 101 % dengan selisih lebih sebesar 288.658.322.582. Pada tahun tersebut Kabupaten tegal menjadi daerah dengan angka realisasi pendapatan terendah dengan presentase realisasi sebesar 96% sedangkan realisasi belanjanya yang terendah berada di Kota Tegal dengan presentase realisasi sebesar 84%.

Tabel 4.3

Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Kab. Banjarnegar a | 2.083.397.0 46.500 | 2.105.990.2 72.337 | 2.128.689.82 4.500 | 2.123.033.79 7.431 |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.427.963.7 27.000 | 3.434.925.9 95.303 | 3.621.363.72 7.000 | 3.457.550.20 1.497 |
| 3 | Kab. Batang | 1.770.598.6 76.856 | 1.769.958.2 02.416 | 1.821.466.35 8.456 | 1.755.066.56 0.019 |
| 4 | Kab. Blora | 2.177.713.8 93.677 | 2.240.970.0 20.181 | 2.215.590.59 3.677 | 2.201.539.93 5.903 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.310.937.2 50.000 | 2.357.487.2 10.573 | 2.371.992.36 4.000 | 2.381.601.86 4.739 |
| 6 | Kab. Brebes | 3.058.498.1 19.000 | 3.096.826.8 45.150 | 3.256.315.61 8.000 | 3.132.251.74 0.580 |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.182.182.7 05.300 | 3.282.797.9 66.311 | 3.352.054.95 9.317 | 3.283.321.13 7.886 |
| 8 | Kab. Demak | 2.184.187.6 81.000 | 2.362.016.2 48.793 | 2.347.587.51 4.000 | 2.309.815.55 0.608 |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.544.684.2 10.275 | 2.581.437.5 43.584 | 2.514.428.15 8.592 | 2.551.226.71 0.394 |
| 10 | Kab. Jepara | 2.312.890.2 99.000 | 2.413.822.9 93.348 | 2.331.891.41 9.000 | 2.337.605.98 6.009 |
| 11 | Kab. Karanganya r | 2.123.842.4 77.000 | 2.179.409.7 06.710 | 2.313.588.17 8.000 | 2.262.015.96 9.098 |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.805.865.4 91.000 | 2.818.494.9 83.541 | 2.960.999.39 3.000 | 2.809.549.44 4.627 |
| 13 | Kab. Kendal | 2.336.980.5 10.799 | 2.228.384.3 99.855 | 2.445.490.27 8.577 | 2.331.683.03 4.136 |
| 14 | Kab. Klaten | 2.632.374.2 81.500 | 2.689.353.2 52.985 | 2.768.108.34 5.300 | 2.682.356.73 3.814 |
| 15 | Kab. Kudus | 1.714.031.1 99.000 | 2.090.430.3 64.413 | 1.814.797.41 4.000 | 2.061.664.15 6.540 |
| 16 | Kab. Magelang | 2.609.827.5 55.270 | 2.575.439.8 25.755 | 2.671.021.11 5.200 | 2.568.593.60 3.007 |
| 17 | Kab. Pati | 2.730.979.1 88.000 | 2.838.881.3 96.181 | 2.825.572.58 3.000 | 2.870.260.40 3.230 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.298.856.1 36.800 | 2.182.770.9 52.456 | 2.417.318.27 8.800 | 2.183.534.79 0.005 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.530.353.8 99.000 | 2.636.036.8 43.851 | 2.629.612.48 4.000 | 2.584.470.86 9.519 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.057.234.7 47.000 | 2.076.658.1 14.142 | 2.101.281.89 0.000 | 2.062.727.85 0.424 |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.174.502.7 17.050 | 2.172.436.9 25.114 | 2.215.437.47 3.275 | 2.186.289.22 6.260 |
| 22 | Kab. Rembang | 1.785.139.5 06.071 | 1.821.899.8 84.311 | 1.827.508.35 0.914 | 1.863.502.82 8.110 |
| 23 | Kab. Semarang | 2.212.881.8 04.000 | 2.311.149.3 43.922 | 2.277.672.42 8.000 | 2.312.242.11 7.310 |
| 24 | Kab. Sragen | 2.141.194.8 57.000 | 2.300.826.0 69.513 | 2.146.652.89 5.644 | 2.092.140.28 3.903 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 1.969.651.8 46.000 | 2.143.687.5 69.516 | 2.242.836.99 7.000 | 2.114.149.36 1.513 |
| 26 | Kab. Tegal | 2.793.763.4 83.000 | 2.755.677.4 84.152 | 2.866.763.48 3.000 | 2.717.431.59 8.854 |
| 27 | Kab. Temanggun g | 1.842.970.4 86.344 | 1.878.383.8 23.682 | 1.910.778.25 5.471 | 1.841.033.63 5.270 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.328.723.4 95.900 | 2.442.677.9 72.827 | 2.423.345.89 5.900 | 2.455.975.31 9.573 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.887.241.2 66.214 | 1.958.595.0 25.572 | 2.028.208.62 1.480 | 2.024.794.95 7.930 |
| 30 | Kota Magelang | 911.966.58 1.000 | 967.785.834 .243 | 1.031.966.58 1.000 | 995.162.119. 612 |
| 31 | Kota Pekalongan | 988.456.22 8.000 | 971.624.464 .121 | 1.026.156.22 8.000 | 954.397.012. 827 |
| 32 | Kota Salatiga | 913.296.91 4.000 | 928.019.899 .150 | 949.291.338. 000 | 942.687.426. 593 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 33 | Kota Semarang | 4.749.249.0 80.000 | 4.565.340.8 27.417 | 5.134.427.77 4.000 | 4.633.934.34 0.973 |
| 34 | Kota Surakarta | 1.928.886.7 28.000 | 1.945.953.2 41.924 | 2.001.997.78 4.000 | 2.012.408.11 2.863 |
| 35 | Kota Tegal | 1.043.670.0 57.000 | 1.036.963.7 63.529 | 1.120.465.80 3.000 | 1.046.575.21 2.898 |

Kemudian di tahun 2019 jumlah pendapatan yang tereadlisasi mengalami penurunan 1% sehingga presentase realisasinya menjadi 100%. Pada tahun ini pendapatan Provinsi Jawa Tengah tidak terealisasi sebesar 105.801.184.064. Di tahun 2019 ini Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kendal menjadi kabupaten dengan presentase pendapatan terendah yaitu sebesar 95% dan dari segi belanjanya kabupaten pekalongan dan kota semarang memiliki presentase terendah dalam merealisasikan belanjanya.

Tabel 4.4

Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

| No. | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.168.786. 068.000 | 1.994.604.1 06.561,00 | 2.247.978.4 04.000 | 2.030.532.39 7.495,00 |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.568.568. 763.744 | 3.330.186.7 88.242,00 | 3.743.918.7 63.744 | 3.249.141.93 5.364,00 |
| 3 | Kab. Batang | 1.840.617. 425.977 | 1.733.087.8 93.276,46 | 1.890.617.4 25.977 | 1.662.512.93 2.221,19 |
| 4 | Kab. Blora | 2.169.237. 769.900 | 2.127.946.9 61.535,00 | 2.216.323.7 69.900 | 2.109.122.88 7.754,00 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.388.366. 025.000 | 2.382.403.2 20.150,00 | 2.466.443.4 23.000 | 2.339.805.51 7.025,00 |
| 6 | Kab. Brebes | 3.129.412. 939.000 | 3.008.370.7 17.507,14 | 3.270.994.1 79.000 | 2.955.050.37 3.005,00 |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.360.359. 382.281 | 3.152.402.4 55.712,48 | 3.552.204.6 75.002 | 3.088.834.82 0.260,00 |
| 8 | Kab. Demak | 2.302.405. 766.000 | 2.333.738.9 96.798,95 | 2.384.405.7 66.000 | 2.285.742.09 6.591,00 |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.612.712. 160.808 | 2.528.884.1 31.946,00 | 2.615.085.5 22.983 | 2.511.268.62 5.929,00 |
| 10 | Kab. Jepara | 2.418.244. 390.000 | 2.315.260.3 99.485,00 | 2.541.691.0 90.000 | 2.268.045.72 5.410,00 |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.225.308. 095.000 | 2.121.386.1 79.225,00 | 2.287.236.7 45.000 | 2.092.032.55 2.152,00 |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.878.556. 768.000 | 2.763.229.3 07.229,80 | 3.033.756.7 68.000 | 2.737.861.91 6.080,00 |
| 13 | Kab. Kendal | 2.337.475. 682.657 | 2.131.449.7 84.048,00 | 2.448.834.5 13.867 | 2.041.114.76 6.533,00 |
| 14 | Kab. Klaten | 2.721.807. 486.100 | 2.578.135.8 36.354,00 | 2.906.327.2 98.100 | 2.545.164.49 4.577,00 |
| 15 | Kab. Kudus | 1.810.667. 069.000 | 2.016.176.9 86.239,00 | 1.911.471.4 64.000 | 1.914.626.25 7.581,00 |
| 16 | Kab. Magelang | 2.621.169. 424.000 | 2.380.457.6 80.604,00 | 2.713.496.6 77.600 | 2.304.375.91 7.161,00 |
| 17 | Kab. Pati | 2.786.249. 672.000 | 2.662.375.4 37.006,00 | 2.900.220.6 72.000 | 2.739.724.37 2.740,00 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.318.988. 832.870 | 2.061.798.4 74.096,15 | 2.446.656.1 42.301 | 2.053.017.71 1.594,00 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.581.626. 461.000 | 2.449.008.5 77.285,00 | 2.828.842.8 85.000 | 2.664.990.53 0.908,00 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.042.708. 319.000 | 1.952.749.3 01.274,00 | 2.095.813.3 19.000 | 1.894.875.52 9.380,00 |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.297.741. 136.901 | 2.166.947.7 47.648,00 | 2.483.287.9 20.212 | 2.126.674.17 8.307,00 |
| 22 | Kab. Rembang | 1.891.753. 253.706 | 1.878.325.9 19.915,50 | 1.964.433.8 29.762 | 1.830.776.50 4.959,20 |
| 23 | Kab. Semarang | 2.362.080. 875.000 | 2.211.273.5 24.265,97 | 2.454.223.1 81.000 | 2.191.412.62 1.750,00 |
| 24 | Kab. Sragen | 2.194.236. 966.584 | 2.212.824.9 74.529,00 | 2.312.886.8 93.345 | 2.130.438.47 6.217,00 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.039.440. 679.000 | 2.040.394.7 61.328,00 | 2.392.529.9 62.000 | 2.073.080.96 6.909,00 |
| 26 | Kab. Tegal | 2.875.037. 755.000 | 2.651.771.8 38.697,60 | 2.891.805.2 53.000 | 2.505.539.94 9.419,52 |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.921.489. 274.847 | 1.830.848.4 53.347,00 | 1.981.489.2 74.847 | 1.783.204.94 9.098,00 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.351.727. 836.675 | 2.273.678.5 38.635,00 | 2.474.910.2 61.874 | 2.262.812.45 2.301,00 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.935.748. 155.714 | 1.878.995.6 66.418,00 | 2.055.345.6 35.370 | 1.881.315.42 8.762,00 |
| 30 | Kota Magelang | 920.107.3 54.000 | 946.188.761 .537,00 | 995.607.354 .000 | 798.353.191. 714,00 |
| 31 | Kota Pekalongan | 981.361.4 82.000 | 953.155.394 .614,95 | 1.055.857.4 82.000 | 944.840.460. 675,56 |
| 32 | Kota Salatiga | 967.665.2 51.000 | 890.223.683 .933,00 | 1.006.404.9 06.000 | 944.954.212. 904,00 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|-----|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 33 | Kota Semarang | 5.093.441.461.000 | 4.400.500.838.480,00 | 5.256.092.789.000 | 4.128.912.545.760,00 |
| 34 | Kota Surakarta | 2.019.861.148.959 | 1.831.319.373.387,00 | 2.109.290.676.959 | 1.639.665.226.421,00 |
| 35 | Kota Tegal | 1.132.970.758.000 | 1.017.915.109.373,00 | 1.278.393.100.000 | 1.048.606.495.383,00 |

Di tahun 2020 angka realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah turun sebesar 10% sehingga angka presentase realisasi pendapatannya menjadi 90%. Anggaran sebesar 28.301.075.368.000 tidak dapat terealisasi sebesar 2.907.339.433.852 sehingga angka realisasinya menjadi 25.393.735.934.148. Pada tahun ini rata-rata realisasi kabupaten/ kota di Povinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebagai dampak adanya pandemi Covid- 19. Kota Semarang menjadi kota dengan presentase realisasi pendapatan terendah dengan angka presentase sebesar 86% kemudian presentase belanja terendah berada di Kota Magelang dengan presentasenya sebesar 80%.

Tabel 4.5

Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.109.230.397.160,00 | 2.086.059.742.250 | 3.891.819.949.635,00 | 2.042.019.297.374 |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.568.385.311.183,00 | 3.487.722.900.410 | 3.891.819.949.635,00 | 3.430.884.286.153 |
| 3 | Kab. Batang | 1.786.031.075.369,00 | 1.821.822.580.995 | 1.871.771.478.081,00 | 1.780.425.131.876 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 4 | Kab. Blora | 2.134.712.0 00.000,00 | 2.227.065. 270.461 | 2.198.118.86 7.915,00 | 2.113.773.06 5.809 |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.263.727.5 02.000,00 | 2.430.235. 208.978 | 2.282.488.61 6.000,00 | 2.268.508.82 7.348 |
| 6 | Kab. Brebes | 3.097.307.6 32.000,00 | 3.162.140. 424.372 | 3.220.782.21 5.000,00 | 3.126.226.47 0.519 |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.317.757.6 31.415,00 | 3.334.300. 290.656 | 3.646.761.86 3.600,00 | 3.329.814.71 6.680 |
| 8 | Kab. Demak | 2.320.606.2 98.834,00 | 2.365.244. 759.686 | 2.386.606.23 0.534,00 | 2.336.015.72 5.797 |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.544.323.9 03.138,00 | 2.634.888. 673.901 | 2.497.512.96 9.115,00 | 2.428.631.67 3.540 |
| 10 | Kab. Jepara | 1.999.702.0 11.000,00 | 2.380.695. 935.358 | 2.135.511.00 5.000,00 | 2.309.409.46 4.300 |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.106.391.2 99.000,00 | 2.165.983. 748.572 | 2.135.811.98 7.000,00 | 2.138.939.58 5.089 |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.752.338.0 08.000,00 | 2.832.035. 015.733 | 2.818.415.16 6.000,00 | 2.779.840.69 8.100 |
| 13 | Kab. Kendal | 2.278.236.5 19.171,00 | 2.300.543. 641.945 | 2.312.194.06 7.943,00 | 2.069.958.00 6.821 |
| 14 | Kab. Klaten | 2.520.987.8 84.551,00 | 2.570.037. 777.373 | 2.710.853.25 9.894,00 | 2.493.406.88 1.542 |
| 15 | Kab. Kudus | 1.694.083.9 99.000,00 | 2.163.634. 437.714 | 1.848.490.32 9.807,00 | 1.879.122.99 0.401 |
| 16 | Kab. Magelang | 2.461.908.4 66.781,00 | 2.469.754. 315.099 | 2.526.347.85 8.335,00 | 2.413.163.78 8.892 |
| 17 | Kab. Pati | 2.736.238.6 07.000,00 | 2.725.202. 350.660 | 2.842.495.52 7.000,00 | 2.623.732.65 4.045 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.240.324.8 77.404,00 | 2.078.543. 512.922 | 2.256.232.06 2.404,00 | 2.075.043.16 0.188 |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.548.177.0 15.000,00 | 2.605.029. 836.438 | 2.836.829.73 5.000,00 | 2.524.558.78 5.164 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.975.765.7 02.000,00 | 2.054.843. 644.547 | 2.016.926.61 3.000,00 | 1.999.904.82 9.992 |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.227.598.2 50.685,00 | 2.290.242. 967.778 | 2.240.552.29 3.168,00 | 2.135.478.21 3.580 |
| 22 | Kab. Rembang | 1.766.048.4 67.000,00 | 1.911.328. 505.019 | 1.830.578.43 8.500,00 | 1.836.443.01 1.929 |
| 23 | Kab. Semarang | 1.996.141.6 92.000,00 | 2.417.282. 770.158 | 2.090.545.81 6.000,00 | 2.198.880.66 2.286 |
| 24 | Kab. Sragen | 2.104.054.3 55.242,00 | 2.336.721. 727.716 | 2.265.495.15 2.935,00 | 2.160.877.77 5.669 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 1.954.129.1 47.000,00 | 2.119.633. 370.538 | 2.247.461.47 4.000,00 | 2.089.455.55 8.854 |
| 26 | Kab. Tegal | 2.771.456.7 23.000,00 | 2.862.559. 366.052 | 2.894.606.72 3.000,00 | 2.776.664.04 2.487 |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.890.486.2 77.894,00 | 1.971.005. 990.029 | 1.949.350.91 7.532,00 | 1.877.969.16 7.294 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.303.664.8 58.286,00 | 2.303.564. 898.937 | 2.402.581.25 3.034,00 | 2.297.510.69 4.153 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.898.206.4 73.829,00 | 1.967.781. 049.592 | 1.967.746.23 0.449,00 | 1.860.097.99 0.936 |
| 30 | Kota Magelang | 907.280.962 .000,00 | 994.366.9 87.776 | 980.191.941. 000,00 | 935.047.734. 177 |
| 31 | Kota Pekalongan | 937.933.186 .000,00 | 966.372.5 57.051 | 983.948.191. 000,00 | 962.091.792. 004 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 32 | Kota Salatiga | 928.511.971 .000,00 | 946.191.0 87.524 | 978.129.530. 000,00 | 956.501.304. 732 |
| 33 | Kota Semarang | 4.760.117.1 65.040,00 | 4.822.887. 281.737 | 4.854.391.16 9.040,00 | 4.764.045.94 6.157 |
| 34 | Kota Surakarta | 1.938.004.4 41.798,00 | 1.939.268. 856.769 | 1.974.612.83 5.274,00 | 1.866.496.34 8.304 |
| 35 | Kota Tegal | 1.110.518.1 97.000,00 | 1.030.986. 510.449 | 1.257.032.71 9.040,00 | 1.089.705.69 7.276 |

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 angka realisasi pendapatan milik provinsi jawa Tengah belum dapat terealisasi sebesar 207.833.257.037 dari total anggaran sebesar 26.840.833.343.000. namun presentase realisasinya meningkat 9 % dari tahun sebelumnya 90% menjadi 9 %. Di tahun 2021 Kabupaten Pekalongan kembali menjadi kabupaten dengan realisasi pendapatan terendah dengan angka presentase sebesar 93%. Dan Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten dengan angka realisasi belanja terendah dengan presentase sebesar 52%.

Tabel 4.6

Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.104.392.0 63.000 | 2.044.546.4 03.305 | 2.187.091. 604.000 | 2.039.210.93 0.404 |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.567.598.3 07.620 | 6.408.181.66 | 3.609.761. 269.620 | 3.600.847.36 7.173 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 3 | Kab. Batang | 1.769.326.9 79.259 | 1.750.957.0 35.202 | 1.829.304. 856.259 | 1.801.913.43 6.483 |
| 4 | Kab. Blora | 2.089.649.6 57.000 | 2.176.850.3 05.646 | 2.299.649. 657.000 | 2.396.215.62 1.703 |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.272.481.4 38.000 | 2.372.372.5 51.015 | 2.283.011. 438.000 | 2.471.827.42 9.489 |
| 6 | Kab. Brebes | 3.014.349.8 29.000 | 2.989.821.9 90.874 | 3.193.442. 500.600 | 3.091.285.55 9.556 |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.330.360.6 21.060 | 3.293.132.1 39.343 | 3.503.687. 435.633 | 3.402.035.62 0.730 |
| 8 | Kab. Demak | 2.345.448.1 16.898 | 2.402.717.8 69.624 | 2.449.631. 876.898 | 2.487.342.62 7.299 |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.520.351.8 60.000 | 2.588.637.7 77.477 | 2.652.101. 860.000 | 2.687.129.83 2.388 |
| 10 | Kab. Jepara | 2.414.976.2 67.000 | 2.326.937.0 14.364 | 2.580.801. 637.020 | 2.429.312.21 8.030 |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.109.035.0 40.500 | 2.251.540.1 54.854 | 2.126.535. 040.500 | 2.203.430.15 1.176 |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.746.032.9 17.000 | 2.847.196.0 17.404 | 2.843.725. 872.000 | 2.824.358.29 3.725 |
| 13 | Kab. Kendal | 2.440.165.8 13.709 | 2.265.353.9 24.690 | 2.507.706. 131.219 | 2.499.014.01 9.249 |
| 14 | Kab. Klaten | 2.502.398.6 13.635 | 2.587.693.4 32.935 | 2.700.855. 921.596 | 2.527.619.33 2.474 |
| 15 | Kab. Kudus | 1.966.922.9 58.000 | 2.078.759.8 01.863 | 2.138.777. 595.583 | 2.231.500.77 3.692 |
| 16 | Kab. Magelang | 2.552.382.0 81.413 | 2.558.024.1 77.090 | 2.692.997. 581.732 | 2.570.326.00 1.677 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 17 | Kab. Pati | 2.690.543.0 64.000 | 2.705.053.7 57.861 | 2.781.043. 064.000 | 2.717.685.02 6.789 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.215.434.9 54.546 | 2.074.624.0 15.397 | 2.219.934. 954.546 | 2.123.953.84 6.361 |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.429.931.6 63.000 | 2.493.418.1 91.423 | 2.469.130. 208.000 | 2.504.262.13 9.265 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.020.295.4 78.000 | 2.022.884.6 29.933 | 2.077.807. 978.000 | 2.122.762.52 7.980 |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.324.885.3 07.142 | 2.185.997.9 80.027 | 2.480.523. 553.127 | 2.347.131.16 5.050 |
| 22 | Kab. Rembang | 1.874.516.2 80.000 | 1.841.484.1 39.353 | 2.203.102. 306.051 | 1.991.790.01 8.143 |
| 23 | Kab. Semarang | 2.443.240.9 82.000 | 2.337.453.4 99.457 | 2.562.935. 511.000 | 2.536.331.34 4.170 |
| 24 | Kab. Sragen | 2.152.620.8 96.665 | 2.177.840.0 72.042 | 2.382.049. 216.160 | 2.306.325.55 5.226 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 1.893.440.9 60.000 | 2.014.818.2 62.391 | 2.122.441. 234.012 | 2.042.027.81 4.977 |
| 26 | Kab. Tegal | 2.690.855.0 33.000 | 2.743.700.5 25.564 | 2.869.008. 063.000 | 2.722.064.91 7.511 |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.885.886.8 01.040 | 1.895.483.9 14.078 | 1.989.495. 211.214 | 1.958.748.40 9.806 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.198.134.3 32.793 | 2.262.263.8 91.811 | 2.293.573. 309.945 | 2.243.214.08 4.512 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.934.230.5 18.694 | 1.921.189.0 93.169 | 1.996.761. 244.159 | 2.011.113.25 0.458 |
| 30 | Kota Magelang | 819.257.701 .625 | 985.763.798 .066 | 897.124.30 9.929 | 1.039.501.50 2.733 |

| No | Kabupaten/ Kota | Pendapatan | | Belanja | |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| 31 | Kota Pekalongan | 956.875.257 .000 | 989.013.074 .926 | 998.875.25 7.000 | 1.031.090.18 8.444 |
| 32 | Kota Salatiga | 879.372.434 .000 | 918.353.779 .916 | 918.603.52 8.410 | 932.071.471. 274 |
| 33 | Kota Semarang | 5.337.927.4 20.000 | 4.969.436.5 43.013 | 5.544.227. 029.000 | 4.871.946.69 7.040 |
| 34 | Kota Surakarta | 2.135.619.9 61.790 | 2.028.438.6 91.046 | 2.239.295. 961.790 | 2.088.323.39 5.600 |
| 35 | Kota Tegal | 1.085.069.1 19.000 | 1.042.635.8 45.201 | 1.164.677. 631.206 | 1.127.738.11 2.539 |

Berdasarkan 4.6 di atas menunjukkan bahwa presentase angka realisasi di Provinsi Jawa Tengah sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 99%. Angka anggaran pendapatan di tahun 2022 sebesar 24.303.739.912.000 dan terealisasi sebesar 24.167.935.634.127 yang artinya tidak terealisasi sebesar 135.804.277.873. Sedangkan jika dilihat per kabupaten/ kota angka realisasi pada tahun 2022 Kabupaten Kendal dan Kota Semarang menjadi kabupaten dan kota dengan presentase realisasi pendapatan terendah sebesar 93%. Dan pada tahun yang sama Kota Semarang juga menjadi kota dengan presentase belanja terendah yaitu sebesar 88%.

D. Hasil Perhitungan Data dengan Menggunakan Konsep *Value for Money* Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022

Terdapat 3 elemen dalam perhitungan *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

1. Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis merupakan realisasi belanja yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan daerah dengan anggaran belanja- belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan daerah. Menurut Mardiasmo (2002), cara mengukur Tingkat ekonomis adalah:

$$R E = \frac{R}{A} \times \frac{B e}{B} \times \frac{D}{D} \times \frac{h}{h} \times 100\%$$

Berikut merupakan perhitungan elemen ekonomis pada setiap kabupaten dan kota provinsi jawa Tengah pada tahun 2018

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

| No. | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.119.096.6 83.202 | 2.077.621.4 18.000 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.319.060.7 59.043 | 3.472.253.3 63.785 | 96% | Ekonomis |
| 3 | Kab. Batang | 1.687.215.7 25.890 | 1.705.149.5 33.749 | 99% | Ekonomis |
| 4 | Kab. Blora | 2.116.475.5 61.459 | 2.158.819.5 07.692 | 98% | Ekonomis |

| No. | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 5 | Kab. Boyolali | 2.203.112.7 62.252 | 2.242.814.3 40.000 | 98% | Ekonomis |
| 6 | Kab. Brebes | 2.825.364.0 02.156 | 2.833.645.7 48.000 | 100% | Ekonomis |
| 7 | Kab. Cilacap | 2.985.422.8 39.102 | 3.084.579.6 37.400 | 97% | Ekonomis |
| 8 | Kab. Demak | 2.050.065.9 54.050 | 2.014.063.4 60.400 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.345.537.0 47.244 | 2.383.805.2 30.083 | 98% | Ekonomis |
| 10 | Kab. Jepara | 2.300.574.1 21.504 | 2.358.409.0 53.000 | 98% | Ekonomis |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.064.581.5 57.575 | 2.150.630.1 60.000 | 96% | Ekonomis |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.652.047.9 80.376 | 2.812.902.4 14.000 | 94% | Ekonomis |
| 13 | Kab. Kendal | 2.148.450.0 40.419 | 2.184.770.7 69.700 | 98% | Ekonomis |
| 14 | Kab. Klaten | 2.611.007.4 99.826 | 2.656.503.1 42.500 | 98% | Ekonomis |
| 15 | Kab. Kudus | 1.957.701.6 52.495 | 1.803.484.2 50.000 | 109% | Tidak Ekonomis |
| 16 | Kab. Magelang | 2.486.540.5 61.169 | 2.662.575.0 16.000 | 93% | Ekonomis |
| 17 | Kab. Pati | 2.781.234.6 87.644 | 2.647.132.0 50.000 | 105% | Tidak Ekonomis |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.160.744.4 30.323 | 2.230.242.6 42.800 | 97% | Ekonomis |

| No. | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| 19 | Kab. Pemasang | 2.324.288.7 98.012 | 2.262.937.6 65.000 | 103% | Tidak Ekonomis |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.924.908.4 32.550 | 1.992.797.2 69.000 | 97% | Ekonomis |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.125.880.8 39.764 | 1.875.058.3 04.015 | 113% | Tidak Ekonomis |
| 22 | Kab. Rembang | 1.814.662.2 62.214 | 1.861.907.7 18.384 | 97% | Ekonomis |
| 23 | Kab. Semarang | 2.171.799.8 10.994 | 2.132.848.6 24.000 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 24 | Kab. Sragen | 2.236.802.7 57.132 | 2.170.257.8 33.699 | 103% | Tidak Ekonomis |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.050.161.9 04.519 | 2.126.525.2 16.000 | 96% | Ekonomis |
| 26 | Kab. Tegal | 2.575.620.5 03.042 | 2.789.114.5 12.000 | 92% | Ekonomis |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.670.309.2 85.608 | 1.723.357.3 67.620 | 97% | Ekonomis |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.246.861.2 48.844 | 2.279.376.0 71.842 | 99% | Ekonomis |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.856.165.2 86.054 | 1.891.614.1 69.500 | 98% | Ekonomis |
| 30 | Kota Magelang | 937.345.746 .470 | 969.216.881 .000 | 97% | Ekonomis |
| 31 | Kota Pekalongan | 883.184.894 .707 | 959.757.125 .000 | 92% | Ekonomis |
| 32 | Kota Salatiga | 923.538.238 .485 | 923.362.432 .000 | 100% | Ekonomis Berimbang |

| No. | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| 33 | Kota Semarang | 4.506.407.6 29.744 | 5.170.158.9 70.218 | 87% | Ekonomis |
| 34 | Kota Surakarta | 1.914.818.3 94.396 | 1.905.769.9 55.034 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 35 | Kota Tegal | 916.730.788 .800 | 1.089.919.6 41.000 | 84% | Ekonomis |

Jika dilihat dari tabel 4.7 di atas pada tahun 2018 diperoleh informasi bahwa terdapat 21 kabupaten dan 4 kota yang persentasenya dibawah 100% selanjutnya 8 kabupaten persentasenya berada di atas 100% dan yang terakhir terdapat 2 kota yang persentasenya 100%

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.123.033.7 97.431 | 2.128.689.82 4.500 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.457.550.2 01.497 | 3.621.363.72 7.000 | 95% | Ekonomis |
| 3 | Kab. Batang | 1.755.066.5 60.019 | 1.821.466.35 8.456 | 96% | Ekonomis |
| 4 | Kab. Blora | 2.201.539.9 35.903 | 2.215.590.59 3.677 | 99% | Ekonomis |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.381.601.8 64.739 | 2.371.992.36 4.000 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 6 | Kab. Brebes | 3.132.251.7 40.580 | 3.256.315.61 8.000 | 96% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 7 | Kab. Cilacap | 3.283.321.1 37.886 | 3.352.054.95 9.317 | 98% | Ekonomis |
| 8 | Kab. Demak | 2.309.815.5 50.608 | 2.347.587.51 4.000 | 98% | Ekonomis |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.551.226.7 10.394 | 2.514.428.15 8.592 | 101% | Tidak Ekonomis |
| 10 | Kab. Jepara | 2.337.605.9 86.009 | 2.331.891.41 9.000 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.262.015.9 69.098 | 2.313.588.17 8.000 | 98% | Ekonomis |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.809.549.4 44.627 | 2.960.999.39 3.000 | 95% | Ekonomis |
| 13 | Kab. Kendal | 2.331.683.0 34.136 | 2.445.490.27 8.577 | 95% | Ekonomis |
| 14 | Kab. Klaten | 2.682.356.7 33.814 | 2.768.108.34 5.300 | 97% | Ekonomis |
| 15 | Kab. Kudus | 2.061.664.1 56.540 | 1.814.797.41 4.000 | 114% | Tidak Ekonomis |
| 16 | Kab. Magelang | 2.568.593.6 03.007 | 2.671.021.11 5.200 | 96% | Ekonomis |
| 17 | Kab. Pati | 2.870.260.4 03.230 | 2.825.572.58 3.000 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.183.534.7 90.005 | 2.417.318.27 8.800 | 90% | Ekonomis |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.584.470.8 69.519 | 2.629.612.48 4.000 | 98% | Ekonomis |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.062.727.8 50.424 | 2.101.281.89 0.000 | 98% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 21 | Kab. Purworejo | 2.186.289.2 26.260 | 2.215.437.47 3.275 | 99% | Ekonomis |
| 22 | Kab. Rembang | 1.863.502.8 28.110 | 1.827.508.35 0.914 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 23 | Kab. Semarang | 2.312.242.1 17.310 | 2.277.672.42 8.000 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 24 | Kab. Sragen | 2.092.140.2 83.903 | 2.146.652.89 5.644 | 97% | Ekonomis |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.114.149.3 61.513 | 2.242.836.99 7.000 | 94% | Ekonomis |
| 26 | Kab. Tegal | 2.717.431.5 98.854 | 2.866.763.48 3.000 | 95% | Ekonomis |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.841.033.6 35.270 | 1.910.778.25 5.471 | 96% | Ekonomis |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.455.975.3 19.573 | 2.423.345.89 5.900 | 101% | Tidak Ekonomis |
| 29 | Kab. Wonosobo | 2.024.794.9 57.930 | 2.028.208.62 1.480 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 30 | Kota Magelang | 995.162.119 .612 | 1.031.966.58 1.000 | 96% | Ekonomis |
| 31 | Kota Pekalongan | 954.397.012 .827 | 1.026.156.22 8.000 | 93% | Ekonomis |
| 32 | Kota Salatiga | 942.687.426 .593 | 949.291.338. 000 | 99% | Ekonomis |
| 33 | Kota Semarang | 4.633.934.3 40.973 | 5.134.427.77 4.000 | 90% | Ekonomis |
| 34 | Kota Surakarta | 2.012.408.1 12.863 | 2.001.997.78 4.000 | 101% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 35 | Kota Tegal | 1.046.575.2 12.898 | 1.120.465.80 3.000 | 93% | Ekonomis |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 19 Pemerintah Daerah Kabupaten dan 6 kota yang persentasenya berada di bawah 100%. Sedangkan 4 kabupaten persentasenya 100%. Dan 6 kabupaten yang memiliki persentase di atas 100%

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.030.532.39 7.495,00 | 2.247.978.4 04.000 | 90% | Ekonomis |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.249.141.93 5.364,00 | 3.743.918.7 63.744 | 87% | Ekonomis |
| 3 | Kab. Batang | 1.662.512.93 2.221,19 | 1.890.617.4 25.977 | 88% | Ekonomis |
| 4 | Kab. Blora | 2.109.122.88 7.754,00 | 2.216.323.7 69.900 | 95% | Ekonomis |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.339.805.51 7.025,00 | 2.466.443.4 23.000 | 95% | Ekonomis |
| 6 | Kab. Brebes | 2.955.050.37 3.005,00 | 3.270.994.1 79.000 | 90% | Ekonomis |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.088.834.82 0.260,00 | 3.552.204.6 75.002 | 87% | Ekonomis |
| 8 | Kab. Demak | 2.285.742.09 6.591,00 | 2.384.405.7 66.000 | 96% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 9 | Kab. Grobogan | 2.511.268.62 5.929,00 | 2.615.085.5 22.983 | 96% | Ekonomis |
| 10 | Kab. Jepara | 2.268.045.72 5.410,00 | 2.541.691.0 90.000 | 89% | Ekonomis |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.092.032.55 2.152,00 | 2.287.236.7 45.000 | 91% | Ekonomis |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.737.861.91 6.080,00 | 3.033.756.7 68.000 | 90% | Ekonomis |
| 13 | Kab. Kendal | 2.041.114.76 6.533,00 | 2.448.834.5 13.867 | 83% | Ekonomis |
| 14 | Kab. Klaten | 2.545.164.49 4.577,00 | 2.906.327.2 98.100 | 88% | Ekonomis |
| 15 | Kab. Kudus | 1.914.626.25 7.581,00 | 1.911.471.4 64.000 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 16 | Kab. Magelang | 2.304.375.91 7.161,00 | 2.713.496.6 77.600 | 85% | Ekonomis |
| 17 | Kab. Pati | 2.739.724.37 2.740,00 | 2.900.220.6 72.000 | 94% | Ekonomis |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.053.017.71 1.594,00 | 2.446.656.1 42.301 | 84% | Ekonomis |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.664.990.53 0.908,00 | 2.828.842.8 85.000 | 94% | Ekonomis |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.894.875.52 9.380,00 | 2.095.813.3 19.000 | 90% | Ekonomis |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.126.674.17 8.307,00 | 2.483.287.9 20.212 | 86% | Ekonomis |
| 22 | Kab. Rembang | 1.830.776.50 4.959,20 | 1.964.433.8 29.762 | 93% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 23 | Kab. Semarang | 2.191.412.62 1.750,00 | 2.454.223.1 81.000 | 89% | Ekonomis |
| 24 | Kab. Sragen | 2.130.438.47 6.217,00 | 2.312.886.8 93.345 | 92% | Ekonomis |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.073.080.96 6.909,00 | 2.392.529.9 62.000 | 87% | Ekonomis |
| 26 | Kab. Tegal | 2.505.539.94 9.419,52 | 2.891.805.2 53.000 | 87% | Ekonomis |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.783.204.94 9.098,00 | 1.981.489.2 74.847 | 90% | Ekonomis |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.262.812.45 2.301,00 | 2.474.910.2 61.874 | 91% | Ekonomis |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.881.315.42 8.762,00 | 2.055.345.6 35.370 | 92% | Ekonomis |
| 30 | Kota Magelang | 798.353.191. 714,00 | 995.607.354 .000 | 80% | Ekonomis |
| 31 | Kota Pekalongan | 944.840.460. 675,56 | 1.055.857.4 82.000 | 89% | Ekonomis |
| 32 | Kota Salatiga | 944.954.212. 904,00 | 1.006.404.9 06.000 | 94% | Ekonomis |
| 33 | Kota Semarang | 4.128.912.54 5.760,00 | 5.256.092.7 89.000 | 79% | Ekonomis |
| 34 | Kota Surakarta | 1.639.665.22 6.421,00 | 2.109.290.6 76.959 | 78% | Ekonomis |
| 35 | Kota Tegal | 1.048.606.49 5.383,00 | 1.278.393.1 00.000 | 82% | Ekonomis |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2020 terdapat 1 kabupaten yang persentasenya sama dengan 100%. Sementara 28 kabupaten dan 6 kota lainnya persentasenya dibawah 100%.

Tabel 4.10
 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.042.019.2 97.374 | 3.891.819.94 9.635,00 | 52% | Ekonomis |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.430.884.2 86.153 | 3.891.819.94 9.635,00 | 88% | Ekonomis |
| 3 | Kab. Batang | 1.780.425.1 31.876 | 1.871.771.47 8.081,00 | 95% | Ekonomis |
| 4 | Kab. Blora | 2.113.773.0 65.809 | 2.198.118.86 7.915,00 | 96% | Ekonomis |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.268.508.8 27.348 | 2.282.488.61 6.000,00 | 99% | Ekonomis |
| 6 | Kab. Brebes | 3.126.226.4 70.519 | 3.220.782.21 5.000,00 | 97% | Ekonomis |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.329.814.7 16.680 | 3.646.761.86 3.600,00 | 91% | Ekonomis |
| 8 | Kab. Demak | 2.336.015.7 25.797 | 2.386.606.23 0.534,00 | 98% | Ekonomis |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.428.631.6 73.540 | 2.497.512.96 9.115,00 | 97% | Ekonomis |
| 10 | Kab. Jepara | 2.309.409.4 64.300 | 2.135.511.00 5.000,00 | 108% | Tidak Ekonomis |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.138.939.5 85.089 | 2.135.811.98 7.000,00 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.779.840.6 98.100 | 2.818.415.16 6.000,00 | 99% | Ekonomis |
| 13 | Kab. Kendal | 2.069.958.0 06.821 | 2.312.194.06 7.943,00 | 90% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| 14 | Kab. Klaten | 2.493.406.8 81.542 | 2.710.853.25 9.894,00 | 92% | Ekonomis |
| 15 | Kab. Kudus | 1.879.122.9 90.401 | 1.848.490.32 9.807,00 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 16 | Kab. Magelang | 2.413.163.7 88.892 | 2.526.347.85 8.335,00 | 96% | Ekonomis |
| 17 | Kab. Pati | 2.623.732.6 54.045 | 2.842.495.52 7.000,00 | 92% | Ekonomis |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.075.043.1 60.188 | 2.256.232.06 2.404,00 | 92% | Ekonomis |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.524.558.7 85.164 | 2.836.829.73 5.000,00 | 89% | Ekonomis |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.999.904.8 29.992 | 2.016.926.61 3.000,00 | 99% | Ekonomis |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.135.478.2 13.580 | 2.240.552.29 3.168,00 | 95% | Ekonomis |
| 22 | Kab. Rembang | 1.836.443.0 11.929 | 1.830.578.43 8.500,00 | 100% | Ekonomis Berimbang |
| 23 | Kab. Semarang | 2.198.880.6 62.286 | 2.090.545.81 6.000,00 | 105% | Tidak Ekonomis |
| 24 | Kab. Sragen | 2.160.877.7 75.669 | 2.265.495.15 2.935,00 | 95% | Ekonomis |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.089.455.5 58.854 | 2.247.461.47 4.000,00 | 93% | Ekonomis |
| 26 | Kab. Tegal | 2.776.664.0 42.487 | 2.894.606.72 3.000,00 | 96% | Ekonomis |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.877.969.1 67.294 | 1.949.350.91 7.532,00 | 96% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.297.510.6 94.153 | 2.402.581.25 3.034,00 | 96% | Ekonomis |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.860.097.9 90.936 | 1.967.746.23 0.449,00 | 95% | Ekonomis |
| 30 | Kota Magelang | 935.047.734 .177 | 980.191.941. 000,00 | 95% | Ekonomis |
| 31 | Kota Pekalongan | 962.091.792 .004 | 983.948.191. 000,00 | 98% | Ekonomis |
| 32 | Kota Salatiga | 956.501.304 .732 | 978.129.530. 000,00 | 98% | Ekonomis |
| 33 | Kota Semarang | 4.764.045.9 46.157 | 4.854.391.16 9.040,00 | 98% | Ekonomis |
| 34 | Kota Surakarta | 1.866.496.3 48.304 | 1.974.612.83 5.274,00 | 95% | Ekonomis |
| 35 | Kota Tegal | 1.089.705.6 97.276 | 1.257.032.71 9.040,00 | 87% | Ekonomis |

Pada tahun 2021 jika dilihat dari tabel di atas terdapat 23 kabupaten dan 6 kota yang persentasenya dibawah 100% sedangkan 3 kabupaten persentasenya berada di atas 100% dan 3 kabupaten persentasenya sama dengan 100%.

Tabel 4.11
 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.039.210.9 30.404 | 2.187.091.60 4.000 | 93% | Ekonomis |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.600.847.3 67.173 | 3.609.761.26 9.620 | 100% | Ekonomis berimbang |
| 3 | Kab. Batang | 1.801.913.4 36.483 | 1.829.304.85 6.259 | 99% | Ekonomis |
| 4 | Kab. Blora | 2.396.215.6 21.703 | 2.299.649.65 7.000 | 104% | Tidak Ekonomis |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.471.827.4 29.489 | 2.283.011.43 8.000 | 108% | Tidak Ekonomis |
| 6 | Kab. Brebes | 3.091.285.5 59.556 | 3.193.442.50 0.600 | 97% | Ekonomis |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.402.035.6 20.730 | 3.503.687.43 5.633 | 97% | Ekonomis |
| 8 | Kab. Demak | 2.487.342.6 27.299 | 2.449.631.87 6.898 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.687.129.8 32.388 | 2.652.101.86 0.000 | 101% | Tidak Ekonomis |
| 10 | Kab. Jepara | 2.429.312.2 18.030 | 2.580.801.63 7.020 | 94% | Ekonomis |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.203.430.1 51.176 | 2.126.535.04 0.500 | 104% | Tidak Ekonomis |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.824.358.2 93.725 | 2.843.725.87 2.000 | 99% | Ekonomis |
| 13 | Kab. Kendal | 2.499.014.0 19.249 | 2.507.706.13 1.219 | 100% | Ekonomis Berimbang |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 14 | Kab. Klaten | 2.527.619.3 32.474 | 2.700.855.92 1.596 | 94% | Ekonomis |
| 15 | Kab. Kudus | 2.231.500.7 73.692 | 2.138.777.59 5.583 | 104% | Tidak Ekonomis |
| 16 | Kab. Magelang | 2.570.326.0 01.677 | 2.692.997.58 1.732 | 95% | Ekonomis |
| 17 | Kab. Pati | 2.717.685.0 26.789 | 2.781.043.06 4.000 | 98% | Ekonomis |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.123.953.8 46.361 | 2.219.934.95 4.546 | 96% | Ekonomis |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.504.262.1 39.265 | 2.469.130.20 8.000 | 101% | Tidak Ekonomis |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.122.762.5 27.980 | 2.077.807.97 8.000 | 102% | Tidak Ekonomis |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.347.131.1 65.050 | 2.480.523.55 3.127 | 95% | Ekonomis |
| 22 | Kab. Rembang | 1.991.790.0 18.143 | 2.203.102.30 6.051 | 90% | Ekonomis |
| 23 | Kab. Semarang | 2.536.331.3 44.170 | 2.562.935.51 1.000 | 99% | Ekonomis |
| 24 | Kab. Sragen | 2.306.325.5 55.226 | 2.382.049.21 6.160 | 97% | Ekonomis |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.042.027.8 14.977 | 2.122.441.23 4.012 | 96% | Ekonomis |
| 26 | Kab. Tegal | 2.722.064.9 17.511 | 2.869.008.06 3.000 | 95% | Ekonomis |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.958.748.4 09.806 | 1.989.495.21 1.214 | 98% | Ekonomis |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Ekonomis | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.243.214.0 84.512 | 2.293.573.30 9.945 | 98% | Ekonomis |
| 29 | Kab. Wonosobo | 2.011.113.2 50.458 | 1.996.761.24 4.159 | 101% | Tidak Ekonomis |
| 30 | Kota Magelang | 1.039.501.5 02.733 | 897.124.309. 929 | 116% | Tidak Ekonomis |
| 31 | Kota Pekalongan | 1.031.090.1 88.444 | 998.875.257. 000 | 103% | Tidak Ekonomis |
| 32 | Kota Salatiga | 932.071.471 .274 | 918.603.528. 410 | 101% | Tidak Ekonomis |
| 33 | Kota Semarang | 4.871.946.6 97.040 | 5.544.227.02 9.000 | 88% | Ekonomis |
| 34 | Kota Surakarta | 2.088.323.3 95.600 | 2.239.295.96 1.790 | 93% | Ekonomis |
| 35 | Kota Tegal | 1.127.738.1 12.539 | 1.164.677.63 1.206 | 97% | Ekonomis |

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diperoleh informasi bahwa terdapat 18 kabupaten dan 3 kota yang tingkat presentase ekonomisnya berada dibawah 100%. Kemudian 9 kabupaten dan 3 kota presentasenya di atas 100% sedangkan 2 kota presentasenya sama dengan 100%.

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi ini dilakukan untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi biaya dengan realisasi pendapatan dalam (Mahbengi 2017)

Rasio efisiensi ini dirumuskan sebagai berikut.

$$R \quad E = \frac{R \quad B \quad D \quad h}{R \quad u \quad P \quad D \quad h} \times 100\%$$

Tabel 4.12

**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.119.096.6 83.202 | 2.074.653.16 1.695 | 102% | Tidak Efisien |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.319.060.7 59.043 | 3.265.926.65 1.861 | 102% | Tidak Efisien |
| 3 | Kab. Batang | 1.687.215.7 25.890 | 1.701.877.29 9.154 | 99% | Kurang Efisien |
| 4 | Kab. Blora | 2.116.475.5 61.459 | 2.120.671.43 4.967 | 100% | Kurang Efisien |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.203.112.7 62.252 | 2.227.780.71 0.062 | 99% | Kurang Efisien |
| 6 | Kab. Brebes | 2.825.364.0 02.156 | 2.854.043.93 9.110 | 99% | Kurang Efisien |
| 7 | Kab. Cilacap | 2.985.422.8 39.102 | 3.072.112.46 4.787 | 97% | Kurang Efisien |
| 8 | Kab. Demak | 2.050.065.9 54.050 | 2.143.306.25 8.595 | 96% | Kurang Efisien |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.345.537.0 47.244 | 2.439.501.26 2.356 | 96% | Kurang Efisien |
| 10 | Kab. Jepara | 2.300.574.1 21.504 | 2.255.843.02 2.157 | 102% | Tidak Efisien |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.064.581.5 57.575 | 2.113.929.23 1.663 | 98% | Kurang Efisien |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.652.047.9 80.376 | 2.639.814.86 4.398 | 100% | Kurang Efisien |
| 13 | Kab. Kendal | 2.148.450.0 40.419 | 2.138.564.38 7.700 | 100% | Kurang Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 14 | Kab. Klaten | 2.611.007.4 99.826 | 2.577.961.13 0.135 | 101% | Tidak Efisien |
| 15 | Kab. Kudus | 1.957.701.6 52.495 | 1.996.530.09 4.357 | 98% | Kurang Efisien |
| 16 | Kab. Magelang | 2.486.540.5 61.169 | 2.302.190.54 3.616 | 108% | Tidak Efisien |
| 17 | Kab. Pati | 2.781.234.6 87.644 | 2.789.055.85 9.854 | 100% | Kurang Efisien |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.160.744.4 30.323 | 2.101.449.30 2.497 | 103% | Tidak Efisien |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.324.288.7 98.012 | 2.428.263.88 5.703 | 96% | Kurang Efisien |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.924.908.4 32.550 | 1.948.442.02 9.100 | 99% | Kurang Efisien |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.125.880.8 39.764 | 2.049.784.18 6.054 | 104% | Tidak Efisien |
| 22 | Kab. Rembang | 1.814.662.2 62.214 | 1.785.911.07 5.230 | 102% | Tidak Efisien |
| 23 | Kab. Semarang | 2.171.799.8 10.994 | 2.117.416.56 6.804 | 103% | Tidak Efisien |
| 24 | Kab. Sragen | 2.236.802.7 57.132 | 2.176.997.51 1.640 | 103% | Tidak Efisien |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.050.161.9 04.519 | 2.055.517.96 4.074 | 100% | Kurang Efisien |
| 26 | Kab. Tegal | 2.575.620.5 03.042 | 2.524.365.91 9.815 | 102% | Tidak Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 27 | Kab. Temanggung | 1.670.309.2 85.608 | 1.731.235.86 7.161 | 96% | Kurang Efisien |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.246.861.2 48.844 | 2.298.176.60 0.990 | 98% | Kurang Efisien |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.856.165.2 86.054 | 1.851.441.02 4.405 | 100% | Kurang Efisien |
| 30 | Kota Magelang | 937.345.746 .470 | 908.089.485. 909 | 103% | Tidak Efisien |
| 31 | Kota Pekalongan | 883.184.894 .707 | 905.231.572. 568 | 98% | Kurang Efisien |
| 32 | Kota Salatiga | 923.538.238 .485 | 889.992.411. 250 | 104% | Tidak Efisien |
| 33 | Kota Semarang | 4.506.407.6 29.744 | 4.234.394.06 0.362 | 106% | Tidak Efisien |
| 34 | Kota Surakarta | 1.914.818.3 94.396 | 1.879.056.01 6.679 | 102% | Tidak Efisien |
| 35 | Kota Tegal | 916.730.788 .800 | 987.244.236. 619 | 93% | Kurang Efisien |

Berdasarkan tabel terdapat 11 kabupaten dan 4 kota yang masuk ke dalam kategori tidak efisien dikarenakan persentasenya berada di atas 100%. Sedangkan 18 kabupaten dan 2 kota persentasenya kurang dari dan sama dengan 100%.

Tabel 4.13
 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.123.033.7 97.431 | 2.105.990.2 72.337 | 101% | Tidak Efisien |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.457.550.2 01.497 | 3.434.925.9 95.303 | 101% | Tidak Efisien |
| 3 | Kab. Batang | 1.755.066.5 60.019 | 1.769.958.2 02.416 | 99% | Kurang Efisien |
| 4 | Kab. Blora | 2.201.539.9 35.903 | 2.240.970.0 20.181 | 98% | Kurang Efisien |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.381.601.8 64.739 | 2.357.487.2 10.573 | 101% | Tidak Efisien |
| 6 | Kab. Brebes | 3.132.251.7 40.580 | 3.096.826.8 45.150 | 101% | Tidak Efisien |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.283.321.1 37.886 | 3.282.797.9 66.311 | 100% | Kurang Efisien |
| 8 | Kab. Demak | 2.309.815.5 50.608 | 2.362.016.2 48.793 | 98% | Kurang Efisien |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.551.226.7 10.394 | 2.581.437.5 43.584 | 99% | Kurang Efisien |
| 10 | Kab. Jepara | 2.337.605.9 86.009 | 2.413.822.9 93.348 | 97% | Kurang Efisien |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.262.015.9 69.098 | 2.179.409.7 06.710 | 104% | Tidak Efisien |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.809.549.4 44.627 | 2.818.494.9 83.541 | 100% | Kurang Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 13 | Kab. Kendal | 2.331.683.0 34.136 | 2.228.384.3 99.855 | 105% | Tidak Efisien |
| 14 | Kab. Klaten | 2.682.356.7 33.814 | 2.689.353.2 52.985 | 100% | Kurang Efisien |
| 15 | Kab. Kudus | 2.061.664.1 56.540 | 2.090.430.3 64.413 | 99% | Kurang Efisien |
| 16 | Kab. Magelang | 2.568.593.6 03.007 | 2.575.439.8 25.755 | 100% | Kurang Efisien |
| 17 | Kab. Pati | 2.870.260.4 03.230 | 2.838.881.3 96.181 | 101% | Tidak Efisien |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.183.534.7 90.005 | 2.182.770.9 52.456 | 100% | Kurang Efisien |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.584.470.8 69.519 | 2.636.036.8 43.851 | 98% | Kurang Efisien |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.062.727.8 50.424 | 2.076.658.1 14.142 | 99% | Kurang Efisien |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.186.289.2 26.260 | 2.172.436.9 25.114 | 101% | Tidak Efisien |
| 22 | Kab. Rembang | 1.863.502.8 28.110 | 1.821.899.8 84.311 | 102% | Tidak Efisien |
| 23 | Kab. Semarang | 2.312.242.1 17.310 | 2.311.149.3 43.922 | 100% | Kurang Efisien |
| 24 | Kab. Sragen | 2.092.140.2 83.903 | 2.300.826.0 69.513 | 91% | Kurang Efisien |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.114.149.3 61.513 | 2.143.687.5 69.516 | 99% | Kurang Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 26 | Kab. Tegal | 2.717.431.5 98.854 | 2.755.677.4 84.152 | 99% | Kurang Efisien |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.841.033.6 35.270 | 1.878.383.8 23.682 | 98% | Kurang Efisien |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.455.975.3 19.573 | 2.442.677.9 72.827 | 101% | Tidak Efisien |
| 29 | Kab. Wonosobo | 2.024.794.9 57.930 | 1.958.595.0 25.572 | 103% | Tidak Efisien |
| 30 | Kota Magelang | 995.162.11 9.612 | 967.785.834 .243 | 103% | Tidak Efisien |
| 31 | Kota Pekalongan | 954.397.01 2.827 | 971.624.464 .121 | 98% | Kurang Efisien |
| 32 | Kota Salatiga | 942.687.42 6.593 | 928.019.899 .150 | 102% | Tidak Efisien |
| 33 | Kota Semarang | 4.633.934.3 40.973 | 4.565.340.8 27.417 | 102% | Tidak Efisien |
| 34 | Kota Surakarta | 2.012.408.1 12.863 | 1.945.953.2 41.924 | 103% | Tidak Efisien |
| 35 | Kota Tegal | 1.046.575.2 12.898 | 1.036.963.7 63.529 | 101% | Tidak Efisien |

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 11 kabupaten dan 5 kota yang rasionya berada di atas 100%. Sedangkan 18 kabupaten dan 1 kota masuk hasil perhitungannya adalah kurang dari dan sama dengan 100%.

Tabel 4.14
 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.030.532.39 7.495,00 | 1.994.604.1 06.561,00 | 102% | Tidak Efisien |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.249.141.93 5.364,00 | 3.330.186.7 88.242,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 3 | Kab. Batang | 1.662.512.93 2.221,19 | 1.733.087.8 93.276,46 | 96% | Kurang Efisien |
| 4 | Kab. Blora | 2.109.122.88 7.754,00 | 2.127.946.9 61.535,00 | 99% | Kurang Efisien |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.339.805.51 7.025,00 | 2.382.403.2 20.150,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 6 | Kab. Brebes | 2.955.050.37 3.005,00 | 3.008.370.7 17.507,14 | 98% | Kurang Efisien |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.088.834.82 0.260,00 | 3.152.402.4 55.712,48 | 98% | Kurang Efisien |
| 8 | Kab. Demak | 2.285.742.09 6.591,00 | 2.333.738.9 96.798,95 | 98% | Kurang Efisien |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.511.268.62 5.929,00 | 2.528.884.1 31.946,00 | 99% | Kurang Efisien |
| 10 | Kab. Jepara | 2.268.045.72 5.410,00 | 2.315.260.3 99.485,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.092.032.55 2.152,00 | 2.121.386.1 79.225,00 | 99% | Kurang Efisien |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.737.861.91 6.080,00 | 2.763.229.3 07.229,80 | 99% | Kurang Efisien |
| 13 | Kab. Kendal | 2.041.114.76 6.533,00 | 2.131.449.7 84.048,00 | 96% | Kurang Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 14 | Kab. Klaten | 2.545.164.49 4.577,00 | 2.578.135.8 36.354,00 | 99% | Kurang Efisien |
| 15 | Kab. Kudus | 1.914.626.25 7.581,00 | 2.016.176.9 86.239,00 | 95% | Kurang Efisien |
| 16 | Kab. Magelang | 2.304.375.91 7.161,00 | 2.380.457.6 80.604,00 | 97% | Kurang Efisien |
| 17 | Kab. Pati | 2.739.724.37 2.740,00 | 2.662.375.4 37.006,00 | 103% | Tidak Efisien |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.053.017.71 1.594,00 | 2.061.798.4 74.096,15 | 100% | Kurang Efisien |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.664.990.53 0.908,00 | 2.449.008.5 77.285,00 | 109% | Tidak Efisien |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.894.875.52 9.380,00 | 1.952.749.3 01.274,00 | 97% | Kurang Efisien |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.126.674.17 8.307,00 | 2.166.947.7 47.648,00 | 98% | Kurang Efisien |
| 22 | Kab. Rembang | 1.830.776.50 4.959,20 | 1.878.325.9 19.915,50 | 97% | Kurang Efisien |
| 23 | Kab. Semarang | 2.191.412.62 1.750,00 | 2.211.273.5 24.265,97 | 99% | Kurang Efisien |
| 24 | Kab. Sragen | 2.130.438.47 6.217,00 | 2.212.824.9 74.529,00 | 96% | Kurang Efisien |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.073.080.96 6.909,00 | 2.040.394.7 61.328,00 | 102% | Tidak Efisien |
| 26 | Kab. Tegal | 2.505.539.94 9.419,52 | 2.651.771.8 38.697,60 | 94% | Kurang Efisien |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.783.204.94 9.098,00 | 1.830.848.4 53.347,00 | 97% | Kurang Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.262.812.45 2.301,00 | 2.273.678.5 38.635,00 | 100% | Kurang Efisien |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.881.315.42 8.762,00 | 1.878.995.6 66.418,00 | 100% | kurang Efisien |
| 30 | Kota Magelang | 798.353.191. 714,00 | 946.188.761 .537,00 | 84% | Cukup Efisien |
| 31 | Kota Pekalongan | 944.840.460. 675,56 | 953.155.394 .614,95 | 99% | Kurang Efisien |
| 32 | Kota Salatiga | 944.954.212. 904,00 | 890.223.683 .933,00 | 106% | Tidak Efisien |
| 33 | Kota Semarang | 4.128.912.54 5.760,00 | 4.400.500.8 38.480,00 | 94% | Kurang Efisien |
| 34 | Kota Surakarta | 1.639.665.22 6.421,00 | 1.831.319.3 73.387,00 | 90% | Cukup Efisien |
| 35 | Kota Tegal | 1.048.606.49 5.383,00 | 1.017.915.1 09.373,00 | 103% | Tidak Efisien |

Pada tahun 2020 terdapat 25 kabupaten dan 2 kota dengan perolehan presentase rasio kurang dari 100% sedangkan pada 4 kabupaten dan 2 kota hasil perhitungan presentasinya adalah lebih dari 100%. kemudian 2 kota yaitu kota magelang dan kota surakarta mendapatkan presentasinya dibawah 90%.

Tabel 4.15
 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.042.019.29 7.374 | 2.086.059.7 42.250 | 98% | Kurang Efisien |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.430.884.2 86.153 | 3.487.722.9 00.410 | 98% | Kurang Efisien |
| 3 | Kab. Batang | 1.780.425.1 31.876 | 1.821.822.5 80.995 | 98% | Kurang Efisien |
| 4 | Kab. Blora | 2.113.773.0 65.809 | 2.227.065.2 70.461 | 95% | Kurang Efisien |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.268.508.8 27.348 | 2.430.235.2 08.978 | 93% | Kurang Efisien |
| 6 | Kab. Brebes | 3.126.226.4 70.519 | 3.162.140.4 24.372 | 99% | Kurang Efisien |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.329.814.7 16.680 | 3.334.300.2 90.656 | 100% | Kurang Efisien |
| 8 | Kab. Demak | 2.336.015.7 25.797 | 2.365.244.7 59.686 | 99% | Kurang Efisien |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.428.631.6 73.540 | 2.634.888.6 73.901 | 92% | Kurang Efisien |
| 10 | Kab. Jepara | 2.309.409.4 64.300 | 2.380.695.9 35.358 | 97% | Kurang Efisien |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.138.939.5 85.089 | 2.165.983.7 48.572 | 99% | Kurang Efisien |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.779.840.6 98.100 | 2.832.035.0 15.733 | 98% | Kurang Efisien |
| 13 | Kab. Kendal | 2.069.958.0 06.821 | 2.300.543.6 41.945 | 90% | Cukup Efisien |
| 14 | Kab. Klaten | 2.493.406.8 81.542 | 2.570.037.7 77.373 | 97% | Kurang Efisien |
| 15 | Kab. Kudus | 1.879.122.9 90.401 | 2.163.634.4 37.714 | 87% | Cukup Efisien |
| 16 | Kab. Magelang | 2.413.163.7 88.892 | 2.469.754.3 15.099 | 98% | Kurang Efisien |
| 17 | Kab. Pati | 2.623.732.6 54.045 | 2.725.202.3 50.660 | 96% | Kurang Efisien |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.075.043.1 60.188 | 2.078.543.5 12.922 | 100% | Kurang Efisien |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.524.558.7 85.164 | 2.605.029.8 36.438 | 97% | Kurang Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.999.904.8 29.992 | 2.054.843.6 44.547 | 97% | Kurang Efisien |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.135.478.2 13.580 | 2.290.242.9 67.778 | 93% | Kurang Efisien |
| 22 | Kab. Rembang | 1.836.443.0 11.929 | 1.911.328.5 05.019 | 96% | Kurang Efisien |
| 23 | Kab. Semarang | 2.198.880.6 62.286 | 2.417.282.7 70.158 | 91% | Kurang Efisien |
| 24 | Kab. Sragen | 2.160.877.7 75.669 | 2.336.721.7 27.716 | 92% | Kurang Efisien |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.089.455.5 58.854 | 2.119.633.3 70.538 | 99% | Kurang Efisien |
| 26 | Kab. Tegal | 2.776.664.0 42.487 | 2.862.559.3 66.052 | 97% | Kurang Efisien |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.877.969.1 67.294 | 1.971.005.9 90.029 | 95% | Kurang Efisien |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.297.510.6 94.153 | 2.303.564.8 98.937 | 100% | Kurang Efisien |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.860.097.9 90.936 | 1.967.781.0 49.592 | 95% | Kurang Efisien |
| 30 | Kota Magelang | 935.047.734 .177 | 994.366.987 .776 | 94% | Kurang Efisien |
| 31 | Kota Pekalongan | 962.091.792 .004 | 966.372.557 .051 | 100% | Kurang Efisien |
| 32 | Kota Salatiga | 956.501.304 .732 | 946.191.087 .524 | 101% | Tidak Efisien |
| 33 | Kota Semarang | 4.764.045.9 46.157 | 4.822.887.2 81.737 | 99% | Kurang Efisien |
| 34 | Kota Surakarta | 1.866.496.3 48.304 | 1.939.268.8 56.769 | 96% | Kurang Efisien |
| 35 | Kota Tegal | 1.089.705.6 97.276 | 1.030.986.5 10.449 | 106% | Tidak Efisien |

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 terdapat 27 kabupaten dan 4 kota yang memperoleh presentase dibawah 100%. Sedangkan 2 kabupaten mendapat presentase dibawah 90%. kemudian 2 kota mendapatkan presentase di atas 100%.

Tabel 4.16
 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.039.210.9 30.404 | 2.044.546.40 3.305 | 100% | Kurang Efisien |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.600.847.3 67.173 | 3.426.408.18 1.664 | 105% | Tidak Efisien |
| 3 | Kab. Batang | 1.801.913.4 36.483 | 1.750.957.03 5.202 | 103% | Tidak Efisien |
| 4 | Kab. Blora | 2.396.215.6 21.703 | 2.176.850.30 5.646 | 110% | Tidak Efisien |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.471.827.4 29.489 | 2.372.372.55 1.015 | 104% | Tidak Efisien |
| 6 | Kab. Brebes | 3.091.285.5 59.556 | 2.989.821.99 0.874 | 103% | Tidak Efisien |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.402.035.6 20.730 | 3.293.132.13 9.343 | 103% | Tidak Efisien |
| 8 | Kab. Demak | 2.487.342.6 27.299 | 2.402.717.86 9.624 | 104% | Tidak Efisien |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.687.129.8 32.388 | 2.588.637.77 7.477 | 104% | Tidak Efisien |
| 10 | Kab. Jepara | 2.429.312.2 18.030 | 2.326.937.01 4.364 | 104% | Tidak Efisien |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.203.430.1 51.176 | 2.251.540.15 4.854 | 98% | Kurang Efisien |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.824.358.2 93.725 | 2.847.196.01 7.404 | 99% | Kurang Efisien |
| 13 | Kab. Kendal | 2.499.014.0 19.249 | 2.265.353.92 4.690 | 110% | Tidak Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 14 | Kab. Klaten | 2.527.619.3 32.474 | 2.587.693.43 2.935 | 98% | Kurang Efisien |
| 15 | Kab. Kudus | 2.231.500.7 73.692 | 2.078.759.80 1.863 | 107% | Tidak Efisien |
| 16 | Kab. Magelang | 2.570.326.0 01.677 | 2.558.024.17 7.090 | 100% | kurang Efisien |
| 17 | Kab. Pati | 2.717.685.0 26.789 | 2.705.053.75 7.861 | 100% | kurang Efisien |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.123.953.8 46.361 | 2.074.624.01 5.397 | 102% | Tidak Efisien |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.504.262.1 39.265 | 2.493.418.19 1.423 | 100% | kurang Efisien |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.122.762.5 27.980 | 2.022.884.62 9.933 | 105% | Tidak Efisien |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.347.131.1 65.050 | 2.185.997.98 0.027 | 107% | Tidak Efisien |
| 22 | Kab. Rembang | 1.991.790.0 18.143 | 1.841.484.13 9.353 | 108% | Tidak Efisien |
| 23 | Kab. Semarang | 2.536.331.3 44.170 | 2.337.453.49 9.457 | 109% | Tidak Efisien |
| 24 | Kab. Sragen | 2.306.325.5 55.226 | 2.177.840.07 2.042 | 106% | Tidak Efisien |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.042.027.8 14.977 | 2.014.818.26 2.391 | 101% | Tidak Efisien |
| 26 | Kab. Tegal | 2.722.064.9 17.511 | 2.743.700.52 5.564 | 99% | Kurang Efisien |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.958.748.4 09.806 | 1.895.483.91 4.078 | 103% | Tidak Efisien |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Efisiensi | Kriteria |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.243.214.0 84.512 | 2.262.263.89 1.811 | 99% | Kurang Efisien |
| 29 | Kab. Wonosobo | 2.011.113.2 50.458 | 1.921.189.09 3.169 | 105% | Tidak Efisien |
| 30 | Kota Magelang | 1.039.501.5 02.733 | 985.763.798. 066 | 105% | Tidak Efisien |
| 31 | Kota Pekalongan | 1.031.090.1 88.444 | 989.013.074. 926 | 104% | Tidak Efisien |
| 32 | Kota Salatiga | 932.071.471 .274 | 918.353.779. 916 | 101% | Tidak Efisien |
| 33 | Kota Semarang | 4.871.946.6 97.040 | 4.969.436.54 3.013 | 98% | Kurang Efisien |
| 34 | Kota Surakarta | 2.088.323.3 95.600 | 2.028.438.69 1.046 | 103% | Tidak Efisien |
| 35 | Kota Tegal | 1.127.738.1 12.539 | 1.042.635.84 5.201 | 108% | Tidak Efisien |

Sesuai dengan tabel perhitungan di atas maka diperoleh informasi bahwa 20 kabupaten dan 5 kota memperoleh presentase lebih dari 100%. Sementara itu 9 kabupaten dan 1 kota memperoleh presentase dibawah 100%.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas tidak untuk menyatakan tentang berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas digunakan untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan targetnya (Mahbengi 2017). Rasio efektivitas ini dirumuskan dengan:

$$R E = \frac{R}{A} \frac{P}{g P} \frac{D}{D} \frac{h}{h} \times 100\%$$

Tabel 4.17
 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.074.653.1 61.695 | 2.005.944. 976.500 | 103% | Sangat Efektif |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.265.926.6 51.861 | 3.257.004. 283.785 | 100% | Sangat Efektif |
| 3 | Kab. Batang | 1.701.877.2 99.154 | 1.654.999. 295.702 | 103% | Sangat Efektif |
| 4 | Kab. Blora | 2.120.671.4 34.967 | 2.122.662. 345.677 | 100% | Efektif |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.227.780.7 10.062 | 2.190.553. 226.000 | 102% | Sangat Efektif |
| 6 | Kab. Brebes | 2.854.043.9 39.110 | 2.814.882. 461.000 | 101% | Sangat Efektif |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.072.112.4 64.787 | 2.948.915. 191.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 8 | Kab. Demak | 2.143.306.2 58.595 | 1.958.433. 585.400 | 109% | Sangat Efektif |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.439.501.2 62.356 | 2.397.669. 340.501 | 102% | Sangat Efektif |
| 10 | Kab. Jepara | 2.255.843.0 22.157 | 2.120.764. 886.000 | 106% | Sangat Efektif |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.113.929.2 31.663 | 2.053.585. 660.000 | 103% | Sangat Efektif |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.639.814.8 64.398 | 2.647.019. 919.000 | 100% | Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 13 | Kab. Kendal | 2.138.564.3 87.700 | 2.077.470. 339.700 | 103% | Sangat Efektif |
| 14 | Kab. Klaten | 2.577.961.1 30.135 | 2.512.253. 142.500 | 103% | Sangat Efektif |
| 15 | Kab. Kudus | 1.996.530.0 94.357 | 1.740.415. 531.000 | 115% | Sangat Efektif |
| 16 | Kab. Magelang | 2.302.190.5 43.616 | 2.355.843. 093.000 | 98% | Efektif |
| 17 | Kab. Pati | 2.789.055.8 59.854 | 2.540.695. 960.000 | 110% | Sangat Efektif |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.101.449.3 02.497 | 2.136.445. 642.800 | 98% | Efektif |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.428.263.8 85.703 | 2.187.037. 545.000 | 111% | Sangat Efektif |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.948.442.0 29.100 | 1.959.697. 520.000 | 99% | Efektif |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.049.784.1 86.054 | 1.716.967. 116.415 | 119% | Sangat Efektif |
| 22 | Kab. Rembang | 1.785.911.0 75.230 | 1.760.297. 103.655 | 101% | Sangat Efektif |
| 23 | Kab. Semarang | 2.117.416.5 66.804 | 2.079.502. 418.000 | 102% | Sangat Efektif |
| 24 | Kab. Sragen | 2.176.997.5 11.640 | 1.958.299. 648.000 | 111% | Sangat Efektif |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.055.517.9 64.074 | 1.887.374. 030.000 | 109% | Sangat Efektif |
| 26 | Kab. Tegal | 2.524.365.9 19.815 | 2.615.959. 568.000 | 96% | Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 27 | Kab. Temanggung | 1.731.235.8 67.161 | 1.699.841. 115.051 | 102% | Sangat Efektif |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.298.176.6 00.990 | 2.192.011. 071.842 | 105% | Sangat Efektif |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.851.441.0 24.405 | 1.722.563. 823.500 | 107% | Sangat Efektif |
| 30 | Kota Magelang | 908.089.48 5.909 | 882.759.30 1.000 | 103% | Sangat Efektif |
| 31 | Kota Pekalongan | 905.231.57 2.568 | 927.157.12 5.000 | 98% | Efektif |
| 32 | Kota Salatiga | 889.992.41 1.250 | 887.972.52 0.000 | 100% | Sangat Efektif |
| 33 | Kota Semarang | 4.234.394.0 60.362 | 4.301.858. 632.218 | 98% | Efektif |
| 34 | Kota Surakarta | 1.879.056.0 16.679 | 1.795.725. 874.000 | 105% | Sangat Efektif |
| 35 | Kota Tegal | 987.244.23 6.619 | 989.073.09 7.000 | 100% | Efektif |

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 terdapat 23 kabupaten dan 3 kota yang memiliki presentase di atas 100%. Sedangkan sisanya yaitu 6 kabupaten dan 3 kota mendapatkan presentase dibawah 100%.

Tabel 4.18
 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah
 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.105.990. 272.337 | 2.083.397.04 6.500 | 101% | Sangat Efektif |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.434.925. 995.303 | 3.427.963.72 7.000 | 100% | Efektif |
| 3 | Kab. Batang | 1.769.958. 202.416 | 1.770.598.67 6.856 | 100% | Efektif |
| 4 | Kab. Blora | 2.240.970. 020.181 | 2.177.713.89 3.677 | 103% | Sangat Efektif |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.357.487. 210.573 | 2.310.937.25 0.000 | 102% | Sangat Efektif |
| 6 | Kab. Brebes | 3.096.826. 845.150 | 3.058.498.11 9.000 | 101% | Sangat Efektif |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.282.797. 966.311 | 3.182.182.70 5.300 | 103% | Sangat Efektif |
| 8 | Kab. Demak | 2.362.016. 248.793 | 2.184.187.68 1.000 | 108% | Sangat Efektif |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.581.437. 543.584 | 2.544.684.21 0.275 | 101% | Sangat Efektif |
| 10 | Kab. Jepara | 2.413.822. 993.348 | 2.312.890.29 9.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.179.409. 706.710 | 2.123.842.47 7.000 | 103% | Sangat Efektif |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.818.494. 983.541 | 2.805.865.49 1.000 | 100% | Efektif |
| 13 | Kab. Kendal | 2.228.384. 399.855 | 2.336.980.51 0.799 | 95% | Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 14 | Kab. Klaten | 2.689.353. 252.985 | 2.632.374.28 1.500 | 102% | Sangat Efektif |
| 15 | Kab. Kudus | 2.090.430. 364.413 | 1.714.031.19 9.000 | 122% | Sangat Efektif |
| 16 | Kab. Magelang | 2.575.439. 825.755 | 2.609.827.55 5.270 | 99% | Efektif |
| 17 | Kab. Pati | 2.838.881. 396.181 | 2.730.979.18 8.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.182.770. 952.456 | 2.298.856.13 6.800 | 95% | Efektif |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.636.036. 843.851 | 2.530.353.89 9.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.076.658. 114.142 | 2.057.234.74 7.000 | 101% | Sangat Efektif |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.172.436. 925.114 | 2.174.502.71 7.050 | 100% | Efektif |
| 22 | Kab. Rembang | 1.821.899. 884.311 | 1.785.139.50 6.071 | 102% | Sangat Efektif |
| 23 | Kab. Semarang | 2.311.149. 343.922 | 2.212.881.80 4.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 24 | Kab. Sragen | 2.300.826. 069.513 | 2.141.194.85 7.000 | 107% | Sangat Efektif |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.143.687. 569.516 | 1.969.651.84 6.000 | 109% | Sangat Efektif |
| 26 | Kab. Tegal | 2.755.677. 484.152 | 2.793.763.48 3.000 | 99% | Efektif |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.878.383. 823.682 | 1.842.970.48 6.344 | 102% | Sangat Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.442.677. 972.827 | 2.328.723.49 5.900 | 105% | Sangat Efektif |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.958.595. 025.572 | 1.887.241.26 6.214 | 104% | Sangat Efektif |
| 30 | Kota Magelang | 967.785.8 34.243 | 911.966.581. 000 | 106% | Sangat Efektif |
| 31 | Kota Pekalongan | 971.624.4 64.121 | 988.456.228. 000 | 98% | Efektif |
| 32 | Kota Salatiga | 928.019.8 99.150 | 913.296.914. 000 | 102% | Sangat Efektif |
| 33 | Kota Semarang | 4.565.340. 827.417 | 4.749.249.08 0.000 | 96% | Efektif |
| 34 | Kota Surakarta | 1.945.953. 241.924 | 1.928.886.72 8.000 | 101% | Sangat Efektif |
| 35 | Kota Tegal | 1.036.963. 763.529 | 1.043.670.05 7.000 | 99% | Efektif |

Pada tahun 2019 terdapat 21 kabupaten dan 3 kota yang memiliki presentase di atas 100% sedangkan sisanya yaitu 3 kabupaten dan 3 kota memiliki presentase dibawah 100%.

Tabel 4.19
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 1.994.604.10 6.561,00 | 2.168.786. 068.000 | 92% | Efektif |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.330.186.78 8.242,00 | 3.568.568. 763.744 | 93% | Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 3 | Kab. Batang | 1.733.087.89 3.276,46 | 1.840.617. 425.977 | 94% | Efektif |
| 4 | Kab. Blora | 2.127.946.96 1.535,00 | 2.169.237. 769.900 | 98% | Efektif |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.382.403.22 0.150,00 | 2.388.366. 025.000 | 100% | Efektif |
| 6 | Kab. Brebes | 3.008.370.71 7.507,14 | 3.129.412. 939.000 | 96% | Efektif |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.152.402.45 5.712,48 | 3.360.359. 382.281 | 94% | Efektif |
| 8 | Kab. Demak | 2.333.738.99 6.798,95 | 2.302.405. 766.000 | 101% | Sangat Efektif |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.528.884.13 1.946,00 | 2.612.712. 160.808 | 97% | Efektif |
| 10 | Kab. Jepara | 2.315.260.39 9.485,00 | 2.418.244. 390.000 | 96% | Efektif |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.121.386.17 9.225,00 | 2.225.308. 095.000 | 95% | Efektif |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.763.229.30 7.229,80 | 2.878.556. 768.000 | 96% | Efektif |
| 13 | Kab. Kendal | 2.131.449.78 4.048,00 | 2.337.475. 682.657 | 91% | Efektif |
| 14 | Kab. Klaten | 2.578.135.83 6.354,00 | 2.721.807. 486.100 | 95% | Efektif |
| 15 | Kab. Kudus | 2.016.176.98 6.239,00 | 1.810.667. 069.000 | 111% | Sangat Efektif |
| 16 | Kab. Magelang | 2.380.457.68 0.604,00 | 2.621.169. 424.000 | 91% | Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 17 | Kab. Pati | 2.662.375.43 7.006,00 | 2.786.249. 672.000 | 96% | Efektif |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.061.798.47 4.096,15 | 2.318.988. 832.870 | 89% | Cukup Efektif |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.449.008.57 7.285,00 | 2.581.626. 461.000 | 95% | Efektif |
| 20 | Kab. Purbalingga | 1.952.749.30 1.274,00 | 2.042.708. 319.000 | 96% | Efektif |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.166.947.74 7.648,00 | 2.297.741. 136.901 | 94% | Efektif |
| 22 | Kab. Rembang | 1.878.325.91 9.915,50 | 1.891.753. 253.706 | 99% | Efektif |
| 23 | Kab. Semarang | 2.211.273.52 4.265,97 | 2.362.080. 875.000 | 94% | Efektif |
| 24 | Kab. Sragen | 2.212.824.97 4.529,00 | 2.194.236. 966.584 | 101% | Sangat Efektif |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.040.394.76 1.328,00 | 2.039.440. 679.000 | 100% | Efektif |
| 26 | Kab. Tegal | 2.651.771.83 8.697,60 | 2.875.037. 755.000 | 92% | Efektif |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.830.848.45 3.347,00 | 1.921.489. 274.847 | 95% | Efektif |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.273.678.53 8.635,00 | 2.351.727. 836.675 | 97% | Efektif |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.878.995.66 6.418,00 | 1.935.748. 155.714 | 97% | Efektif |
| 30 | Kota Magelang | 946.188.761. 537,00 | 920.107.3 54.000 | 103% | Sangat Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 31 | Kota Pekalongan | 953.155.394. 614,95 | 981.361.4 82.000 | 97% | Efektif |
| 32 | Kota Salatiga | 890.223.683. 933,00 | 967.665.2 51.000 | 92% | Efektif |
| 33 | Kota Semarang | 4.400.500.83 8.480,00 | 5.093.441. 461.000 | 86% | Cukup Efektif |
| 34 | Kota Surakarta | 1.831.319.37 3.387,00 | 2.019.861. 148.959 | 91% | Efektif |
| 35 | Kota Tegal | 1.017.915.10 9.373,00 | 1.132.970. 758.000 | 90% | Cukup Efektif |

Pada tahun 2020 terdapat 25 kabupaten dan 3 kota yang persentasenya di bawah 100%. Sedangkan 3 kabupaten dan 1 kota persentasenya di atas 100%. Dan 3 kota memiliki persentase 89%, 86% dan 90%.

Tabel 4.20
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.086.059.7 42.250 | 2.109.230.3 97.160,00 | 99% | Efektif |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.487.722.9 00.410 | 3.568.385.3 11.183,00 | 98% | Efektif |
| 3 | Kab. Batang | 1.821.822.5 80.995 | 1.786.031.0 75.369,00 | 102% | Sangat Efektif |
| 4 | Kab. Blora | 2.227.065.2 70.461 | 2.134.712.0 00.000,00 | 104% | Sangat Efektif |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.430.235.2 08.978 | 2.263.727.5 02.000,00 | 107% | Sangat Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 6 | Kab. Brebes | 3.162.140.4 24.372 | 3.097.307.6 32.000,00 | 102% | Sangat Efektif |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.334.300.2 90.656 | 3.317.757.6 31.415,00 | 100% | Sangat Efektif |
| 8 | Kab. Demak | 2.365.244.7 59.686 | 2.320.606.2 98.834,00 | 102% | Sangat Efektif |
| 9 | Kab. Grobogan | 2.634.888.6 73.901 | 2.544.323.9 03.138,00 | 104% | Sangat Efektif |
| 10 | Kab. Jepara | 2.380.695.9 35.358 | 1.999.702.0 11.000,00 | 119% | Sangat Efektif |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.165.983.7 48.572 | 2.106.391.2 99.000,00 | 103% | Sangat Efektif |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.832.035.0 15.733 | 2.752.338.0 08.000,00 | 103% | Sangat Efektif |
| 13 | Kab. Kendal | 2.300.543.6 41.945 | 2.278.236.5 19.171,00 | 101% | Sangat Efektif |
| 14 | Kab. Klaten | 2.570.037.7 77.373 | 2.520.987.8 84.551,00 | 102% | Sangat Efektif |
| 15 | Kab. Kudus | 2.163.634.4 37.714 | 1.694.083.9 99.000,00 | 128% | Sangat Efektif |
| 16 | Kab. Magelang | 2.469.754.3 15.099 | 2.461.908.4 66.781,00 | 100% | Sangat Efektif |
| 17 | Kab. Pati | 2.725.202.3 50.660 | 2.736.238.6 07.000,00 | 100% | Efektif |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.078.543.5 12.922 | 2.240.324.8 77.404,00 | 93% | Efektif |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.605.029.8 36.438 | 2.548.177.0 15.000,00 | 102% | Sangat Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.054.843.6 44.547 | 1.975.765.7 02.000,00 | 104% | Sangat Efektif |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.290.242.9 67.778 | 2.227.598.2 50.685,00 | 103% | Sangat Efektif |
| 22 | Kab. Rembang | 1.911.328.5 05.019 | 1.766.048.4 67.000,00 | 108% | Sangat Efektif |
| 23 | Kab. Semarang | 2.417.282.7 70.158 | 1.996.141.6 92.000,00 | 121% | Sangat Efektif |
| 24 | Kab. Sragen | 2.336.721.7 27.716 | 2.104.054.3 55.242,00 | 111% | Sangat Efektif |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.119.633.3 70.538 | 1.954.129.1 47.000,00 | 108% | Sangat Efektif |
| 26 | Kab. Tegal | 2.862.559.3 66.052 | 2.771.456.7 23.000,00 | 103% | Sangat Efektif |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.971.005.9 90.029 | 1.890.486.2 77.894,00 | 104% | Sangat Efektif |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.303.564.8 98.937 | 2.303.664.8 58.286,00 | 100% | Efektif |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.967.781.0 49.592 | 1.898.206.4 73.829,00 | 104% | Sangat Efektif |
| 30 | Kota Magelang | 994.366.987 .776 | 907.280.96 2.000,00 | 110% | Sangat Efektif |
| 31 | Kota Pekalongan | 966.372.557 .051 | 937.933.18 6.000,00 | 103% | Sangat Efektif |
| 32 | Kota Salatiga | 946.191.087 .524 | 928.511.97 1.000,00 | 102% | Sangat Efektif |
| 33 | Kota Semarang | 4.822.887.2 81.737 | 4.760.117.1 65.040,00 | 101% | Sangat Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 34 | Kota Surakarta | 1.939.268.8 56.769 | 1.938.004.4 41.798,00 | 100% | Sangat Efektif |
| 35 | Kota Tegal | 1.030.986.5 10.449 | 1.110.518.1 97.000,00 | 93% | Efektif |

Berdasarkan tabel perhitungan rasio efektivitas di atas dapat diketahui bahwa 24 kabupaten dan 5 kota memiliki rasio di atas 100% sedangkan sisanya yaitu 5 kabupaten dan 1 kota memiliki presentase dibawah 100%.

Tabel 4.21
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1 | Kab. Banjarnegara | 2.044.546. 403.305 | 2.104.392. 063.000 | 97% | Efektif |
| 2 | Kab. Banyumas | 3.426.408. 181.664 | 3.567.598. 307.620 | 96% | Efektif |
| 3 | Kab. Batang | 1.750.957. 035.202 | 1.769.326. 979.259 | 99% | Efektif |
| 4 | Kab. Blora | 2.176.850. 305.646 | 2.089.649. 657.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 5 | Kab. Boyolali | 2.372.372. 551.015 | 2.272.481. 438.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 6 | Kab. Brebes | 2.989.821. 990.874 | 3.014.349. 829.000 | 99% | Efektif |
| 7 | Kab. Cilacap | 3.293.132. 139.343 | 3.330.360. 621.060 | 99% | Efektif |
| 8 | Kab. Demak | 2.402.717. 869.624 | 2.345.448. 116.898 | 102% | Sangat Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 9 | Kab. Grobogan | 2.588.637. 777.477 | 2.520.351. 860.000 | 103% | Sangat Efektif |
| 10 | Kab. Jepara | 2.326.937. 014.364 | 2.414.976. 267.000 | 96% | Efektif |
| 11 | Kab. Karanganyar | 2.251.540. 154.854 | 2.109.035. 040.500 | 107% | Sangat Efektif |
| 12 | Kab. Kebumen | 2.847.196. 017.404 | 2.746.032. 917.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 13 | Kab. Kendal | 2.265.353. 924.690 | 2.440.165. 813.709 | 93% | Efektif |
| 14 | Kab. Klaten | 2.587.693. 432.935 | 2.502.398. 613.635 | 103% | Sangat Efektif |
| 15 | Kab. Kudus | 2.078.759. 801.863 | 1.966.922. 958.000 | 106% | Sangat Efektif |
| 16 | Kab. Magelang | 2.558.024. 177.090 | 2.552.382. 081.413 | 100% | Sangat Efektif |
| 17 | Kab. Pati | 2.705.053. 757.861 | 2.690.543. 064.000 | 101% | Sangat Efektif |
| 18 | Kab. Pekalongan | 2.074.624. 015.397 | 2.215.434. 954.546 | 94% | Efektif |
| 19 | Kab. Pemalang | 2.493.418. 191.423 | 2.429.931. 663.000 | 103% | Sangat Efektif |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2.022.884. 629.933 | 2.020.295. 478.000 | 100% | Sangat Efektif |
| 21 | Kab. Purworejo | 2.185.997. 980.027 | 2.324.885. 307.142 | 94% | Efektif |
| 22 | Kab. Rembang | 1.841.484. 139.353 | 1.874.516. 280.000 | 98% | Efektif |

| No | Kabupaten/ Kota | Realisasi | Anggaran | Efektivitas | Kriteria |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 23 | Kab. Semarang | 2.337.453. 499.457 | 2.443.240. 982.000 | 96% | Efektif |
| 24 | Kab. Sragen | 2.177.840. 072.042 | 2.152.620. 896.665 | 101% | Sangat Efektif |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 2.014.818. 262.391 | 1.893.440. 960.000 | 106% | Sangat Efektif |
| 26 | Kab. Tegal | 2.743.700. 525.564 | 2.690.855. 033.000 | 102% | Sangat Efektif |
| 27 | Kab. Temanggung | 1.895.483. 914.078 | 1.885.886. 801.040 | 101% | Sangat Efektif |
| 28 | Kab. Wonogiri | 2.262.263. 891.811 | 2.198.134. 332.793 | 103% | Sangat Efektif |
| 29 | Kab. Wonosobo | 1.921.189. 093.169 | 1.934.230. 518.694 | 99% | Efektif |
| 30 | Kota Magelang | 985.763.7 98.066 | 819.257.7 01.625 | 120% | Sangat Efektif |
| 31 | Kota Pekalongan | 989.013.0 74.926 | 956.875.2 57.000 | 103% | Sangat Efektif |
| 32 | Kota Salatiga | 918.353.7 79.916 | 879.372.4 34.000 | 104% | Sangat Efektif |
| 33 | Kota Semarang | 4.969.436. 543.013 | 5.337.927. 420.000 | 93% | Efektif |
| 34 | Kota Surakarta | 2.028.438. 691.046 | 2.135.619. 961.790 | 95% | Efektif |
| 35 | Kota Tegal | 1.042.635. 845.201 | 1.085.069. 119.000 | 96% | Efektif |

Berdasarkan tabel perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 17 kabupaten dan 3 kota yang masuk memiliki hasil presentase di atas 100% sedangkan 12 kabupaten dan 3 kota memiliki presentase dibawah 100%.

E. Pembahasan Analisis *Value for Money* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Menurut Keputusan Menteri dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 dalam Mahbengi (2017) terdapat 3 kriteria ekonomis yaitu (1) apabila presentase kinerja lebih dari 100% maka masuk ke dalam kategori tidak ekonomis, (2) apabila presentasinya 100% maka masuk ke dalam kategori ekonomis berimbang, dan (3) apabila presentasinya kurang dari 100% maka akan masuk ke dalam kategori ekonomis.

Menurut Komada (2021) terdapat 5 kriteria efektivitas adalah sebagai berikut (1) apabila presentase kinerja di atas 100% keatas maka masuk ke dalam kategori sangat efektif (2) apabila presentase perhitungnya antara 90%-100% maka dikategorikan efektif (3) apabila presentasinya antara 80%-90% masuk ke dalam kategori cukup efektif (4) apabila presentasinya antara 60-80% maka dikategorikan kurang efektif dan (5) apabila kurang dari 60% maka masuk ke dalam kategori tidak efektif.

Menurut Komada (2021) kriteria efisiensi yaitu sebagai berikut (1) Apabila rasio yang dihasilkan dari perhitungan adalah kurang dari 60% maka dikategorikan sangat efisien (2) Apabila hasil dari perhitungan rasio efisiensi adalah 60%-80% maka dikategorikan efisien (3) apabila hasil perhitungannya

adalah antara 80%-90% maka dikategorikan cukup efisien, (4) Apabila presentasinya adalah 90%-100% maka dikategorikan kurang efisien, dan yang terakhir adalah (5) apabila presentasinya lebih dari 100% maka dikategorikan tidak efisien.

1. Tahun 2018

a. Ekonomis

Pada tahun 2018 terdapat 20 kabupaten dan 4 kota dengan nilai perhitungan ekonomis di bawah 100%, berdasarkan kriteria ekonomis maka dapat dikatakan bahwa 20 kabupaten dan 4 kota di Jawa Tengah ini dikategorikan ekonomis. Hal ini mengartikan bahwa kabupaten dan kota tersebut telah berhemat anggaran. Selain itu 8 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai perhitungan lebih dari 100% dan dikategorikan tidak ekonomis artinya realisasi belanja yang dikeluarkan oleh 8 kabupaten tersebut melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir terdapat 2 kabupaten dan 2 kota yang nilai perhitungannya sebesar 100%, sesuai dengan kriteria ekonomis maka anggaran pada 2 kota dan kabupaten ini dinyatakan ekonomis berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 4 daerah tersebut sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan.

b. Efisien

Pada tahun 2018 terdapat 11 kabupaten dan 4 kota yang hasil perhitungan rasio efisiensinya lebih dari 100%, sesuai dengan

kriteria maka dikategorikan bahwa kinerja keuangannya tidak efektif. Kemudian terdapat 18 kabupaten dan 2 kota yang persentasenya kurang dari dan sama dengan 100% dikategorikan ke dalam kategori kurang efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum bisa memenuhi target efisiensi yaitu adanya penggunaan belanja yang minimal untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal.

c. Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi di Jawa Tengah terdapat 23 kabupaten dan 3 kota yang persentasenya lebih dari 100% maka dikategorikan sangat efektif. Sementara itu 6 kabupaten dan 3 kota memiliki persentase kurang dari 100% dan termasuk ke dalam kategori efektif. Pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari target belanja yang diterima. Dapat dikatakan bahwa perhitungan kinerja menggunakan rasio efektivitas pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2018 dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

2. Tahun 2019

a. Ekonomis

Pada tahun 2019 terdapat 19 kabupaten dan 6 kota yang rasionya kurang dari 100%, sesuai dengan kriteria yang ada maka kinerja keuangan kabupaten dan kota tersebut dikategorikan ke dalam ekonomis. Sementara itu terdapat 4 kabupaten hasil perhitungannya sama dengan 100%, artinya 4 kabupaten tersebut termasuk ke dalam kategori ekonomis berimbang. Namun pada tahun tersebut terdapat juga 6 kabupaten yang hasil perhitungan rasio ekonomisnya lebih dari 100% yang artinya 6 kabupaten tersebut memiliki kinerja keuangan yang tidak ekonomis. Secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah yang baik karena termasuk ke dalam kategori ekonomis.

b. Efisiensi

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dapat diketahui terdapat 11 kabupaten dan 5 kota yang persentasenya lebih dari 100% sehingga dikategorikan tidak efisien sedangkan 18 kabupaten dan 1 kota memperoleh persentase kurang dari dan sama dengan 100% mendapatkan kategori kurang efisien. Hal ini diartikan bahwa Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam kategori tidak ekonomis karena lebih dari 50% kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah persentase efisiensinya lebih dari 100%. Hal ini diartikan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran untuk mencapai target yang dicapai.

c. Efektivitas

Pada tahun 2019 terdapat 23 kabupaten dan 3 kota yang nilai rasionya lebih dari 100% sehingga dikategorikan ke dalam kategori sangat efektif. Sementara itu terdapat 5 kabupaten dan 3 kota yang persentasenya berada di antara 90%- 100% dan dikategorikan efektif. Sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dikatakan efektif dan sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

3. Tahun 2020

a. Ekonomis

Pada tahun 2020 terdapat 28 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah yang hasil perhitungan persentasenya berada di bawah 100% yang mana sesuai dengan kriteria ekonomis maka dikategorikan ekonomis sedangkan 1 kabupaten yaitu kabupaten Kudus nilai persentase ekonomisnya adalah 100% dan masuk kategori ekonomis berimbang. Ditahun 2020 adalah dimana Indonesia bertahan dalam melawan virus Corona-19 sehingga pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah lebih menghemat dana dalam pembelanjannya.

b. Efisiensi

Pada tahun 2020 terdapat 25 kabupaten dan 2 kota yang hasil perhitungan rasio efisiensinya berada diantara 90%- 100% dan masuk kedalam kategori kurang efisien sedangkan 4 kabupaten dan 2 kota rasionya lebih dari 100% dikategorikan tidak efisien, sementara itu 2 kota presentasinya berada diantara 80%- 90% sehingga masuk ke dalam kategori cukup efisien. Namun jika dirata- rata secara keseluruhan maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam kategori tidak efisien karena dari presentase keseluruhan anggaran dan realisasi kabupaten dan kota menghasilkan angka 101% yang mana jika dikategorikan sesuai dengan kriteria maka termasuk ke dalam kategori tidak efektif. Hal ini berarti bahwa Provinsi Jawa Tengah belum mampu mengefisienkan pengeluaran untuk mencapai target yang ingin dicapai

c. Efektivitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 25 kabupaten dan 3 kota yang presentasinya berada diantara 90%- 100% dan dikategorikan dalam kriteria efektif. Sedangkan 3 kabupaten dan 1 kota memiliki presentase di atas 100% sehingga masuk kedalam kategori sangat efektif. Selanjutnya terdapat 3 kota yang presentasinya kurang dari 90% dan dikategorikan cukup efektif. Secara keseluruhan Provinsi

Jawa Tengah masuk ke dalam kategori dengan rata-rata persentasenya 90%. Hal ini memberikan pernyataan bahwa kinerja Provinsi Jawa Tengah walaupun mengalami penurunan namun tetap bertahan di masa pandemi dengan cukup efektif dan sudah cukup berhasil dalam menjalankan program kerjanya.

4. Tahun 2021

a. Ekonomis

Pada tahun 2021 terdapat 23 kabupaten dan 6 kota yang persentasenya kurang dari 100% jika disesuaikan dengan kriteria dimasukkan ke dalam kategori ekonomis yang mana berarti kabupaten tersebut sudah mampu menghemat anggaran yang digunakan dalam pembelanjaan. Selain itu 3 kabupaten masuk ke dalam kategori tidak ekonomis karena persentasenya lebih dari 100%, hal ini mengartikan 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah belum mampu untuk menghemat dana atau realisasi belanjanya lebih besar dari pada anggaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu 3 kabupaten di tahun 2020 memiliki presentase 100% yang dikategorikan ekonomis berimbang dan diartikan data merealisasikan belanja sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini secara keseluruhan Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk ke dalam kategori ekonomis dengan presentase 95% hal ini menyatakan kinerja ekonomis Provinsi Jawa Tengah naik dari pada tahun sebelumnya.

b. Efisiensi

Sesuai dengan perhitungan maka dapat diperoleh 27 kabupaten dan 4 kota yang persentasenya antara 90%- 100% sehingga dikategorikan kurang efisien. Kemudian terdapat 2 kabupaten yang persentasenya antara 80%-90% sehingga dikategorikan cukup efisien, namun 2 kota lebih dari 100% sehingga dikategorikan tidak efisien. Secara keseluruhan Provinsi Jawa Tengah masih dalam kategori kurang efisien sehingga dapat dinyatakan pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah masih belum mampu mengefisienkan belanja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar.

c. Efektivitas

Pada tahun 2021 terdapat 24 kabupaten dan 5 kota yang hasil perhitungannya lebih dari 100% artinya 29 wilayah di Provinsi Jawa Tengah tersebut sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah dapat memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2021 ini terdapat pula 5 kabupaten dan 1 kota yang persentasenya kurang dari 100% sehingga dikategorikan ke dalam kategori efektif, Sehingga dinyatakan bahwa pada tahun 2021 tingkat efektivitas anggaran milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah efektif dengan rata-rata persentase efektivitasnya adalah 99% dan mampu menjalankan program kerjanya, sehingga realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

5. Tahun 2022

a. Ekonomis

Sesuai dengan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui pada tahun 2022 terdapat 18 kabupaten dan 3 kota yang persentasenya berada di bawah 100%, sesuai kriteria dimasukkan ke dalam kategori ekonomis sehingga dapat diketahui pada kabupaten dan kota tersebut dapat menghemat dana dalam penggunaan anggarannya. Selanjutnya 9 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Jawa Tengah persentasenya di atas 100% sehingga dikategorikan tidak ekonomis dan belum mampu menghemat anggaran. Selain itu 2 kota mendapatkan persentase rasio ekonomis 100% sehingga masuk dalam kategori ekonomis seimbang dan memiliki arti bahwa pemerintah daerah dapat merealisasikan belanja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Efisiensi

Pada tahun 2022 terdapat 20 kabupaten dan 5 kota yang hasil perhitungan efisiensinya berada di atas 100% sehingga dikategorikan tidak efisien, sementara itu 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jawa Tengah yang persentase efisiensinya berada di antara 90-100% sehingga kategorinya masuk ke dalam kurang efisien. Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan perbandingan realisasi belanjanya dan realisasi pendapatannya masih berada di Tingkat 99% terealisasi sehingga sesuai dengan

kriteria efisiensi masuk ke dalam kategori kurang efisien, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya belanja yang besar tidak selalu memberikan pendapatan yang besar.

c. Efektivitas

Pada tahun 2022 terdapat 17 kabupaten dan 3 kota yang hasil perhitungan rasio efektivitasnya berada di atas 100% sehingga dikategorikan sangat efektif sedangkan 12 kabupaten dan 3 kota nilai rasio efektivitasnya berada di antara 90-100% sehingga dikategorikan efektif. Dapat diaktakan pada tahun 2022 Provinsi Jawa memiliki rata-rata nilai efektivitas berada di presentase 99% dan masuk ke dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah sudah mampu mencapai tujuannya dan dapat dikatakan telah berjalan secara efektif.

Sementara itu jika menggunakan data laporan realisasi anggaran secara keseluruhan milik Provinsi Jawa Tengah akan diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 4.22
Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

| Tahun | Belanja Daerah | | Rasio Ekonomis | Kriteria |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| 2018 | 24.993.659.858.000 | 24.478.632.557.339 | 98% | Ekonomis |
| 2019 | 26.632.340.745.000 | 26.151.062.842.457 | 98% | Ekonomis |
| 2020 | 29.026.574.743.000 | 25.651.740.349.991 | 88% | Ekonomis |
| 2021 | 27.190.833.343.000 | 25.843.800.193.834 | 95% | Ekonomis |
| 2022 | 24.589.868.689.000 | 23.950.240.497.405 | 97% | Ekonomis |

Berdasarkan tabel 4.22, hasil pengukuran kinerja menggunakan tingkat ekonomis menunjukkan bahwa keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikatakan ekonomis karena dari tahun 2018 hingga 2022 tingkat ekonomis Provinsi Jawa Tengah berada di kisaran 88% hingga 98%. Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 belanja yang dianggarkan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk mer-realisasikan seluruh belanja yang dianggarkan.

Dari unsur anggaran belanja yang paling banyak memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional dan di setiap tahunnya belanja operasional yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja pegawai. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis. Ekonomis dengan meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dari segi rasio ekonomis memberikan hasil kinerja keuangan yang baik. Hal ini didukung oleh teori stewardship di mana pemerintah sebagai steward akan mementingkan kepentingan masyarakat (principal) dari pada kepentingan pribadi. Kinerja keuangan yang ekonomis akan menciptakan kinerja keuangan yang baik, sebab adanya tanggungjawab dalam proses pengelolaan anggaran yang memungkinkan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan pemborosan. Menurut Tsabita Ananda Mardhiah semakin kecil rasio ekonomis yang dihasilkan maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumagit, Karamoy, dan Afandi (2022) yaitu rasio ekonomis tergolong ekonomis karena rasionya adalah 89%.

Tabel 4.23
Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

| Tahun | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Rasio Efisiensi | Kriteria |
|-------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 2018 | 24.478.632.557.339 | 24.702.318.190.582 | 99% | Kurang Efisien |
| 2019 | 26.151.062.842.457 | 25.859.780.137.936 | 101% | Tidak Efisien |
| 2020 | 25.651.740.349.991 | 25.393.735.934.148 | 101% | Tidak Efisien |
| 2021 | 25.843.800.193.834 | 26.633.000.085.963 | 97% | Kurang Efisien |
| 2022 | 23.950.240.497.405 | 24.167.935.634.127 | 99% | Kurang Efisien |

Pada tahun 2018 kriteria efisiensi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam kategori kurang efisien karena rasionya adalah 99% sedangkan tahun 2019 dan 2020 rasionya meningkat 2% yaitu menjadi sebesar 101% sehingga masuk kedalam kategori tidak efisien. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 rasionya kembali menurun mejadi dibawah 100% yaitu pada tahun 2021 menjadi 97% dan tahun 2022%. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari sisi rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kurang baik, dikarenakan hasil rasio efisiensinya menunjukkan bahwa kinerja keuanganya masuk kategori kurang efisien. Hal ini tidak selaras dengan teori stewardship yang menekankan bahwa pemerintah sebagai steward bertindak sebagai pengelola yang bertanggungjawab untuk menggunakan sumber daya secara optimal. Hal ini berhubungan dengan rasio efisiensi yang mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk mencapai output.

Menurut Tsabita Ananda Mardhiah semakin kecil rasio efisiensi yang dihasilkan maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Dengan Adaya hasil perhitungan efisiensi yang masih besar menunjukkan bahwa antara perbandingan belanja daerah dengan pendapatan daerah tidak terlalu besar dan menunjukkan bahwa belanja yang besar tidak dapat menghasilkan pendapatan daerah yang besar juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sampow dan Pangkey (2022) dengan hasil rasio efisiensinya yang tergolong kurang efisien.

Tabel 4.24
Ringkasan Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

| Tahun | Pendapatan | | Efektivitas | Kriteria |
|-------|------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| 2018 | 24.413.659.858. 000 | 24.702.318.190. 582 | 101% | Sangat Efektif |
| 2019 | 25.965.581.322. 000 | 25.859.780.137. 936 | 100% | Efektif |
| 2020 | 28.301.075.368. 000 | 25.393.735.934. 148,00 | 90% | Cukup Efektif |
| 2021 | 26.840.833.343. 000 | 26.633.000.085. 963 | 99% | Efektif |
| 2022 | 24.303.739.912. 000 | 24.167.935.634. 127 | 99% | Efektif |

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari rasio efektivitas sudah dapat dikatakan baik dan efektif. Pada tahun 2018 pengukuran efektivitas milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam kriteria sangat efektif sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 mengalami penurunan 1% dan masuk ke dalam kriteria efektif. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 10% dan masuk kedalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2021 rasio efektivitas pemerintah provinsi jawa tengah kembali mengalami dan tahun 2022 persentasenya tetap sama yaitu 99% dan dikategorikan ke dalam kriteria efektif.

Berdasarkan penelitian, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dianggap baik, dikarenakan hasil dari pengukuran kinerja menunjukkan hasil kinerja yang efektif. Hal ini didukung teori stewardship dimana pemerintah sebagai

steward akan mementingkan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi. Teori steward menekankan bahwa pemerintah (steward) bertanggungjawab untuk mencapai hasil yang optimal bagi Masyarakat. Rasio efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, yang mana hal tersebut mencerminkan tanggungjawab tersebut. Menurut Tsabita Ananda Mardhiah semakin besar rasio efektivitas yang dihasilkan maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh L. A. Karina dan Ramadhani (2022) dan Aulia dan Nugraheni (2022) yaitu dengan hasil rasio efektivitasnya tergolong efektif karena presentase rasionya adalah 97%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018- 2022, 66% kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah bersifat ekonomis
2. Pada tahun 2018- 2022, 58% kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah bersifat kurang efisien, sedangkan 40% tidak efisien dan 2% cukup efisien
3. Pada tahun 2018- 2022, 59% kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah sudah efektif
4. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan konsep *Value for Money* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masih belum sepenuhnya baik, dikarenakan salah satu indikator pengukurannya yaitu rasio efisiensi masih tergolong kurang efisien disebabkan karena perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah yang kurang signifikan yang menyebabkan presentase rasio efisensinya berada diangka 97-101% dan tergolong kurang efisien, sedangkan rasio ekonomis dan rasio efektivitas nya baik karena masing-masing tergolong kategori ekonomis dan efektif.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih menggunakan satu provinsi dalam penelitian sehingga Diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan pada dua objek provinsi yang berbeda,

sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk kemajuan kinerja keuangan sektor publik di Indonesia.

2. Masih minimnya hasil riset terdahulu yang meneliti menggunakan setiap kabupaten dalam untuk menarik satu Kesimpulan hasil dalam satu provinsi.
3. Rasio yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan hanya memuat 3 rasio, sehingga diupayakan agar peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan rasio pengukuran yang digunakan.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah sehingga kedepannya dapat meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan dan akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

2. Implikasi Teoritis

Berkontribusi berupa menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui 3 elemen pokok yaitu rasio ekonomis, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Dari ketiga elemen tersebut menghasilkan kinerja keuangan yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah daerah selaku pengelola keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, M. S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, & S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., and R. R. (Istiqomah. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*).
- Andaresya, Iqva. 2022. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah." Universitas Komputer Indonesia.
- Anynda, Nur Shafira, and Suwardi Bambang Hermanto. 2020. "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9 (10): 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3690/3705/>.
- Asep Risman, and Matrodji Mustaffa. 2023. "LITERASI KEUANGAN BAGI UMKM: Laporan Keuangan Untuk Pengembangan Usaha UMKM." *Jurnal Abdimas Perbanas* 4 (1): 20–27. <https://doi.org/10.56174/jap.v4i1.521>.
- Aulia, Erlinda Nur, and Agustina Prativi Nugraheni. 2022. "Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2 (6): 413–20. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>.
- Badan Pusat Statistik. n.d. "Potret Kemiskinan Jawa Tengah Maret 2022." <https://jateng.beta.bps.go.id/id/infographic?id=918>.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Edited by Fika Megawati. Cetakan pe. Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA.
- Bilqis, Husnun Karina, and Nuwun Priyono. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020." *Jurnal Economina* 2 (2): 612–21. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>.
- Deasy Ervina, Siti Mu'alimah. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Tuban Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Finance and Accounting Studies* 5 (2): 1–9.
- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Herianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Destiningsih, Rian, Andhatu Achasa, and Yustirania Septiani. 2019. "Analisis Potensi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus: Tahun 2010-2016)." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4 (1): 73–86. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>.
- Dharma, Dias Adi, Djunaidy Djunaidy, Prisila Damayanty, Mala Sitianingsih, Septiana Rindika Putri, and Thoha Solehudin. 2023. "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kecamatan Tapos - Kota Depok." *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6 (2): 216–23. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3082>.
- Dinanty, Dara Nadeya, Nur Ainiyah, Hartono, and Nurdiana Fitri Isnaini. 2023. "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021." *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 3 (4): 173-183 e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428.
- Esislahyenti, Wahyu Indah Mursalini, and Netti Indrawati. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (3): 26454–65. <https://doi.org/2614-6754>.
- Fadillah, Riyan Musofadillah, Khusnik Hudzafidah, and Trivosa Aprilia Novadiani Haidiputri. 2023. "Analisis Metode Value For Money Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo." *JUMAD: Journal Management, Accounting, & Digital Business* 1 (2): 161–70. <https://doi.org/10.51747/jumad.v1i2.1352>.
- Fitra, Halkadri. 2019. *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Edited by Yorim N Lasboi. Cetakan Pe. Malang: CV IRDH.
- Hakiki, Raka Mahyudin. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money Di Kota Mojokerto."
- Harahap, Heri Faisal. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (1): 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Hasibuan, M. R. 2001. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosures) Dalam Laporan Tahunan Emitmen Di Bursa Efek Jakarta Dan Bursa Efek Surabaya."
- Jacson, Ricky. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Kabupaten Sleman." Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

- Karina, Luthfia Ayu, and Wahyu Ramadhani. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *Value* 2 (2): 71–82. <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>.
- Karina, Nisfi Nova, and Puji Wibowo. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi* 14 (2): 146–66. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>.
- Komada, Fitri Dwi. 2021. "Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020 Bogor Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020 Skripsi," 1–145.
- Kurnia Mayasari, Fitri. 2024. "Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dan Ketergantungan Pada Dana Pusat." Kompas.Com. 2024. <https://www.kompasiana.com/fitrikurniamayasari4198/662f2b50de948f04af2cdf33/defisit-anggaran-pemerintah-kabupaten-pasuruan-dan-ketergantungan-pada-dana-pusat>.
- Kusumawati, Nugrahini, and Raden Irna Afriani. 2017. "16. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang." *Jurnal Akuntansi* 4 (2): 1–11.
- Lastari, Er Fiana. 2020. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Value for Money (Studi Pada Provinsi D.I. Yogyakarta Periode Tahun 2015 - 2019)."
- M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab. 2020. "Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2 (5): 728–40.
- Mahbengi, Syahri. 2017. "Analisis Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muttaqin. n.d. "7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Jenis, Komponen, Unsur)." Muttaqin ID.
- Naffa Litauji, Milla. 2021. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kramat." Politeknik Harapan Bersama Tegal.

- Naibaho, D.Y. 2023. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi." Universitas Hindu Negeri.
- Nasir, Munawir, Jafar Basalamah, and Moh Zulkifli Murfat. 2020. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai." *Jurnal Akrab Juara* 1 (April): 1–11. <https://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1001>.
- Polii, I R A, D P E Saerang, and S J Tangkuman. 2020. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 8 (4): 781–88.
- Putri Nurafifah, Indah, Haliah Haliah, and Nirwana Nirwana. 2022. "Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 2 (2): 56–71. <https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.170>.
- Rumagit, Intan Bella Putri, Herman Karamoy, and Dhullo Afandi. 2022. "Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 17 (1): 13–22.
- Sahrini Nasution, Alviana, Fauzi Arif Lubis, and Rahmat Daim Harahap. 2023. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 6 (1): 26454–65.
- Sampow, Richardo Rafael, and Royke I.J Pangkey. 2022. "Value for Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 3 (2): 261–71.
- Samukri, and Rio Gusherinsyah. 2020. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi* 9 (1): 58–68.
- Sanjaya, Dika Husni, and Maswar Patuh Priyadi. 2019. "Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset ...* 8 No.12: 1–16.
- Sari, Berti Indah, and Halma Wati. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3 (1): 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>.

- Sari, G Yulia Novita, Satria Tri Nanda, Ika Berty, and Raisya Zenita. 2022. "Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5 (1): 56–65.
- Sari Hardiyanto, Diva Lutfiana Putri. 2023. "10 Provinsi Termiskin Di Indonesia." *Kompas.Com*, 2023. 10 Provinsi Termiskin di Indonesia 2023, Mana Saja?%0A%0AKlik untuk baca:%0Ahttps://www.kompas.com/tren/read/2023/10/14/103000165/10-provinsi-termiskin-di-indonesia-2023-mana-saja-?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop%0A%0AKompa.
- Sari Nasution, Adinda. 2021. "ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU)*. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>
- Sholikhah, Isnah Mar'atus, and Novi Khoiriawati. 2022. "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money." *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting* 4 (1): 38–54. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4132>.
- Sibarani, A. 2023. "Analisis Kinerja Pada Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Batu Utara." *Universitas Hindu Sugiwa*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>.
- Sita, Erika Rihlitas. 2022. "Penerapan Atas Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMC Kediri." *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Sugiyono. 2016a. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2016b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriadi. 2013. "Pembiayaan Defisit Dengan Utang Dan Ketahanan Fiskal Di Indonesia." *The Winners* 14 (2): 127.

- Suryanto, Agus, and Refianto. 2019. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Bina Manajemen* 8 (1): 1–33.
- Syam, Fahriansyah, and Ahmad Zulfikar. 2022. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 2 (2): 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>.
- Ulum, Muhammad Bahrul, and Ayu Geby Gisela Syaputri. 2021. "Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Di Sumatera Selatan." *Mbia* 20 (2): 111–22. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383>.
- Utari, Rini, Anisa Nursyabani, Hurun In, Royke Bahagia Rizka, Sandy, and Kurniawan. 2023. "No Title ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DILIHAT DARI RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN RASIO EFEKTIFITAS." *Jurnal Eko-Bisma* 2 (2): 204–11.
- Walandouw, Stanley, Jantje Tinangon, and Astria Dien. 2019. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3 (1): 534–41.
- Widianti, I Gusti Ayu, Nur Fitriyah, and Adhitya Bayu S. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kota Mataram." *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 7 (1): 1–13. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i1.1464>.
- Yaman, Afdhal. 2022. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta: Pendekatan Value for Money Dan Rasio Keuangan." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (01): 50–66. <https://doi.org/10.33477/eksy.v4i01.3220>.
- Yesica Lola, Arlinda. 2016. "Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya." STIE PERBANAS SURABAYA. <http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/1038>.

LAMPIRAN

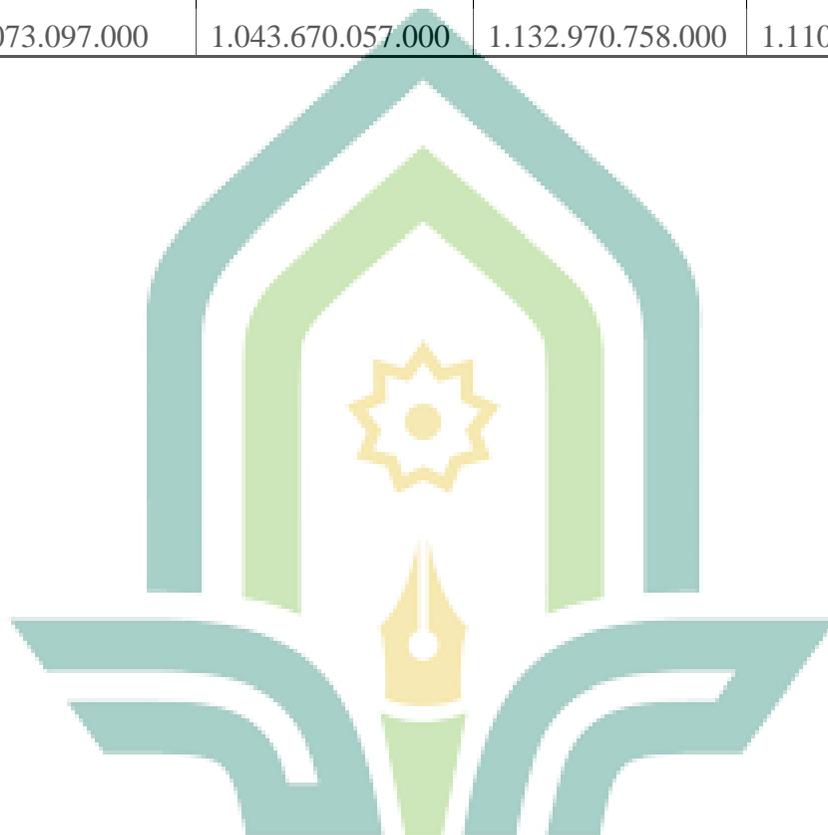
1. Lampiran 1: Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2022

| No | Kab/Kota | Anggaran Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kab. Banjarnegara | 2.005.944.976.500 | 2.083.397.046.500 | 2.168.786.068.000 | 2.109.230.397.160 | 2.104.392.063.000 |
| 2. | Kab. Banyumas | 3.257.004.283.785 | 3.427.963.727.000 | 3.568.568.763.744 | 3.568.385.311.183 | 3.567.598.307.620 |
| 3. | Kab. Batang | 1.654.999.295.702 | 1.770.598.676.856 | 1.840.617.425.977 | 1.786.031.075.369 | 1.769.326.979.259 |
| 4. | Kab. Blora | 2.122.662.345.677 | 2.177.713.893.677 | 2.169.237.769.900 | 2.134.712.000.000 | 2.089.649.657.000 |
| 5. | Kab. Boyolali | 2.190.553.226.000 | 2.310.937.250.000 | 2.388.366.025.000 | 2.263.727.502.000 | 2.272.481.438.000 |
| 6. | Kab. Brebes | 2.814.882.461.000 | 3.058.498.119.000 | 3.129.412.939.000 | 3.097.307.632.000 | 3.014.349.829.000 |
| 7. | Kab. Cilacap | 2.948.915.191.000 | 3.182.182.705.300 | 3.360.359.382.281 | 3.317.757.631.415 | 3.330.360.621.060 |
| 8. | Kab. Demak | 1.958.433.585.400 | 2.184.187.681.000 | 2.302.405.766.000 | 2.320.606.298.834 | 2.345.448.116.898 |
| 9. | Kab. Grobogan | 2.397.669.340.501 | 2.544.684.210.275 | 2.612.712.160.808 | 2.544.323.903.138 | 2.520.351.860.000 |
| 10. | Kab. Jepara | 2.120.764.886.000 | 2.312.890.299.000 | 2.418.244.390.000 | 1.999.702.011.000 | 2.414.976.267.000 |

| No | Kab/Kota | Anggaran Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11. | Kab. Karanganyar | 2.053.585.660.000 | 2.123.842.477.000 | 2.225.308.095.000 | 2.106.391.299.000 | 2.109.035.040.500 |
| 12. | Kab. Kebumen | 2.647.019.919.000 | 2.805.865.491.000 | 2.878.556.768.000 | 2.752.338.008.000 | 2.746.032.917.000 |
| 13. | Kab. Kendal | 2.077.470.339.700 | 2.336.980.510.799 | 2.337.475.682.657 | 2.278.236.519.171 | 2.440.165.813.709 |
| 14. | Kab. Klaten | 2.512.253.142.500 | 2.632.374.281.500 | 2.721.807.486.100 | 2.520.987.884.551 | 2.502.398.613.635 |
| 15. | Kab. Kudus | 1.740.415.531.000 | 1.714.031.199.000 | 1.810.667.069.000 | 1.694.083.999.000 | 1.966.922.958.000 |
| 16. | Kab. Magelang | 2.355.843.093.000 | 2.609.827.555.270 | 2.621.169.424.000 | 2.461.908.466.781 | 2.552.382.081.413 |
| 17. | Kab. Pati | 2.540.695.960.000 | 2.730.979.188.000 | 2.786.249.672.000 | 2.736.238.607.000 | 2.690.543.064.000 |
| 18. | Kab. Pekalongan | 2.136.445.642.800 | 2.298.856.136.800 | 2.318.988.832.870 | 2.240.324.877.404 | 2.215.434.954.546 |
| 19. | Kab. Pemasang | 2.187.037.545.000 | 2.530.353.899.000 | 2.581.626.461.000 | 2.548.177.015.000 | 2.429.931.663.000 |
| 20. | Kab. Purbalingga | 1.959.697.520.000 | 2.057.234.747.000 | 2.042.708.319.000 | 1.975.765.702.000 | 2.020.295.478.000 |
| 21. | Kab. Purworejo | 1.716.967.116.415 | 2.174.502.717.050 | 2.297.741.136.901 | 2.227.598.250.685 | 2.324.885.307.142 |
| 22. | Kab. Rembang | 1.760.297.103.655 | 1.785.139.506.071 | 1.891.753.253.706 | 1.766.048.467.000 | 1.874.516.280.000 |

| No | Kab/Kota | Anggaran Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 23. | Kab. Semarang | 2.079.502.418.000 | 2.212.881.804.000 | 2.362.080.875.000 | 1.996.141.692.000 | 2.443.240.982.000 |
| 24. | Kab. Sragen | 1.958.299.648.000 | 2.141.194.857.000 | 2.194.236.966.584 | 2.104.054.355.242 | 2.152.620.896.665 |
| 25. | Kab. Sukoharjo | 1.887.374.030.000 | 1.969.651.846.000 | 2.039.440.679.000 | 1.954.129.147.000 | 1.893.440.960.000 |
| 26. | Kab. Tegal | 2.615.959.568.000 | 2.793.763.483.000 | 2.875.037.755.000 | 2.771.456.723.000 | 2.690.855.033.000 |
| 27. | Kab. Temanggung | 1.699.841.115.051 | 1.842.970.486.344 | 1.921.489.274.847 | 1.890.486.277.894 | 1.885.886.801.040 |
| 28. | Kab. Wonogiri | 2.192.011.071.842 | 2.328.723.495.900 | 2.351.727.836.675 | 2.303.664.858.286 | 2.198.134.332.793 |
| 29. | Kab. Wonosobo | 1.722.563.823.500 | 1.887.241.266.214 | 1.935.748.155.714 | 1.898.206.473.829 | 1.934.230.518.694 |
| 30. | Kota Magelang | 882.759.301.000 | 911.966.581.000 | 920.107.354.000 | 907.280.962.000 | 819.257.701.625 |
| 31. | Kota Pekalongan | 927.157.125.000 | 988.456.228.000 | 981.361.482.000 | 937.933.186.000 | 956.875.257.000 |
| 32. | Kota Salatiga | 887.972.520.000 | 913.296.914.000 | 967.665.251.000 | 928.511.971.000 | 879.372.434.000 |
| 33. | Kota Semarang | 4.301.858.632.218 | 4.749.249.080.000 | 5.093.441.461.000 | 4.760.117.165.040 | 5.337.927.420.000 |
| 34. | Kota Surakarta | 1.795.725.874.000 | 1.928.886.728.000 | 2.019.861.148.959 | 1.938.004.441.798 | 2.135.619.961.790 |

| No | Kab/Kota | Anggaran Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 35. | Kota Tegal | 989.073.097.000 | 1.043.670.057.000 | 1.132.970.758.000 | 1.110.518.197.000 | 1.085.069.119.000 |



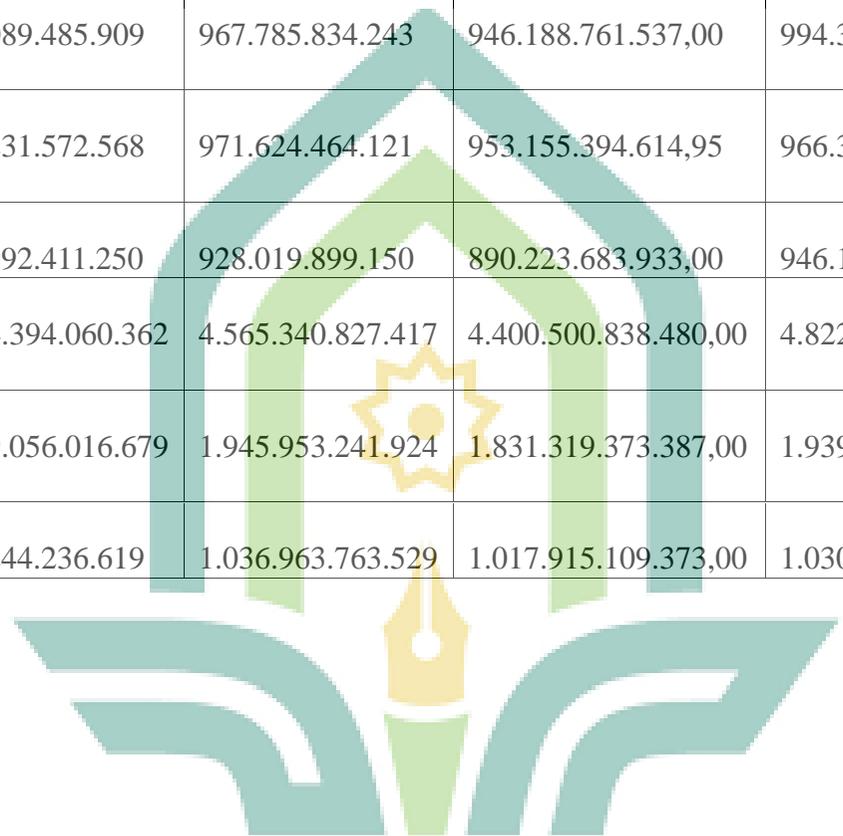
2. Lampiran 2: Data Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

| No. | Kab/Kota | Realisasi Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kab. Banjarnegara | 2.074.653.161.695 | 2.105.990.272.337 | 1.994.604.106.561,00 | 2.086.059.742.250 | 2.044.546.403.305 |
| 2. | Kab. Banyumas | 3.265.926.651.861 | 3.434.925.995.303 | 3.330.186.788.242,00 | 3.487.722.900.410 | 3.426.408.181.664 |
| 3. | Kab. Batang | 1.701.877.299.154 | 1.769.958.202.416 | 1.733.087.893.276,46 | 1.821.822.580.995 | 1.750.957.035.202 |
| 4. | Kab. Blora | 2.120.671.434.967 | 2.240.970.020.181 | 2.127.946.961.535,00 | 2.227.065.270.461 | 2.176.850.305.646 |
| 5. | Kab. Boyolali | 2.227.780.710.062 | 2.357.487.210.573 | 2.382.403.220.150,00 | 2.430.235.208.978 | 2.372.372.551.015 |
| 6. | Kab. Brebes | 2.854.043.939.110 | 3.096.826.845.150 | 3.008.370.717.507,14 | 3.162.140.424.372 | 2.989.821.990.874 |
| 7. | Kab. Cilacap | 3.072.112.464.787 | 3.282.797.966.311 | 3.152.402.455.712,48 | 3.334.300.290.656 | 3.293.132.139.343 |
| 8. | Kab. Demak | 2.143.306.258.595 | 2.362.016.248.793 | 2.333.738.996.798,95 | 2.365.244.759.686 | 2.402.717.869.624 |
| 9. | Kab. Grobogan | 2.439.501.262.356 | 2.581.437.543.584 | 2.528.884.131.946,00 | 2.634.888.673.901 | 2.588.637.777.477 |
| 10. | Kab. Jepara | 2.255.843.022.157 | 2.413.822.993.348 | 2.315.260.399.485,00 | 2.380.695.935.358 | 2.326.937.014.364 |

| No. | Kab/Kota | Realisasi Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11. | Kab. Karanganyar | 2.113.929.231.663 | 2.179.409.706.710 | 2.121.386.179.225,00 | 2.165.983.748.572 | 2.251.540.154.854 |
| 12. | Kab. Kebumen | 2.639.814.864.398 | 2.818.494.983.541 | 2.763.229.307.229,80 | 2.832.035.015.733 | 2.847.196.017.404 |
| 13. | Kab. Kendal | 2.138.564.387.700 | 2.228.384.399.855 | 2.131.449.784.048,00 | 2.300.543.641.945 | 2.265.353.924.690 |
| 14. | Kab. Klaten | 2.577.961.130.135 | 2.689.353.252.985 | 2.578.135.836.354,00 | 2.570.037.777.373 | 2.587.693.432.935 |
| 15. | Kab. Kudus | 1.996.530.094.357 | 2.090.430.364.413 | 2.016.176.986.239,00 | 2.163.634.437.714 | 2.078.759.801.863 |
| 16. | Kab. Magelang | 2.302.190.543.616 | 2.575.439.825.755 | 2.380.457.680.604,00 | 2.469.754.315.099 | 2.558.024.177.090 |
| 17. | Kab. Pati | 2.789.055.859.854 | 2.838.881.396.181 | 2.662.375.437.006,00 | 2.725.202.350.660 | 2.705.053.757.861 |
| 18. | Kab. Pekalongan | 2.101.449.302.497 | 2.182.770.952.456 | 2.061.798.474.096,15 | 2.078.543.512.922 | 2.074.624.015.397 |
| 19. | Kab. Pemasang | 2.428.263.885.703 | 2.636.036.843.851 | 2.449.008.577.285,00 | 2.605.029.836.438 | 2.493.418.191.423 |
| 20. | Kab. Purbalingga | 1.948.442.029.100 | 2.076.658.114.142 | 1.952.749.301.274,00 | 2.054.843.644.547 | 2.022.884.629.933 |

| No. | Kab/Kota | Realisasi Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 21. | Kab. Purworejo | 2.049.784.186.054 | 2.172.436.925.114 | 2.166.947.747.648,00 | 2.290.242.967.778 | 2.185.997.980.027 |
| 22. | Kab. Rembang | 1.785.911.075.230 | 1.821.899.884.311 | 1.878.325.919.915,50 | 1.911.328.505.019 | 1.841.484.139.353 |
| 23. | Kab. Semarang | 2.117.416.566.804 | 2.311.149.343.922 | 2.211.273.524.265,97 | 2.417.282.770.158 | 2.337.453.499.457 |
| 24. | Kab. Sragen | 2.176.997.511.640 | 2.300.826.069.513 | 2.212.824.974.529,00 | 2.336.721.727.716 | 2.177.840.072.042 |
| 25. | Kab. Sukoharjo | 2.055.517.964.074 | 2.143.687.569.516 | 2.040.394.761.328,00 | 2.119.633.370.538 | 2.014.818.262.391 |
| 26. | Kab. Tegal | 2.524.365.919.815 | 2.755.677.484.152 | 2.651.771.838.697,60 | 2.862.559.366.052 | 2.743.700.525.564 |
| 27. | Kab. Temanggung | 1.731.235.867.161 | 1.878.383.823.682 | 1.830.848.453.347,00 | 1.971.005.990.029 | 1.895.483.914.078 |
| 28. | Kab. Wonogiri | 2.298.176.600.990 | 2.442.677.972.827 | 2.273.678.538.635,00 | 2.303.564.898.937 | 2.262.263.891.811 |
| 29. | Kab. Wonosobo | 1.851.441.024.405 | 1.958.595.025.572 | 1.878.995.666.418,00 | 1.967.781.049.592 | 1.921.189.093.169 |

| No. | Kab/Kota | Realisasi Pendapatan Daerah | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 30. | Kota Magelang | 908.089.485.909 | 967.785.834.243 | 946.188.761.537,00 | 994.366.987.776 | 985.763.798.066 |
| 31. | Kota Pekalongan | 905.231.572.568 | 971.624.464.121 | 953.155.394.614,95 | 966.372.557.051 | 989.013.074.926 |
| 32. | Kota Salatiga | 889.992.411.250 | 928.019.899.150 | 890.223.683.933,00 | 946.191.087.524 | 918.353.779.916 |
| 33. | Kota Semarang | 4.234.394.060.362 | 4.565.340.827.417 | 4.400.500.838.480,00 | 4.822.887.281.737 | 4.969.436.543.013 |
| 34. | Kota Surakarta | 1.879.056.016.679 | 1.945.953.241.924 | 1.831.319.373.387,00 | 1.939.268.856.769 | 2.028.438.691.046 |
| 35. | Kota Tegal | 987.244.236.619 | 1.036.963.763.529 | 1.017.915.109.373,00 | 1.030.986.510.449 | 1.042.635.845.201 |



3. Lampiran 3: Data Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018- 2022

| No. | Kab/Kota | Anggaran Belanja Daerah | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kab. Banjarnegara | 2.077.621.418.000 | 2.128.689.824.500 | 2.247.978.404.000 | 3.891.819.949.635 | 2.187.091.604.000 |
| 2. | Kab. Banyumas | 3.472.253.363.785 | 3.621.363.727.000 | 3.743.918.763.744 | 3.891.819.949.635 | 3.609.761.269.620 |
| 3. | Kab. Batang | 1.705.149.533.749 | 1.821.466.358.456 | 1.890.617.425.977 | 1.871.771.478.081 | 1.829.304.856.259 |
| 4. | Kab. Blora | 2.158.819.507.692 | 2.215.590.593.677 | 2.216.323.769.900 | 2.198.118.867.915 | 2.299.649.657.000 |
| 5. | Kab. Boyolali | 2.242.814.340.000 | 2.371.992.364.000 | 2.466.443.423.000 | 2.282.488.616.000 | 2.283.011.438.000 |
| 6. | Kab. Brebes | 2.833.645.748.000 | 3.256.315.618.000 | 3.270.994.179.000 | 3.220.782.215.000 | 3.193.442.500.600 |
| 7. | Kab. Cilacap | 3.084.579.637.400 | 3.352.054.959.317 | 3.552.204.675.002 | 3.646.761.863.600 | 3.503.687.435.633 |
| 8. | Kab. Demak | 2.014.063.460.400 | 2.347.587.514.000 | 2.384.405.766.000 | 2.386.606.230.534 | 2.449.631.876.898 |
| 9. | Kab. Grobogan | 2.383.805.230.083 | 2.514.428.158.592 | 2.615.085.522.983 | 2.497.512.969.115 | 2.652.101.860.000 |
| 10. | Kab. Jepara | 2.358.409.053.000 | 2.331.891.419.000 | 2.541.691.090.000 | 2.135.511.005.000 | 2.580.801.637.020 |

| No. | Kab/Kota | Anggaran Belanja Daerah | | | | |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11. | Kab. Karanganyar | 2.150.630.160.000 | 2.313.588.178.000 | 2.287.236.745.000 | 2.135.811.987.000 | 2.126.535.040.500 |
| 12. | Kab. Kebumen | 2.812.902.414.000 | 2.960.999.393.000 | 3.033.756.768.000 | 2.818.415.166.000 | 2.843.725.872.000 |
| 13. | Kab. Kendal | 2.184.770.769.700 | 2.445.490.278.577 | 2.448.834.513.867 | 2.312.194.067.943 | 2.507.706.131.219 |
| 14. | Kab. Klaten | 2.656.503.142.500 | 2.768.108.345.300 | 2.906.327.298.100 | 2.710.853.259.894 | 2.700.855.921.596 |
| 15. | Kab. Kudus | 1.803.484.250.000 | 1.814.797.414.000 | 1.911.471.464.000 | 1.848.490.329.807 | 2.138.777.595.583 |
| 16. | Kab. Magelang | 2.662.575.016.000 | 2.671.021.115.200 | 2.713.496.677.600 | 2.526.347.858.335 | 2.692.997.581.732 |
| 17. | Kab. Pati | 2.647.132.050.000 | 2.825.572.583.000 | 2.900.220.672.000 | 2.842.495.527.000 | 2.781.043.064.000 |
| 18. | Kab. Pekalongan | 2.230.242.642.800 | 2.417.318.278.800 | 2.446.656.142.301 | 2.256.232.062.404 | 2.219.934.954.546 |
| 19. | Kab. Pemasang | 2.262.937.665.000 | 2.629.612.484.000 | 2.828.842.885.000 | 2.836.829.735.000 | 2.469.130.208.000 |
| 20. | Kab. Purbalingga | 1.992.797.269.000 | 2.101.281.890.000 | 2.095.813.319.000 | 2.016.926.613.000 | 2.077.807.978.000 |
| 21. | Kab. Purworejo | 1.875.058.304.015 | 2.215.437.473.275 | 2.483.287.920.212 | 2.240.552.293.168 | 2.480.523.553.127 |
| 22. | Kab. Rembang | 1.861.907.718.384 | 1.827.508.350.914 | 1.964.433.829.762 | 1.830.578.438.500 | 2.203.102.306.051 |

| No. | Kab/Kota | Anggaran Belanja Daerah | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 23. | Kab. Semarang | 2.132.848.624.000 | 2.277.672.428.000 | 2.454.223.181.000 | 2.090.545.816.000 | 2.562.935.511.000 |
| 24. | Kab. Sragen | 2.170.257.833.699 | 2.146.652.895.644 | 2.312.886.893.345 | 2.265.495.152.935 | 2.382.049.216.160 |
| 25. | Kab. Sukoharjo | 2.126.525.216.000 | 2.242.836.997.000 | 2.392.529.962.000 | 2.247.461.474.000 | 2.122.441.234.012 |
| 26. | Kab. Tegal | 2.789.114.512.000 | 2.866.763.483.000 | 2.891.805.253.000 | 2.894.606.723.000 | 2.869.008.063.000 |
| 27. | Kab. Temanggung | 1.723.357.367.620 | 1.910.778.255.471 | 1.981.489.274.847 | 1.949.350.917.532 | 1.989.495.211.214 |
| 28. | Kab. Wonogiri | 2.279.376.071.842 | 2.423.345.895.900 | 2.474.910.261.874 | 2.402.581.253.034 | 2.293.573.309.945 |
| 29. | Kab. Wonosobo | 1.891.614.169.500 | 2.028.208.621.480 | 2.055.345.635.370 | 1.967.746.230.449 | 1.996.761.244.159 |
| 30. | Kota Magelang | 969.216.881.000 | 1.031.966.581.000 | 995.607.354.000 | 980.191.941.000 | 897.124.309.929 |
| 31. | Kota Pekalongan | 959.757.125.000 | 1.026.156.228.000 | 1.055.857.482.000 | 983.948.191.000 | 998.875.257.000 |
| 32. | Kota Salatiga | 923.362.432.000 | 949.291.338.000 | 1.006.404.906.000 | 978.129.530.000 | 918.603.528.410 |
| 33. | Kota Semarang | 5.170.158.970.218 | 5.134.427.774.000 | 5.256.092.789.000 | 4.854.391.169.040 | 5.544.227.029.000 |
| 34. | Kota Surakarta | 1.905.769.955.034 | 2.001.997.784.000 | 2.109.290.676.959 | 1.974.612.835.274 | 2.239.295.961.790 |

| No. | Kab/Kota | Anggaran Belanja Daerah | | | | |
|-----|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 35. | Kota Tegal | 1.089.919.641.000 | 1.120.465.803.000 | 1.278.393.100.000 | 1.257.032.719.040 | 1.164.677.631.206 |

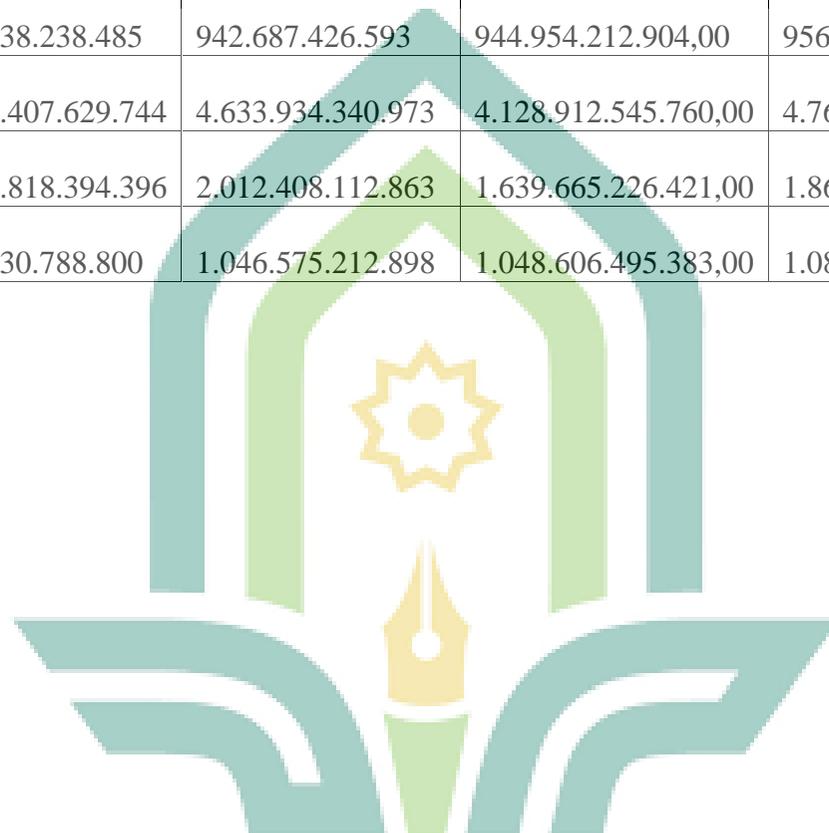
4. Lampiran 4: Data Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018- 2022

| No. | Kab/Kota | Realisasi Belanja Daerah | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kab. Banjarnegara | 2.119.096.683.202 | 2.123.033.797.431 | 2.030.532.397.495,00 | 2.042.019.297.374 | 2.039.210.930.404 |
| 2. | Kab. Banyumas | 3.319.060.759.043 | 3.457.550.201.497 | 3.249.141.935.364,00 | 3.430.884.286.153 | 3.600.847.367.173 |
| 3. | Kab. Batang | 1.687.215.725.890 | 1.755.066.560.019 | 1.662.512.932.221,19 | 1.780.425.131.876 | 1.801.913.436.483 |
| 4. | Kab. Blora | 2.116.475.561.459 | 2.201.539.935.903 | 2.109.122.887.754,00 | 2.113.773.065.809 | 2.396.215.621.703 |
| 5. | Kab. Boyolali | 2.203.112.762.252 | 2.381.601.864.739 | 2.339.805.517.025,00 | 2.268.508.827.348 | 2.471.827.429.489 |
| 6. | Kab. Brebes | 2.825.364.002.156 | 3.132.251.740.580 | 2.955.050.373.005,00 | 3.126.226.470.519 | 3.091.285.559.556 |
| 7. | Kab. Cilacap | 2.985.422.839.102 | 3.283.321.137.886 | 3.088.834.820.260,00 | 3.329.814.716.680 | 3.402.035.620.730 |

| No. | Kab/Kota | Realisasi Belanja Daerah | | | | |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 8. | Kab. Demak | 2.050.065.954.050 | 2.309.815.550.608 | 2.285.742.096.591,00 | 2.336.015.725.797 | 2.487.342.627.299 |
| 9. | Kab. Grobogan | 2.345.537.047.244 | 2.551.226.710.394 | 2.511.268.625.929,00 | 2.428.631.673.540 | 2.687.129.832.388 |
| 10. | Kab. Jepara | 2.300.574.121.504 | 2.337.605.986.009 | 2.268.045.725.410,00 | 2.309.409.464.300 | 2.429.312.218.030 |
| 11. | Kab. Karanganyar | 2.064.581.557.575 | 2.262.015.969.098 | 2.092.032.552.152,00 | 2.138.939.585.089 | 2.203.430.151.176 |
| 12. | Kab. Kebumen | 2.652.047.980.376 | 2.809.549.444.627 | 2.737.861.916.080,00 | 2.779.840.698.100 | 2.824.358.293.725 |
| 13. | Kab. Kendal | 2.148.450.040.419 | 2.331.683.034.136 | 2.041.114.766.533,00 | 2.069.958.006.821 | 2.499.014.019.249 |
| 14. | Kab. Klaten | 2.611.007.499.826 | 2.682.356.733.814 | 2.545.164.494.577,00 | 2.493.406.881.542 | 2.527.619.332.474 |
| 15. | Kab. Kudus | 1.957.701.652.495 | 2.061.664.156.540 | 1.914.626.257.581,00 | 1.879.122.990.401 | 2.231.500.773.692 |
| 16. | Kab. Magelang | 2.486.540.561.169 | 2.568.593.603.007 | 2.304.375.917.161,00 | 2.413.163.788.892 | 2.570.326.001.677 |
| 17. | Kab. Pati | 2.781.234.687.644 | 2.870.260.403.230 | 2.739.724.372.740,00 | 2.623.732.654.045 | 2.717.685.026.789 |
| 18. | Kab. Pekalongan | 2.160.744.430.323 | 2.183.534.790.005 | 2.053.017.711.594,00 | 2.075.043.160.188 | 2.123.953.846.361 |
| 19. | Kab. Pemasang | 2.324.288.798.012 | 2.584.470.869.519 | 2.664.990.530.908,00 | 2.524.558.785.164 | 2.504.262.139.265 |

| No. | Kab/Kota | Realisasi Belanja Daerah | | | | |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 20. | Kab. Purbalingga | 1.924.908.432.550 | 2.062.727.850.424 | 1.894.875.529.380,00 | 1.999.904.829.992 | 2.122.762.527.980 |
| 21. | Kab. Purworejo | 2.125.880.839.764 | 2.186.289.226.260 | 2.126.674.178.307,00 | 2.135.478.213.580 | 2.347.131.165.050 |
| 22. | Kab. Rembang | 1.814.662.262.214 | 1.863.502.828.110 | 1.830.776.504.959,20 | 1.836.443.011.929 | 1.991.790.018.143 |
| 23. | Kab. Semarang | 2.171.799.810.994 | 2.312.242.117.310 | 2.191.412.621.750,00 | 2.198.880.662.286 | 2.536.331.344.170 |
| 24. | Kab. Sragen | 2.236.802.757.132 | 2.092.140.283.903 | 2.130.438.476.217,00 | 2.160.877.775.669 | 2.306.325.555.226 |
| 25. | Kab. Sukoharjo | 2.050.161.904.519 | 2.114.149.361.513 | 2.073.080.966.909,00 | 2.089.455.558.854 | 2.042.027.814.977 |
| 26. | Kab. Tegal | 2.575.620.503.042 | 2.717.431.598.854 | 2.505.539.949.419,52 | 2.776.664.042.487 | 2.722.064.917.511 |
| 27. | Kab. Temanggung | 1.670.309.285.608 | 1.841.033.635.270 | 1.783.204.949.098,00 | 1.877.969.167.294 | 1.958.748.409.806 |
| 28. | Kab. Wonogiri | 2.246.861.248.844 | 2.455.975.319.573 | 2.262.812.452.301,00 | 2.297.510.694.153 | 2.243.214.084.512 |
| 29. | Kab. Wonosobo | 1.856.165.286.054 | 2.024.794.957.930 | 1.881.315.428.762,00 | 1.860.097.990.936 | 2.011.113.250.458 |
| 30. | Kota Magelang | 937.345.746.470 | 995.162.119.612 | 798.353.191.714,00 | 935.047.734.177 | 1.039.501.502.733 |
| 31. | Kota Pekalongan | 883.184.894.707 | 954.397.012.827 | 944.840.460.675,56 | 962.091.792.004 | 1.031.090.188.444 |

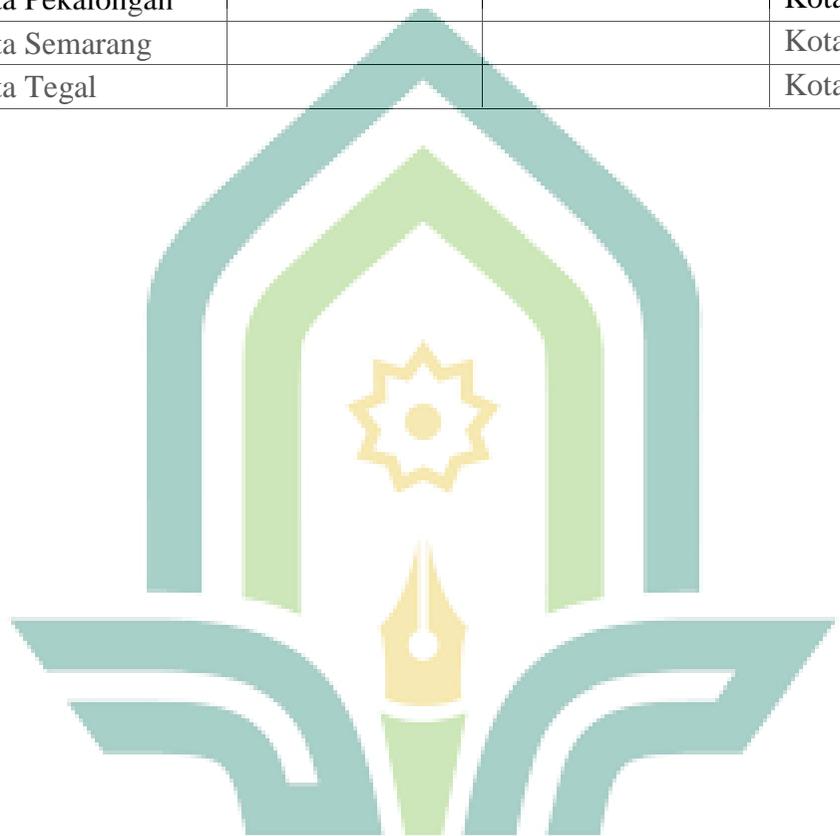
| No. | Kab/Kota | Realisasi Belanja Daerah | | | | |
|-----|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 32. | Kota Salatiga | 923.538.238.485 | 942.687.426.593 | 944.954.212.904,00 | 956.501.304.732 | 932.071.471.274 |
| 33. | Kota Semarang | 4.506.407.629.744 | 4.633.934.340.973 | 4.128.912.545.760,00 | 4.764.045.946.157 | 4.871.946.697.040 |
| 34. | Kota Surakarta | 1.914.818.394.396 | 2.012.408.112.863 | 1.639.665.226.421,00 | 1.866.496.348.304 | 2.088.323.395.600 |
| 35. | Kota Tegal | 916.730.788.800 | 1.046.575.212.898 | 1.048.606.495.383,00 | 1.089.705.697.276 | 1.127.738.112.539 |



5. Lampiran 5: Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat ekonomisnya tahun 2018- 2022

| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat ekonomisnya | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| No. | 2018 | | | 2019 | | |
| | Ekonomis Berimbang | Ekonomis | Tidak Ekonomis | Ekonomis Berimbang | Ekonomis | Tidak Ekonomis |
| 1. | Kab. Brebes | Kab. Banyumas | Kab. Demak | Kab. Banjarnegara | Kab. Banyumas | Kab. Grobogan |
| 2. | Kab. Purworejo | Kab. Batang | Kab. Kudus | Kab. Boyolali | Kab. Batang | Kab. Kudus |
| 3. | Kota Salatiga | Kab. Blora | Kab. Pati | Kab. Jepara | Kab. Blora | Kab. Pati |
| 4. | Kota Surakarta | Kab. Boyolali | Kab. Pemalang | Kab. Wonosobo | Kab. Brebes | Kab. Rembang |
| 5. | | Kab. Cilacap | Kab. Semarang | | Kab. Cilacap | Kab. Semarang |
| 6. | | Kab. Grobogan | Kab. Sragen | | Kab. Demak | Kab. Wonogiri |
| 7. | | Kab. Jepara | | | Kab. Karanganyar | Kota Surakarta |
| 8. | | Kab. Karanganyar | | | Kab. Kebumen | |
| 9. | | Kab. Kebumen | | | Kab. Kendal | |
| 10. | | Kab. Kendal | | | Kab. Klaten | |
| 11. | | Kab. Klaten | | | Kab. Magelang | |
| 12. | | Kab. Magelang | | | Kab. Pekalongan | |
| 13. | | Kab. Pekalongan | | | Kab. Pemalang | |
| 14. | | Kab. Purbalingga | | | Kab. Purbalingga | |
| 15. | | Kab. Rembang | | | Kab. Purworejo | |
| 16. | | Kab. Sukoharjo | | | Kab. Sragen | |
| 17. | | Kab. Tegal | | | Kab. Sukoharjo | |
| 18. | | Kab. Temanggung | | | Kab. Tegal | |
| 19. | | Kab. Wonogiri | | | Kab. Temanggung | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| 20. | | Kab. Wonosobo | | | Kota Magelang | |
| 21. | | Kota Magelang | | | Kota Pekalongan | |
| 22. | | Kota Pekalongan | | | Kota Salatiga | |
| 23. | | Kota Semarang | | | Kota Semarang | |
| 24. | | Kota Tegal | | | Kota Tegal | |

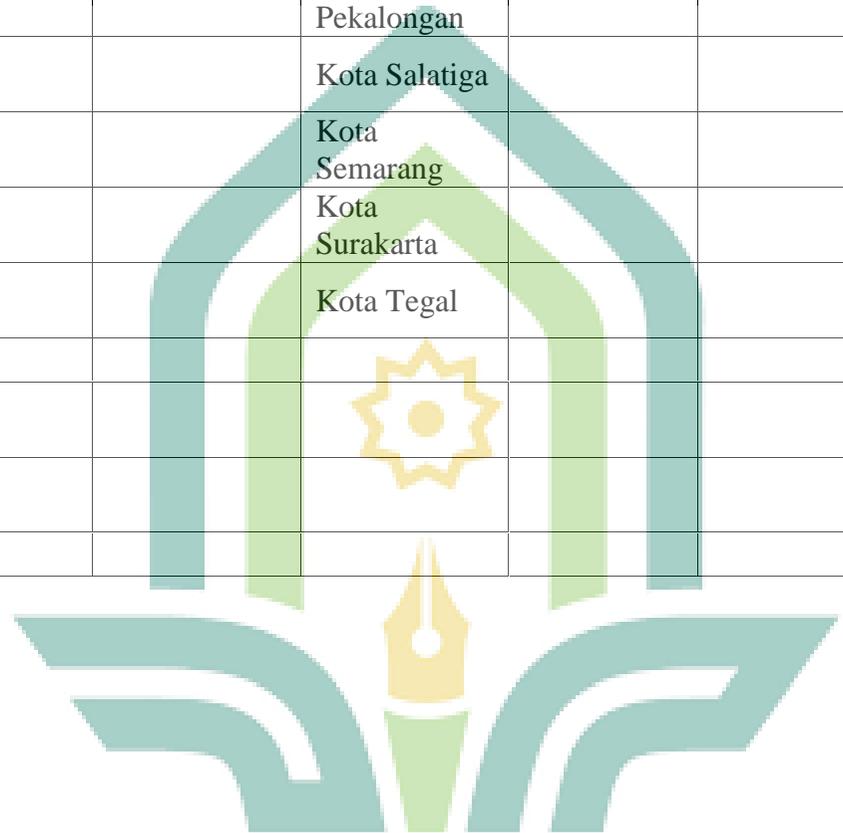


Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat ekonomis di Tahun 2020

| No. | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Ekonomis | Ekonomis Berimbang | Ekonomis berimbang | Ekonomis | Tidak Ekonomis | Ekonomis berimbang | Ekonomis | Tidak Ekonomis |
| 1 | Kab. Banjarnegara | Kab. Kudus | Kab. Karanganyar | Kab. Banjarnegara | Kab. Jepara | Kab. Banyumas | Kab. Banjarnegara | Kab. Blora |
| 2 | Kab. Banyumas | | Kab. Rembang | Kab. Banyumas | Kab. Kudus | Kab. Kendal | Kab. Batang | Kab. Boyolali |
| 3 | Kab. Batang | | | Kab. Batang | Kab. Semarang | | Kab. Brebes | Kab. Demak |
| 4 | Kab. Blora | | | Kab. Blora | | | Kab. Cilacap | Kab. Grobogan |
| 5 | Kab. Boyolali | | | Kab. Boyolali | | | Kab. Jepara | Kab. Karanganyar |
| 6 | Kab. Brebes | | | Kab. Brebes | | | Kab. Kebumen | Kab. Kudus |
| 7 | Kab. Cilacap | | | Kab. Cilacap | | | Kab. Klaten | Kab. Pemalang |
| 8 | Kab. Demak | | | Kab. Demak | | | Kab. Magelang | Kab. Purbalingga |
| 9 | Kab. Grobogan | | | Kab. Grobogan | | | Kab. Pati | |
| 10 | Kab. Jepara | | | Kab. Kebumen | | | Kab. Pekalongan | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------|--|
| 11 | Kab. Karanganyar | | | Kab. Kendal | | | Kab. Purworejo | |
| 12 | Kab. Kebumen | | | Kab. Klaten | | | Kab. Rembang | |
| 13 | Kab. Kendal | | | Kab. Magelang | | | Kab. Semarang | |
| 14 | Kab. Klaten | | | Kab. Pati | | | Kab. Sragen | |
| 15 | Kab. Magelang | | | Kab. Pekalongan | | | Kab. Sukoharjo | |
| 16 | Kab. Pati | | | Kab. Pemalang | | | Kab. Tegal | |
| 17 | Kab. Pekalongan | | | Kab. Purbalingga | | | Kab. Temanggung | |
| 18 | Kab. Pemalang | | | Kab. Purworejo | | | Kab. Wonogiri | |
| 19 | Kab. Purbalingga | | | Kab. Sragen | | | Kota Semarang | |
| 20 | Kab. Purworejo | | | Kab. Sukoharjo | | | Kota Surakarta | |
| 21 | Kab. Rembang | | | Kab. Tegal | | | Kota Tegal | |
| 22 | Kab. Semarang | | | Kab. Temanggung | | | Kab. Wonosobo | |
| 23 | Kab. Sragen | | | Kab. Wonogiri | | | Kota Magelang | |
| 24 | Kab. Sukoharjo | | | Kab. Wonosobo | | | Kota Pekalongan | |

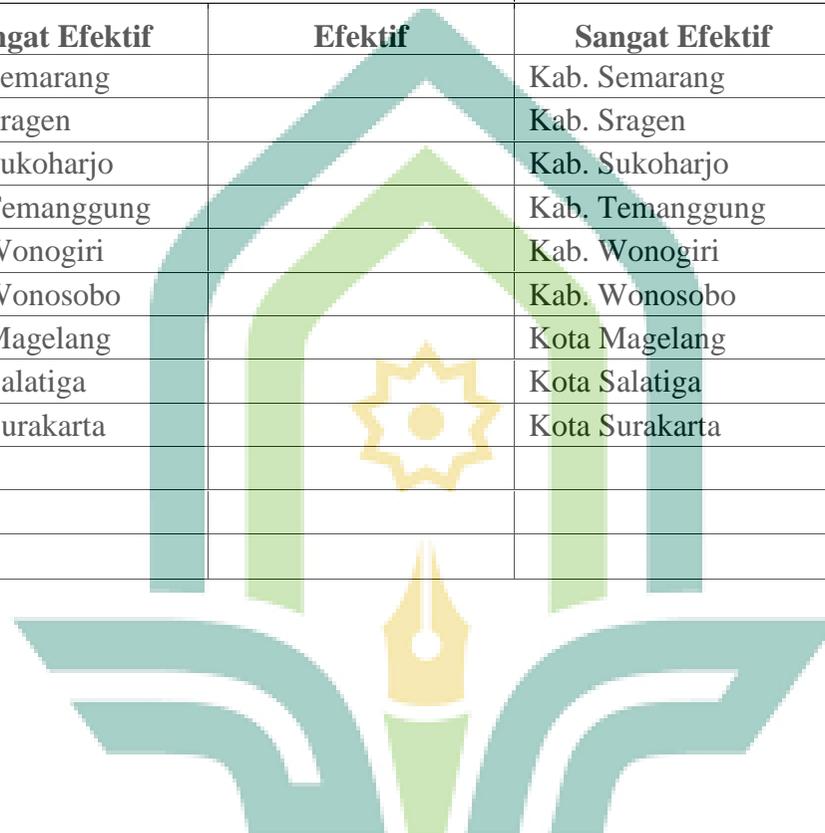
| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|
| 25 | Kab. Tegal | | | Kota Magelang | | | Kota Salatiga | |
| 26 | Kab. Temanggung | | | Kota Pekalongan | | | | |
| 27 | Kab. Wonogiri | | | Kota Salatiga | | | | |
| 28 | Kab. Wonosobo | | | Kota Semarang | | | | |
| 29 | Kota Magelang | | | Kota Surakarta | | | | |
| 30 | Kota Pekalongan | | | Kota Tegal | | | | |
| 31 | Kota Salatiga | | | | | | | |
| 32 | Kota Semarang | | | | | | | |
| 33 | Kota Surakarta | | | | | | | |
| 34 | Kota Tegal | | | | | | | |



6. Lampiran 6 : Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya di tahun 2018- 2022

| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| No. | 2018 | | 2019 | |
| | Sangat Efektif | Efektif | Sangat Efektif | Efektif |
| 1. | Kab. Banjarnegara | Kab. Blora | Kab. Banjarnegara | Kab. Batang |
| 2. | Kab. Banyumas | Kab. Kebumen | Kab. Banyumas | Kab. Kendal |
| 3. | Kab. Batang | Kab. Magelang | Kab. Blora | Kab. Magelang |
| 4. | Kab. Boyolali | Kab. Pekalongan | Kab. Boyolali | Kab. Pekalongan |
| 5. | Kab. Brebes | Kab. Purbalingga | Kab. Brebes | Kab. Purworejo |
| 6. | Kab. Cilacap | Kab. Tegal | Kab. Cilacap | Kab. Tegal |
| 7. | Kab. Demak | Kota Pekalongan | Kab. Demak | Kota Pekalongan |
| 8. | Kab. Grobogan | Kota Semarang | Kab. Grobogan | Kota Semarang |
| 9. | Kab. Jepara | Kota Tegal | Kab. Jepara | |
| 10. | Kab. Karanganyar | | Kab. Karanganyar | |
| 11. | Kab. Kendal | | Kab. Kebumen | |
| 12. | Kab. Klaten | | Kab. Klaten | |
| 13. | Kab. Kudus | | Kab. Kudus | |
| 14. | Kab. Pati | | Kab. Pati | |
| 15. | Kab. Pemasang | | Kab. Pemasang | |
| 16. | Kab. Purworejo | | Kab. Purbalingga | |
| 17. | Kab. Rembang | | Kab. Rembang | |

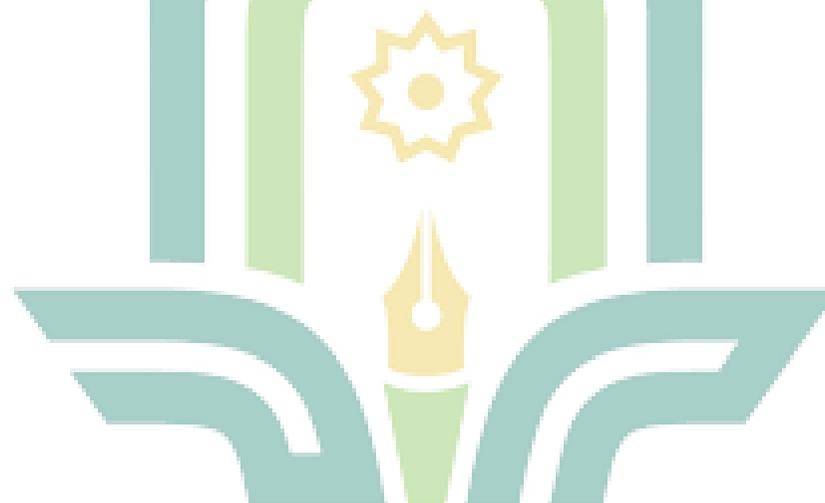
| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| No. | 2018 | | 2019 | |
| | Sangat Efektif | Efektif | Sangat Efektif | Efektif |
| 18. | Kab. Semarang | | Kab. Semarang | |
| 19. | Kab. Sragen | | Kab. Sragen | |
| 20. | Kab. Sukoharjo | | Kab. Sukoharjo | |
| 21. | Kab. Temanggung | | Kab. Temanggung | |
| 22. | Kab. Wonogiri | | Kab. Wonogiri | |
| 23. | Kab. Wonosobo | | Kab. Wonosobo | |
| 24. | Kota Magelang | | Kota Magelang | |
| 25. | Kota Salatiga | | Kota Salatiga | |
| 26. | Kota Surakarta | | Kota Surakarta | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |



| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| No. | 2020 | | | 2021 | | 2022 | |
| | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Sangat Efektif | Efektif | Sangat Efektif | Efektif |
| 1. | Kab. Demak | Kab. Banjarnegara | Kab. Pekalongan | Kab. Batang | Kab. Banjarnegara | Kab. Blora | Kab. Banjarnegara |
| 2. | Kab. Kudus | Kab. Banyumas | Kota Semarang | Kab. Blora | Kab. Banyumas | Kab. Boyolali | Kab. Banyumas |
| 3. | Kab. Sragen | Kab. Batang | Kota Tegal | Kab. Boyolali | Kab. Pati | Kab. Demak | Kab. Batang |
| 4. | Kab. Sukoharjo | Kab. Blora | | Kab. Brebes | Kab. Pekalongan | Kab. Grobogan | Kab. Brebes |
| 5. | Kota Magelang | Kab. Boyolali | | Kab. Cilacap | Kab. Wonogiri | Kab. Karanganyar | Kab. Cilacap |
| 6. | | Kab. Brebes | | Kab. Demak | Kota Tegal | Kab. Kebumen | Kab. Jepara |
| 7. | | Kab. Cilacap | | Kab. Grobogan | | Kab. Klaten | Kab. Kendal |
| 8. | | Kab. Grobogan | | Kab. Jepara | | Kab. Kudus | Kab. Pekalongan |
| 9. | | Kab. Jepara | | Kab. Karanganyar | | Kab. Magelang | Kab. Purworejo |
| 10. | | Kab. Karanganyar | | Kab. Kebumen | | Kab. Pati | Kab. Rembang |
| 11. | | Kab. Kebumen | | Kab. Kendal | | Kab. Pemasaran | Kab. Semarang |
| 12. | | Kab. Kendal | | Kab. Klaten | | Kab. Purbalingga | Kab. Wonosobo |

| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|---------|-----------------|----------------|
| No. | 2020 | | | 2021 | | 2022 | |
| | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Sangat Efektif | Efektif | Sangat Efektif | Efektif |
| 13. | | Kab. Klaten | | Kab. Kudus | | Kab. Sragen | Kota Semarang |
| 14. | | Kab. Magelang | | Kab. Magelang | | Kab. Sukoharjo | Kota Surakarta |
| 15. | | Kab. Pati | | Kab. Pemalang | | Kab. Tegal | Kota Tegal |
| 16. | | Kab. Pemalang | | Kab. Purbalingga | | Kab. Temanggung | |
| 17. | | Kab. Purbalingga | | Kab. Purworejo | | Kab. Wonogiri | |
| 18. | | Kab. Purworejo | | Kab. Rembang | | Kota Magelang | |
| 19. | | Kab. Rembang | | Kab. Semarang | | Kota Pekalongan | |
| 20. | | Kab. Semarang | | Kab. Sragen | | Kota Salatiga | |
| 21. | | Kab. Tegal | | Kab. Sukoharjo | | | |
| 22. | | Kab. Temanggung | | Kab. Tegal | | | |
| 23. | | Kab. Wonogiri | | Kab. Temanggung | | | |
| 24. | | Kab. Wonosobo | | Kab. Wonosobo | | | |
| 25. | | Kab. Tegal | | Kota Magelang | | | |

| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efektivitasnya | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|----------------|---------|
| No. | 2020 | | | 2021 | | 2022 | |
| | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Sangat Efektif | Efektif | Sangat Efektif | Efektif |
| 26. | | Kab. Temanggung | | Kota Pekalongan | | | |
| 27. | | Kab. Wonogiri | | Kota Salatiga | | | |
| 28. | | Kab. Wonosobo | | Kota Semarang | | | |
| 29. | | kota surakarta | | Kota Surakarta | | | |



7. Lampiran 7 : Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efisiensinya di tahun 2018- 2022

| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efisiensinya | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| No. | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Cukup Efisien |
| 1. | Kab. Batang | Kab. Banjarnegara | Kab. Batang | Kab. Banjarnegara | Kab. Banyumas | Kab. Banjarnegara | Kota Magelang |
| 2. | Kab. Blora | Kab. Banyumas | Kab. Blora | Kab. Banyumas | Kab. Batang | Kab. Pati | Kota Surakarta |
| 3. | Kab. Boyolali | Kab. Jepara | Kab. Cilacap | Kab. Boyolali | Kab. Blora | Kab. Pemasang | |
| 4. | Kab. Brebes | Kab. Klaten | Kab. Demak | Kab. Brebes | Kab. Boyolali | Kab. Sukoharjo | |
| 5. | Kab. Cilacap | Kab. Magelang | Kab. Grobogan | Kab. Karanganyar | Kab. Brebes | Kota Salatiga | |
| 6. | Kab. Demak | Kab. Pekalongan | Kab. Jepara | Kab. Kendal | Kab. Cilacap | Kota Tegal | |
| 7. | Kab. Grobogan | Kab. Purworejo | Kab. Kebumen | Kab. Pati | Kab. Demak | | |
| 8. | Kab. Karanganyar | Kab. Rembang | Kab. Klaten | Kab. Purworejo | Kab. Grobogan | | |
| 9. | Kab. Kebumen | Kab. Semarang | Kab. Kudus | Kab. Rembang | Kab. Jepara | | |
| 10. | Kab. Kendal | Kab. Sragen | Kab. Magelang | Kab. Wonogiri | Kab. Karanganyar | | |

| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efesiensinya | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| No. | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Cukup Efisien |
| 11. | Kab. Kudus | Kab. Tegal | Kab. Pekalongan | Kab. Wonosobo | Kab. Kebumen | | |
| 12. | Kab. Pati | Kota Magelang | Kab. Pemalang | Kota Magelang | Kab. Kendal | | |
| 13. | Kab. Pemalang | Kota Salatiga | Kab. Purbalingga | Kota Salatiga | Kab. Klaten | | |
| 14. | Kab. Purbalingga | Kota Semarang | Kab. Semarang | Kota Semarang | Kab. Kudus | | |
| 15. | Kab. Sukoharjo | Kota Surakarta | Kab. Sragen | Kota Surakarta | Kab. Magelang | | |
| 16. | Kab. Temanggung | | Kab. Sukoharjo | Kota Tegal | Kab. Pekalongan | | |
| 17. | Kab. Wonogiri | | Kab. Tegal | | Kab. Purbalingga | | |
| 18. | Kab. Wonosobo | | Kab. Temanggung | | Kab. Purworejo | | |
| 19. | Kota Pekalongan | | Kota Pekalongan | | Kab. Rembang | | |
| 20. | Kota Tegal | | | | Kab. Semarang | | |

| Daftar Kabupaten/ Kota dan tingkat efesiensinya | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| No. | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Kurang Efisien | Tidak Efisien | Cukup Efisien |
| 21. | | | | | Kab. Sragen | | |
| 22. | | | | | Kab. Tegal | | |
| 23. | | | | | Kab. Temanggung | | |
| 24. | | | | | Kab. Wonogiri | | |
| 25. | | | | | Kab. Wonosobo | | |
| 26. | | | | | Kota Pekalongan | | |
| 27. | | | | | Kota Semarang | | |
| 28. | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | |



Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Rohayatul Akyani
2. Tempat, tanggal lahir : Batang, 29 Juni 2002
3. Alamat rumah : Ds. Wonorojo, RT.06/ Rw.01, Kec. Reban,
Kab. Batang
4. Nomor Handphone : 085802472983
5. Email : akyanirohayatul@gmail.com
6. Nama Ayah : Asari
7. Pekerjaan Ayah : Petani
8. Nama Ibu : Wastri
9. Pekerjaan Ibu : Petani

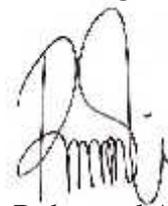
B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Wonorojo (2008-2014)
2. SMP : SMP Negeri 1 Reban (2014-2017)
3. SMA/ SMK : SMK Negeri 1 Blado (2017-2020)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM U- Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Devisi Kaligrafi,
2021-2022
2. UKM U- Kaligrafi, Badan Pengurus Harian, 2022-2023

Pekalongan, 19 Juni 2024



Rohayatul Akyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ROHAYATUL AKYANI
NIM : 4320017
Fakultas/Prodi : FEBI / AKUNTANSI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018- 2022
MELALUI PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY***

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024

ROHAYATUL AKYANI
NIM. 4320017

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.